

Konsolidasi Paradigma Komunikasi Pembangunan yang Demokratis <i>Budi Sayoga</i>	1-15
Peran Perempuan dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Rongkop Gunung Kidul <i>Leslie Retno Angeningsih/Suindarti</i>	16-26
Pembaharuan Usaha Kecil Konveksi di Tulungagung <i>Eddy Wahyudi</i>	27-40
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Pengembangan Ekonomi Mikro Pola Baitul Maal Watanwil (BMT) di Perdesaan <i>Sri Utami</i>	41-52
Problematika Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) dalam Pengurangan Kemiskinan <i>Nelly Tiurmida</i>	53-66
Potensi Kampung Prawirodirjan Gondomanan sebagai Kampung Wisata Eksotik <i>Oktarina Albizzia</i>	67-77
Kebijakan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Gambut di Kalimantan Tengah <i>Kisno Hadi</i>	78-89



Konsolidasi Paradigma Komunikasi Pembangunan yang Demokratis

Budi Sayoga
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL Universitas Gadjahmada
Jl. Sosioyustisia Bulaksumur
Email: budisayoga59@yahoo.com

Abstract

Development Communication is a process that aims to distribute information that can improve the quality of life of the society. In order for the process to be able to be implemented optimally, it must be framed in a democratic climate. Democratization in Indonesia's activities of development of communication activities can be realized if the paradigm is changed. A democratic development communication paradigm is a process of communication in favor of the interests of the people. It also to be done in dialogue, transparency, and in a convergent and egalitarian way. In this reformation era, the paradigm of development communication activities has been working, but not yet perfect, so it must be consolidated. With consolidation model, it is expected that the ideal of formation of a self-empowered society can be optimally realized.

Keywords: *paradigm, communications, democratic*

Abstrak

Komunikasi pembangunan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mendistribusikan informasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agar proses itu dapat dilaksanakan secara optimal maka harus dibingkai dalam suatu iklim yang demokratis. Demokratisasi dalam aktivitas komunikasi pembangunan di Indonesia dapat diwujudkan apabila paradigmanya diubah. Paradigma komunikasi pembangunan yang demokratis adalah suatu proses komunikasi yang memihak kepada kepentingan rakyat, dilakukan secara dialogis, transparan, konvergen dan egaliter. Di era reformasi dewasa ini paradigma aktivitas komunikasi pembangunan itu sudah berjalan namun belum sempurna, sehingga harus dikonsolidasikan. Dengan model konsolidasi tersebut diharapkan cita-cita terbentuknya masyarakat yang berdaya dan mandiri dapat terealisasi secara optimal

Kata-kata Kunci: *paradigma, komunikasi, demokratis*

Pendahuluan

Angin perubahan dalam segala bidang semenjak 1998 telah bertiup di Indonesia. Meskipun dampak perubahan berlangsung secara gradual, tetapi harus diakui bahwasannya dinamika perubahan telah terjadi baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun di bi-

dang yang lebih spesifik yakni sistem informasi komunikasi pembangunan. Bergulirnya reformasi politik di Indonesia memberikan imbas terciptanya iklim komunikasi informasi pembangunan yang lebih demokratis dibandingkan pada masa Orde Baru.

Walaupun belum optimal, paradigma komunikasi informasi pembangunan saat ini lebih bercorak egaliter, transparan dan bersifat dua arah. Rakyat diposisikan sebagai subyek pembangunan dan tidak semata hanya menjadi obyek pasif yang keberadaannya tidak diperhitungkan, tidak dilibatkan, kecuali hanya sebagai sasaran doktrin-doktrin politik dari rezim yang berkuasa. Pada masa Orde Baru, rakyat hanya sebagai target pesan semata dan tidak terlibat secara aktif dalam proses perencanaan komunikasi informasi pembangunan. Maka hal itu berimplikasi terjadinya konstruksi komunikasi dan termarginalkannya posisi rakyat. Kondisi ini menghilangkan ide-ide kreatif yang bersifat endemik dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan publik. Imbasnya, substansi pesan ketika sampai pada tahap implementasi menjadi suatu hal yang janggal, aneh dan berjarak dengan tata kehidupan lokal suatu komunitas.

Fenomena terpinggirkannya rakyat dari proses konstruksi dan distribusi komunikasi pembangunan pada masa Orde Baru tidak lepas dari karakter politik rezim penguasa pada saat itu. Iklim politik waktu itu tidak memberikan keleluasaan bagi tumbuh suburnya inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan difusi informasi pembangunan. Segala kebijakan pemerintah termasuk dalam hal penentuan substansi informasi pembangunan dirancang secara sentralistik dan kemudian disosialisasikan secara *top-down*. Aspirasi warga tidak pernah diakomodasi, harapan dan ke-

inginan masyarakat untuk mencari solusi yang kuat atas berbagai persoalan hidup yang melingkupinya jarang bahkan tidak pernah didengar dan diperhatikan.

Pendek kata, pada era Orde Baru, rakyat tidak dilibatkan sebagai mitra dialog oleh rezim penguasa. Diskusi publik sebagai suatu prasyarat ideal dalam suatu proses pembuatan kebijakan yang demokratis tidak pernah dilakukan sehingga sistem informasi dan komunikasi yang terjadi lebih bercorak monolog, memerintah, memanipulasi dan mengeksploitasi. Dalam model komunikasi yang bersifat monolog, arah komunikasi bersifat linier, alternatif opsi dipersempit sehingga rakyat tidak banyak memiliki kesempatan dan pilihan. Hal ini diperparah dengan konsekuensi atas pilihan-pilihan yang terbatas dan sengaja dibuat tidak transparan (Mulyana, 2001). Ketidaktransparanan ini memang disengaja agar rakyat tidak ada keraguan dan kesangsian ketika harus mengadopsi dan mengimplementasikan suatu ide/gagasan dari rezim, meskipun sebenarnya hasil inovasi tersebut belum terbukti validitasnya.

Corak komunikasi informasi pembangunan yang terjadi pada era itu lebih berpihak pada kepentingan, keamanan dan keamanan sistem politik yang ada dan bukan berpihak pada upaya pemberdayaan rakyat. Fokus pesan komunikasi pembangunan lebih diorientasikan pada substansi dan *interest* komunikator (aparatus) dan bukan pada kebutuhan faktual khalayaknya (Johannesen, 1994). Jadi energi komunikasi dan informasi se-

mata-mata lebih diarahkan pada proses “*struggle to get a political power*”, bukan proses komunikasi pembangunan yang menjanjikan kemaslahatan, keberdayaan serta perubahan yang konstruktif, kreatif dan produktif bagi hajat hidup masyarakat. Pada masa itu rakyat benar-benar hanya sebagai obyek yang dieksploitasi demi aneka kepentingan (politik, sosial, ekonomi) penguasa. Ironisnya upaya-upaya yang eksploitatif tadi dilakukan oleh rezim dengan menggunakan berbagai macam saluran dan media.

Manipulasi dan distorsi pesan oleh pemerintah Orde Baru memanfaatkan media massa (cetak/elektronik) yang sudah disub-ordinasikan lewat kontrol dan pembatasan yang ketat. Media massa baik swasta, terlebih milik penguasa, menjadi instrumen strategis bagi upaya distribusi informasi yang sangat bias kepentingan tersebut. Keberadaan media sebagai “*fourth estate*” hanya sebatas jargon indah yang jauh dari kenyataan. Posisi media massa benar-benar terdegradasi pada titik yang paling rendah. Undang-undang, peraturan maupun kebijakan pemerintah Orde Baru selalu berupaya memberlakukan media massa sebagai alat dalam mendukung eksistensi kekuasaan rezim dan dijauhkan dari fungsi kontrol sosial serta pengawas ruang publik, sebagaimana fungsi ideal yang semestinya melekat pada media massa.

Ruang gerak media massa sangat dibatasi oleh rezim Orde Baru. Media massa yang berani vokal atas kebijakan pemerintah yang menyimpang, minimal

akan mendapatkan “hadiah” gunting sensor dan bahkan maksimal akan ditutup atau dibreidel. Akibatnya, daya kritis dan korektif dari media massa atas kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan publik teredam dan terkubur dalam-dalam. Namun demikian, media massa berusaha “menyelamatkan diri”, karena media massa berupaya untuk tetap menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup dari kerasnya tekanan pemerintah atas media yang dianggap berseberangan. Oleh karenanya, pada waktu itu media hanya sebatas menyajikan informasi-informasi yang tidak substantif sekaligus menjadi alat legalisasi kebijakan pemerintah yang menyimpang. Walaupun terpaksa, media juga menjalankan peran sebagai instrumen *public relation* rezim agar nampak selalu berkilau citra yang melingkupinya.

Di samping memanfaatkan media massa, propaganda dan doktrin-doktrin politik Orde Baru disosialisasikan dengan menggunakan sarana-sarana lembaga kemasyarakatan baik yang bersifat formal maupun informal. Boleh dikatakan tidak ada satu pun lembaga sosial ke-masyarakatan yang tidak terkooptasi dan terintervensi oleh kepentingan rezim. Keberadaan lembaga kemasyarakatan, sebagaimana media massa, juga dikontrol dengan beraneka peraturan dan kebijakan yang melemahkan. Itu semua dilakukan oleh rezim agar lembaga-lembaga tersebut tidak melakukan manuver-manuver politik yang dapat membahayakan sistem politik yang ada. Lembaga sosial kemasyarakatan formal

seperti LKMD, Karang Taruna, Pendidikan PKK, KNPI, Klompencapir ataupun lembaga sosial kemasyarakatan informal seperti kelompok pengajian, persekutuan do'a, takmir masjid dan lain-lain disusupi dan disubordinasi menjadi kepanjangan tangan rezim dalam menstabilkan dan melanggengkan posisi politiknya.

Dalam bingkai sistem politik yang otoriter semacam ini komunikasi informasi yang dialogis, egaliter dan dilandasi semangat yang demokratis antara penguasa dan rakyat jarang terjadi bahkan tidak pernah terjadi. Aneka kebijakan ditentukan secara sepihak dan rakyat dipaksa untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, meski rakyat tidak tahu manfaat, keuntungan dan hal positif yang akan diperolehnya. Sehingga tidak mengherankan apabila saat itu banyak sekali inovasi atau pun informasi pembangunan yang didesiminasi pada publik menjadi barang mubazir dan lenyap di tengah jalan. Suatu inovasi yang terdistribusi dan telah diadopsi oleh publik serta belum pernah dilakukan evaluasi dampaknya hilang begitu saja atau berhenti di tengah jalan. Eksesnya rakyatlah yang memikul beban kerugian atas kegagalan program difusi inovasi tersebut. Namun, kalau rakyat mencoba mempertanyakan secara kritis atas kegagalan adopsi inovasi yang merugikannya itu, bukan jawaban yang komprehensif dan rasional yang diterimanya, tetapi rakyat justru akan memperoleh intimidasi, ancaman dan hal-hal menakutkan lainnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa pada masa Orde Baru sistem komunikasi

yang disebutnya sebagai komunikasi pembangunan sangat menjauhkan rakyat dari semangat emansipatoris. Semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah dimanipulasi, ditutup-tutupi dan direkayasa. Departemen Penerangan sebagai pusat pelayanan informasi bagi upaya pencerdasan masyarakat keberadaannya terkooptasi pemerintah dan dimanfaatkan untuk tujuan politik semata. Departemen ini menjadi instrumentasi dalam membangun citra penguasa agar terkesan konvergen dan demokratis. Aktivitas penerangan lebih ditujukan pada penyampaian informasi dan bukannya pertukaran informasi (dalam terminologi pertukaran informasi terkandung makna adanya kesetaraan antara aparat dan rakyat). Departemen tersebut tidak melakukan fungsi pelayanan informasi secara partisipasi demokratis. Kinerja institusi pemerintah ini sarat kepentingan politik rezim yang berkuasa dan sangat bersifat monopolitik dan hegemonik.

Otoritas tunggal untuk pembuatan kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informasi ada di tangan penguasa. Fungsi media massa menjadi kabur dan tanpa makna. Tugas-tugas sosial yang seharusnya dilakukan oleh media massa (misal: fungsi interpretatif/penafsiran, fungsi investigatif, fungsi pengawasan, fungsi pembentuk opini publik) mengalami *kemandegan* dan berada pada titik nadir. Sedangkan saluran-saluran komunikasi kerakyatan terpinggirkan dan mengalami alih fungsi. Barangkali dapat dikatakan bahwa di era ini proses difusi

informasi pada publik sama sekali tidak mengedepankan prinsip netralitas dan prinsip keseimbangan. Aktivitas komunikasi informasi yang dipraktikkan seperti apa yang dikatakan Dennis McQuail lebih diarahkan pada upaya peniadaan terhadap gangguan dan mengupayakan pengamanan diri dari tekanan publik (McQuail, 1987).

Pola distribusi informasi dan komunikasi ditegakkan dengan menggunakan mesin kekuasaan agar dapat secara efektif ditaati dan didukung rakyat. Penerapan sistem informasi yang bercorak persuasif hanya sebatas semboyan tetapi praktiknya adalah penggunaan metode koersif dan kompulsif secara simultan dan sistematis. Institusi-institusi komunikasi yang ada di masyarakat (misal: Klompencapir, *Rembug deso*) diformat menjadi agen penguatan kepentingan rezim. Jadi pemerintah benar-benar melakukan praktik dominasi dan hegemoni atas hak-hak publik khususnya di bidang komunikasi informasi. Kondisi ini memunculkan kultur komunikasi yang sangat paternalistik dan mengesampingkan aspirasi politik rakyat.

Maka dalam rangka membangun paradigma baru di era reformasi, pemerintah Indonesia dan segenap unsur masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya harus melakukan rekonstruksi, reposisi dan reorientasi bidang komunikasi informasi pembangunan. Sistem komunikasi diarahkan dan diprioritaskan bagi terwujudnya masyarakat madani yang damai dan sejahtera. Pola informasi harus diselimuti roh demokratisasi dengan cara

mendekonstruksi paradigma komunikasi informasi pada masa Orde Baru yang sangat distorsif dan kompulsif. Di periode reformasi sekarang, sistem komunikasi informasi di segala bidang, selayaknya bercorak persuasif, nir kekerasan dan egaliter. Pemerintah harus lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi publik dan bukan sebaliknya, banyak berbicara, menasehati dan mencurigai dinamika dan aspirasi masyarakat (Mulyana, 2001). Oleh karena itu maka perlu dikaji lebih lanjut tentang pola, metode dan strategi yang efektif, akuntabel dan rasional sebagai upaya untuk lebih menguatkan dan memperkokoh sistem informasi yang berlangsung demi terkonsolidasikannya dinamika gerak komunikasi pembangunan di Indonesia dewasa ini.

Paradigma Komunikasi Pembangunan yang Demokratis

Dalam sistem komunikasi informasi pembangunan di era reformasi ini pola, corak dan karakter komunikasi pembangunan yang dilakukan seyogyanya memiliki nuansa demokrasi yang kuat. Pola komunikasi informasi yang mendudukan nilai-nilai demokrasi secara memadai yang ditandai dengan memposisikan fungsi dan peran masyarakat secara sinergis. Rakyat tidak lagi menjadi obyek komunikasi tetapi mereka harus menjadi subyek komunikasi yang menentukan dan mempolakan substansi informasi seperti apa yang dibutuhkan. Dalam pengambilan setiap keputusan, rakyat idealnya diajak berdialog dan berdiskusi

untuk melihat apakah kebijakan yang akan diimplementasikan itu benar, tepat, bermanfaat, dan menguntungkan rakyat. Hal ini perlu dilakukan karena masyarakatlah yang mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, kebutuhan yang harus dipenuhi serta bagaimana solusi yang hendak diimplementasi. Oleh karena itu, memposisikan rakyat sebagai mitra dialog adalah suatu hal yang tepat dan tidak terelakkan. Rakyat jangan sampai ditinggalkan atau bahkan dimarginalkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan pemenuhan hajat hidup mereka. Apabila keberadaan rakyat diabaikan maka dapat dipastikan tingkat penerimaan rakyat atas informasi inovasi yang di-sosialisasikan tidak akan optimal dan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi suatu program kerja yang tanpa makna.

Komunikasi dialogis, egaliter dan dibingkai kemaslahatan bersama antara penguasa dan rakyat merupakan dinamika komunikasi yang berlandaskan nilai demokrasi. Nilai kemanfaatan komunikasi dialogis ini sangat tinggi dan konstruktif. Dengan komunikasi dialogis yang bersifat dua arah, menyimak dan mendengar aspirasi akar rumput dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya maka inti komunikasi yang hakiki dapat tercapai, yakni terlaksananya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia secara lebih memadai (Adler, 1996). Kondisi itu akan dapat menciptakan sensitivitas penguasa dalam membaca dan

memaknai tuntutan rakyat. Tumpulnya sensitivitas penguasa dalam memahami aspirasi sosial sangat berbahaya karena hal tersebut dapat memerosotkan kredibilitas penguasa di mata publik dan ujungnya dapat memunculkan hilangnya kepercayaan sosial (*social distrust*) kepada aparaturnya.

Dalam kondisi saat ini, krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia masa kini, rakyat membutuhkan akses informasi yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberdayaan dirinya. Para *stake holders* (pemerintah, tokoh masyarakat, LSM, institusi swasta) harus bahu-membahu mengembangkan suatu sistem komunikasi yang berbasis kerakyatan, demokratis serta responsif terhadap segala persoalan sosial yang ada beserta dengan solusi penyelesaiannya. Sistem-sistem komunikasi informasi pembangunan itu harus mampu mengembalikan rasa percaya diri masyarakat yang hilang akibat krisis yang masih membelitnya hingga kini. Instrumen komunikasi informasi tersebut hendaknya selaras dengan semangat keadilan, kejujuran demokratis dan memotivasi adanya partisipasi dari publik.

Untuk itulah, maka sistem komunikasi informasi yang demokratis adalah tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Sistem komunikasi informasi pembangunan merupakan suatu proses difusi, diseminasi, dan distribusi inovasi kepada publik. Informasi yang disosialisasikan serta disebarluaskan pada publik bermuatan hal-hal/ide/gagasan yang konstruktif, kreatif dan produktif bagi upaya mema-

jukan dan mensejahterakan rakyat. Jadi dengan mengadopsi dan mempraktikkan informasi yang disosialisasikan tersebut diharapkan publik mampu melepaskan diri dari problema yang dihadapi dan ujungnya masyarakat dapat produktif di dalam melaksanakan aktivitas hidupnya. Pesan yang disosialisasikan pada proses komunikasi informasi pembangunan, idealnya dapat memberikan informasi, inspirasi dan motivasi pada target sasarannya. Informatif artinya informasi itu merupakan sesuatu yang baru, mudah dipahami, bernilai dan terjangkau untuk dipraktikkan. Inspiratif maknanya, informasi tersebut dapat memberikan sesuatu yang membangkitkan daya kreatif bagi masyarakat untuk berusaha dalam mensejahterakan dirinya. Sedangkan motivatif maksudnya informasi tersebut dapat mendorong dan membangkitkan semangat pada target audiens dalam berkarya bagi upaya peningkatan kapasitas dan kualitas hidupnya.

Untuk itu, maka operasionalisasi sistem komunikasi dan informasi pembangunan yang demokratis harus mengacu pada model komunikasi partisipatif, emansipatoris dan egaliter. Saluran komunikasi model satu arah yang dijalankan semasa era Orde Baru hendaknya diubah menjadi model komunikasi dua arah bahkan banyak arah. Komunikator yang hanya berorientasi pada propaganda (untuk membangun citra bahwa penguasalah yang selalu benar) dan bersifat sloganistik harus diganti dengan komunikasi yang berorientasi pelayanan serta mensosialisasikan inovasi tanpa memaksa

apalagi mengancam rakyat untuk mengadopsi. Di samping itu, konsep pembinaan hendaknya diganti menjadi konsep pemberdayaan, sebab dalam terminologi pembinaan terkandung makna yang bersifat paternalis dan selalu menempatkan penguasa dalam posisi yang benar. Sedangkan, dalam konsep pemberdayaan terkandung makna adanya kesetaraan antara penguasa dan anggota komunitas, sehingga memungkinkan warga untuk ikut terlibat secara intens dalam upaya penentuan arah perjalanan suatu komunitas

Nuansa komunikasi informasi yang diselimuti iklim demokrasi merupakan sistem komunikasi yang menjauhkan publik dari upaya pembatasan dan pengekangan terhadap akses informasi yang dibutuhkannya. Penguasa harus bertindak bijak dengan memberikan fasilitas dan peluang pada publik dalam memperoleh semua informasi yang memberikan kontribusi secara signifikan bagi kemapanan dirinya. Dengan cara ini maka publik akan memperoleh ruang gerak bagi upaya mengekspresikan aspirasi, artikulasi kepentingan dan mengorganisir diri untuk merealisasikan harapan-harapannya. Jadi dapat dikatakan bahwa atmosfer komunikasi informasi pembangunan yang demokratis dapat terwujud secara nyata apabila informasi yang didesiminasikan oleh pemerintah atau penguasa bersifat transparan dan jauh dari rekayasa. Sistem komunikasi informasi pembangunan harus dapat menciptakan pola komunikasi yang konvergen. Muaranya, pada proses ko-

munikasi tersebut terjadi suatu aktivitas transaksional (pertukaran) informasi. Dalam istilah, transaksi informasi memiliki makna adanya kesetaraan antara aparat dan rakyat sehingga interaksi komunikasi yang terjalin berjalan secara kolaboratif dan sinergis.

Untuk terciptanya suatu sistem komunikasi informasi pembangunan yang demokratis dan kokoh juga dibutuhkan prasyarat lainnya yaitu adanya dukungan media massa yang memiliki kredibilitas tinggi. Media massa selaku institusi penyedia informasi bagi rakyat dituntut dapat menyajikan pesan yang sehat dan bermakna. Informasi yang didifusikan oleh media pada publik hendaknya akuntabel, obyektif, dan rasional. Keberadaan media massa sebagai pendukung terwujudnya satu sistem komunikasi informasi pembangunan yang demokratis dapat dilakukan dengan melaksanakan peran sosialnya sebagai instrumen pemersatu pluralisme berbagai kelompok masyarakat secara independen dan obyektif. Media dituntut menjadi instrumen mediator yang mengantarai kepentingan pemerintah dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Pada sisi lain, media diharapkan perannya sebagai instrumen resolusi konflik ketika terjadi ketegangan antar kelompok masyarakat.

Selain itu, keberadaan media massa dapat pula dijadikan suatu parameter ada tidaknya sistem komunikasi informasi yang demokratis di suatu negara. Apabila eksistensi institusi ini dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya secara efektif dan optimal maka bisa diharapkan bahwa

sistem komunikasi informasi di negara itu berlangsung secara demokratis. Peran sosial dari media yang dimaksudkan adalah pelaksanaan fungsi kontrol sosial yang dilakukannya. Peran kontrol sosial dapat dilihat apakah media bisa secara leluasa dan tanpa restriksi melakukan pembentukan opini, fungsi investigasi, fungsi pengawasan, penafsiran, dan pengungkapan suatu kasus yang terjadi di masyarakat secara komprehensif dan obyektif. Manakala fungsi-fungsi tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya maka pelaksanaan komunikasi informasi di negara itu telah berlaku sesuai dengan koridor sistem komunikasi demokratis yang diinginkan. Fungsi-fungsi tersebut penting untuk terealisasi secara maksimal karena hadirnya media dalam suatu sistem sosial merupakan motivator bagi optimalisasi dinamika gerak masyarakat di segala bidang. Berjalannya fungsi sosial media akan memberikan dampak positif untuk munculnya kesadaran masyarakat agar selalu kritis dan tanggap atas berbagai persoalan yang ada serta menjadi pemicu masyarakat agar secara kreatif mencari dan menciptakan formulasi solusi yang paling efektif, rasional dan akuntabel (Lyle, 1990).

Dengan demikian, maka dalam paradigma komunikasi informasi pembangunan di era reformasi ini perlu dilakukannya reorientasi arah dan tujuan aktivitas itu. Reorientasi dibutuhkan agar dinamika komunikasi informasi yang berlangsung tidak tersentralisasikan, linier dan dengan proses yang terisolir. Harapannya supaya aktivitas komu-

nikasi informasi pembangunan dapat lebih merefleksikan difusi partisipasi dan meminimalkan adanya ketergantungan yang tinggi masyarakat pada negara (Weiner, 1996). Reorientasi yang dilaksanakan meliputi perubahan pada proses, media maupun substansi pesan yang dicakup dalam proses komunikasi itu. Paradigma lama komunikasi informasi pembangunan memberikan bentuk pengawasan secara vertikal (*top down*), bersifat satu arah, orientasi propaganda, substansi pembangunan disosialisasikan palsu dan manipulatif, sangat berorientasi teknis dan ekonomis, bias kepentingan negara dan penuh dengan sensor dan pembatasan. Agar tercipta iklim yang demokratis maka komunikasi informasi pembangunan saat ini diupayakan supaya operasionalisasi pengawasan dilakukan secara horizontal (menyamping dan dari bawah ke atas), mengandalkan pada pelayanan serta bukan doktrin dan perintah, komunikasi bersifat dua arah bahkan banyak arah, berorientasi partisipasi dengan mengedepankan kebutuhan dan hak warga negara, mengakomodasi kepentingan semua etnis dan golongan, menggali potensi lokal dengan memacu dan memicu kreativitas serta artistik kulturalnya, selalu mengkaji secara kritis dan dialogis setiap persoalan yang ada untuk bersama-sama mencari alternatif solusinya dan semuanya dilakukan melalui proses yang terencana, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Reorientasi yang dilakukan tersebut merupakan paradigma komunikasi informasi yang dilalui prinsip demokratisasi

dalam konteks komunikasi pembangunan. Dengan cara itulah maka proses komunikasi pembangunan akan mampu menjadi pola komunikasi yang bersifat paradigmatik, yakni merupakan pola komunikasi yang membangkitkan inovasi bagi satu sistem sosial. Pola komunikasi yang terbentuk dapat diharapkan menciptakan sosok masyarakat yang menilai tinggi orientasi ke masa depan, lebih kuat hasrat eksplorasinya di dalam rangka memperbesar kapasitas inovasinya, lebih optimal dalam orientasi ke arah motivasi, prestasi dan hasil kerja. Serta dapat membentuk mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya pada diri sendiri, disiplin dan berani bertanggung jawab.

Mengokohkan Paradigma Komunikasi yang Demokratis

Gerakan reformasi di Indonesia yang ditandai semangat demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi telah menimbulkan berbagai dampak, termasuk di bidang komunikasi informasi pembangunan. Institusi komunikasi dituntut untuk melakukan restrukturisasi dan re-fungsional dalam hal posisi dan perannya di masyarakat. Supaya dapat memenuhi target reformasi maka lembaga komunikasi informasi khususnya dalam konteks difusi informasi pembangunan diharuskan lebih bersifat transparan, kooperatif, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Untuk itu, maka institusi komunikasi informasi diharapkan menata kembali visi dan misi yang selama era Orde Baru jadi acuan gerak

operasionalisasinya. Visi dan misi yang baru diharapkan relevan dengan gerak perubahan yang terjadi. Implikasi yang diangankan adalah terciptanya iklim komunikasi informasi yang demokratis, solid, dan teraktualisasi secara konsisten dalam proses difusi inovasi.

Lembaga komunikasi informasi yang ada sekarang idealnya lebih berperan dalam memperkuat kualitas hidup masyarakat dan bukan untuk kepentingan politik penguasa. Lembaga komunikasi difokuskan pada upaya pemihakkan bagi rakyat serta menyuarkan kepentingannya. Dengan penciptaan dan perubahan orientasi, fokus oprasionalisasinya serta strategi pencapaiannya maka hal ini merupakan jawaban terhadap tuntutan reformasi. Reposisi dan refungsional lembaga komunikasi informasi dapat mengubah citra institusi di mata publik. Agar citra yang terbentuk lebih *solid* dan mengakar di masyarakat maka lembaga komunikasi informasi diwajibkan memiliki komitmen dan konsistensi di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.

Dalam rangka memperteguh nilai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang bersifat plural di berbagai aspek, maka institusi komunikasi memiliki beban tanggung jawab yang besar. Lembaga komunikasi informasi dituntut untuk bisa “merajut” ikatan tali kebhinekaan masyarakat agar selalu setia dan taat pada nilai kebersamaan, keberagaman dan tenggang rasa sosial. Untuk memenuhi tanggung jawabnya itu maka institusi komunikasi harus bisa mendistribusikan

informasi serta menanamkan kesadaran pada publik bahwasannya tegaknya nilai-nilai kebangsaan di Indonesia bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah namun merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk seluruh komponen warga masyarakat. Dengan demikian maka lembaga komunikasi informasi harus melakukan upaya-upaya yang sifatnya peneguhan akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan, pluralisme, dan semangat tenggang rasa antar budaya.

Fungsi dan peran institusi komunikasi informasi hanya akan dapat berjalan seperti apa yang diharapkan apabila kinerja lembaga itu dikelola secara profesional dalam bingkai nilai demokrasi yang nyata dan tidak sekadar semboyan kosong. Oleh karenanya, maka dibutuhkan strategi bagi terwujudnya sosok lembaga komunikasi yang independen dan memiliki komitmen pada pemberdayaan masyarakat. Strategi terwujudnya sosok lembaga komunikasi pembangunan yang berorientasi kerakyatan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengubah paradigma sistem informasi pembangunan dari yang semula *information transmission* atau hanya sekadar penyampai informasi menjadi *information exchange* atau berorientasi pada pertukaran informasi yang kesemuanya diarahkan pada pola komunikasi yang bersifat paradigmatis.

Dalam operasionalisasi komunikasi yang berorientasi *information exchange* secara substansial di dalamnya terdapat

pendekatan partisipatori demokratis. Pendekatan tersebut mempolakan bentuk komunikasi antara penguasa dengan rakyat yang tidak bersifat vertikal, sentralistik dan satu arah tetapi lebih bersifat konvergensi (memutar). Pola komunikasi yang konvergen lebih memberi peran dan fungsi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam penentuan isi maupun formula komunikasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Pada kondisi ini pemerintah sebaiknya bergeser fungsi dan perannya dalam gerak arus komunikasi pembangunan yang dikelolanya. Penguasa bukan lagi sebagai pemilik otoritas tunggal pembuatan kebijakan nasional di bidang komunikasi informasi. Dalam konteks komunikasi yang bersifat “berputar” pemerintah melaksanakan perannya sebagai institusi yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi rakyat (Hamijoyo, 2000).

Dengan bergesernya posisi, peran dan fungsi pemerintah yang mengelola bidang komunikasi informasi pembangunan dimaksudkan supaya dinamika gerak difusi informasi pembangunan oleh pemerintah semata-mata ditujukan pada upaya mentransformasikan masyarakat dari kondisi dan situasi yang penuh ketidakpastian akibat *belitan* krisis multi dimensi ke arah satu iklim yang kondusif dan produktif. Proses komunikasi pembangunan yang disosialisasikan juga ditujukan untuk terjadinya transformasi yang konstruktif baik pada target individual maupun sistem sosial. Transformasi pada target individual dimaksudkan untuk memberikan penyadaran, me-

motivasi dan mengembangkan potensi dan kemampuan tiap individu anggota masyarakat agar mau dan mampu membangun dirinya sendiri, produktif, mandiri serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Transformasi pada target sistem sosial ditujukan untuk terjadinya proses penyadaran dan penumbuhan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam dinamika pembangunan.

Isu yang disosialisasikan pada target sasaran baik yang bersifat individu maupun sistem sosial seyogyanya berangkat dari hasil kajian yang mendalam dan akuntabel tentang program pembangunan yang dilaksanakan. Substansi pesan yang didistribusikan pada publik berkaitan dengan relevansi suatu kegiatan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, penyelewengan atau ketidaksesuaian antara rencana dengan implementasi serta perbedaan dampak yang dihasilkan suatu kegiatan pembangunan antara kenyataan dan harapan dari masyarakat. Di samping itu dalam komunikasi pembangunan yang demokratis isu yang dikemas adalah berkaitan dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Rencana pembangunan harus disosialisasikan pada publik sejak dini karena hal itu dapat membantu menumbuhkan sikap masyarakat ikut berpartisipasi atau mendukung aktivitas pembangunan tersebut. Dengan cara ini akan tercipta pula suatu iklim yang menerima (*receptive climate*) adanya aktivitas pembangunan di lokasi tersebut (Rahmi Atie, 2000).

Informasi yang disosialisasikan dalam aktivitas komunikasi pembangunan yang

demokratis harus diprioritaskan bagi terbentuknya penguatan masyarakat sipil. Untuk itu maka peran serta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak daripada kewajiban. Kontrol rakyat terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan adalah hak masyarakat sebagai pemegang kata akhir dan mengontrol apa saja yang masuk dalam agenda dan urutan prioritas. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat diterima jika satu golongan mendikte keinginan dan kepentingannya dalam isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan, apakah golongan di dalam negeri seperti pemerintah atau kekuatan eksternal yang berupa “kekuatan besar” (Hikam, 1993).

Model komunikasi pembangunan yang demokratis harus lebih meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitasnya. Apabila peran serta masyarakat meningkat efektivitasnya, maka sebenarnya upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi sosial. Upaya ini membutuhkan kerja sama sinergis dari berbagai kekuatan pembangunan yang ada (Karsidi, 2001).

Untuk mewujudkan masyarakat yang berswadaya dan mandiri maka institusi komunikasi dan informasi harus menjalankan beberapa upaya yang

diarahkan pada munculnya kreativitas dan inisiatif pada target sasarannya. Adapun upaya-upaya itu adalah:

Pertama, belajar dari masyarakat. Prinsip yang paling mendasar mengemukakan komunikasi dan informasi pembangunan sebagai proses yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat. Proses itu harus dimulai dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti dibangun dari pengalaman, kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

Kedua, komunikator dalam komunikasi pembangunan yang demokratis harus memerankan diri sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelakunya. Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya komunikator menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku apalagi guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat tersebut. Bahkan dalam penerapannya, masyarakat hendaknya dibiarkan mendominasi kegiatan. Walaupun pada awalnya peran komunikator pembangunan lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat sendiri.

Ketiga, saling belajar, saling berbagi pengalaman. Salah satu prinsip dasar dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman

dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan obyektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal, perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal, kearifan lokal tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun, sebaliknya telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal malah menciptakan masalah yang lebih besar dan lebih parah. Untuk itu, harus dilihat bahwa pengalaman dari pengetahuan masyarakat dan kerangka pengalaman komunikator pembangunan harus saling melengkapi serta memiliki kesederajatan dalam hal nilai manfaatnya (Karsidi, 2001).

Agar prinsip-prinsip di atas dapat terimplementasi seperti apa yang diharapkan, maka program aksi komunikasi pembangunan harus dimulai dari pengenalan masalah/kebutuhan, potensi lokal dan penyadarannya. Pada tahap awal ini digali informasi-informasi yang mengungkapkan keberadaan lingkungan dan masyarakatnya serta potensi lokal yang dimilikinya. Dari sini kemudian dilakukan analisa dan refleksi atas persoalan, problem dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat itu. Dari hasil analisa refleksi atas persoalan dan kebutuhan maka kemudian dirumuskan masalah supaya kinerja komunikasi pembangunan lebih

fokus. Dari hasil rumusan masalah ini pula akan dapat ditentukan skala prioritas penyelesaian masalah atau pemenuhan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Dari skala prioritas itu kemudian diinventarisasi alternatif-alternatif dalam memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Dalam inventarisasi alternatif pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan harus dilakukan dengan cara *brain storming*. Rakyat dilibatkan secara aktif agar mereka menyumbangkan ide-ide yang kreatif, relevan dan rasional atas persoalan dan kebutuhan yang hendak direalisasikan itu.

Dari hasil inventarisasi masalah kemudian ditetapkan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. Kata tepat dimaknai bahwasannya cara itu tepat guna, rakyat mampu untuk melaksanakan dan menerapkan solusi terpilih itu, tidak ada kendala dalam implementasi solusi, baik kendala sumber daya, sumber dana dan kawasan lingkungan ketika solusi tersebut diterapkan. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dan diperhitungkan yakni pada pelaksanaan alternatif solusi terpilih sehingga rakyat mampu mempraktikannya secara swadaya tidak selalu tergantung pada pemerintah atau pihak-pihak lain yang terkait meskipun di awal pelaksanaan solusi harus tetap didampingi dan diarahkan.

Setelah solusi alternatif dicanangkan maka langkah berikutnya adalah perencanaan tahapan kegiatan yang sistematis dan konkret. Dalam rencana kegiatan ini perlu dipaparkan secara jelas apa yang akan dilakukan, siapa yang

akan melakukan, siapa yang bertanggung jawab atas kelancaran dan keseriusan dalam pelaksanaan dan kapan waktu pelaksanaannya. Makin konkret dan jelas rencana yang dihasilkan maka makin besar kemungkinan bahwa rencana program aksi tersebut akan dilaksanakan secara serius, kontinyu dan tanpa beban. Guna mendapatkan kesempurnaan perencanaan tata kerja maka hasil perencanaan itu juga harus dilakukan diskusi antara pihak fasilitator (komunikator) dan masyarakat sebagai inisiatornya. Kemudian rencana itu dilaksanakan dalam bentuk implementasi kegiatan. Untuk menjamin keberhasilan dari program aksi, maka selama proses kegiatan berlangsung harus dilakukan pemantauan baik oleh pihak komunikator maupun pihak masyarakat sebagai sasaran dari program aksi itu. Pemantauan dilakukan untuk melihat apakah ada kesesuaian atau ada penyimpangan atas pelaksanaan dari rancang bangun kegiatan yang ada. Manakala terjadi penyimpangan maka dapat segera diluruskan dan diarahkan agar tetap konsisten dengan rencana kegiatan yang ada. Akhir dari kegiatan dilakukan evaluasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan baik menyangkut evaluasi dampak maupun evaluasi proses. Dari hasil evaluasi akan dapat diketahui apa kekurangan, kelemahan, dan kelebihan dari pelaksanaan kegiatan. Dari kekurangan dan keburukan yang diterima dapat dijadikan acuan agar dalam pelaksanaan kegiatan lebih lanjut hal itu bisa lebih disempurnakan, sehingga *output* yang terjadi dapat me-

muaskan, khususnya bagi rakyat sebagai inisiator sekaligus target dari program aksi itu

Simpulan

Paradigma komunikasi pembangunan di Indonesia harus dilakukan proses reposisi, reorientasi, dan refungsional. Hal ini sejalan dengan proses reformasi di segala bidang yang sedang berjalan. Paradigma komunikasi pembangunan harus lebih demokratis dan berpihak pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Agar aktivitas komunikasi pembangunan dapat lebih demokratis maka aktivitas tersebut selayaknya memposisikan rakyat sebagai mitra dialog. Untuk itu rakyat bukan hanya sekadar diposisikan sebagai obyek pasif yang termarginalkan dalam pembuatan keputusan bagi upaya peningkatan kapasitas dan kualitas hidupnya, tetapi rakyat harus diberi peran yang setara dan bersifat sinergis.

Dengan demikian, komunikasi pembangunan dapat dibingkai atmosfer yang demokratis maka dalam setiap aksi-aksinya harus merubah fokus operasionalisasinya. Fokus operasionalisasi komunikasi pembangunan yang demokratis adalah "*information exchange*" dan bukan "*information transmission*" yang diwarnai iklim komunikasi dialogis, transparan, konvergen dan egaliter.

Manakala hal itu tercipta maka dapat diharapkan rakyat akan lebih kreatif, inovatif dan mandiri. Sehingga harapan dan cita-cita bagi terbentuknya masyarakat yang berdaya dalam segala bidang

dapat tercapai. Meskipun untuk merealisasikan hal itu perlu proses dan jangka waktu serta tidak dapat dilakukan secara instan.

Daftar Pustaka

- Adler, Ronald B. 1996. *Communication at Work*. New York: McGraw Hill.
- Hikam, Muhammad A. S. 1993. Demokrasi Melalui Civil Society, Sebuah Tatapan Reflektif atas Indonesia. *Prisma* No. 6. Jakarta: LP3ES.
- Lyle, Jack. 2000. *Communication and Development*. New York: John Levey and Son.
- Johannesen, Richard L. 1994. *Ethics in Human Communication*. Prospect Heights, Ill. Boston: Waveland Press.
- Karsidi, Ravik. 2001. Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediator*. Vol. 2. No. 1. Bandung: UNISBA.
- McQuaill, Dennis. 1987. *Teori Komunikasi Massa* (terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mulyana, Dedi. 2001. Merancang Peran Baru Humas Dalam Pengembangan Otonomi Daerah. *Jurnal Mediator*. Vol. 2. No. 1. Bandung: UNSIBA.
- Rahmatie, Atie. 2000. Sistem Informasi dan Komunikasi di Indonesia. *Jurnal Mediator*. Vol.1. No.1. Bandung: UNSIBA.
- Weiner, Myron. 2001. *The Dynamics of Growth*. Cambrigde: Forum Lectures.

Peran Perempuan dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Rongkop Gunungkidul

Leslie Retno Angeningsih/Suindarti
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD"
Jl. Timoho 317 Yogyakarta, 55225 Telp.0274 561971
Email: leslie.angeningsih@yahoo.com

Abstract

This study tries to find out factors causing the low level of women's role in development planning meetings (Musrenbang) and efforts which have been done to enhance women's participation in those forums. This research is conducted in Rongkop district, Gunungkidul regency, Yogyakarta province. The method used is descriptive qualitative. The data are collected using documentation, observation, and in-depth interview. The data analysis employs an inductive interpretative method. The findings of this study indicate that women's role in the committee is relatively high, but is low in the decision making process. These result from internal and external factors. The internal factors are women's lack of courage, self-esteem, and resources. The external factors are women's low level of attendance, and insufficient representation in Musrenbang and regulations and culture in which there is no equity between men and women. The efforts to enhance women's role in Musrenbang are by reviewing government policies and the commitment of stakeholders on women's representation in development planning, revitalizing women activists, and increasing women's self-reliance, mental and spiritual endurance, quality, confidence, and courage in using all accesses to improve women's status.

Keywords: *development planning meeting, women participation*

Abstrak

Penelitian ini berusaha mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya peran perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan metode induktif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kepanitiaan sudah cukup tinggi, namun dalam proses pengambilan keputusan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa rendahnya tingkat keberanian, tingkat kepercayaan diri, dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki perempuan. Faktor eksternal adalah rendahnya tingkat kehadiran, belum representatifnya perempuan yang hadir dalam musrenbang, adanya regulasi dan budaya yang kurang berpihak pada kaum perempuan. Upaya-upaya untuk peningkatan peran perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan adalah melalui peninjauan ulang kebijakan pemerintah serta komitmen para pemangku kepentingan mengenai keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan, revitalisasi aktivis perempuan dan peningkatan kemandirian perempuan, ketahanan mental dan spiritual, peningkatan kualitas perempuan, meningkatkan rasa percaya diri dan kebe-

ranian perempuan dalam memanfaatkan segala peluang untuk peningkatan kedudukan perempuan.

Kata-kata Kunci: musyawarah perencanaan pembangunan, partisipasi perempuan.

Pendahuluan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan sistem perencanaan pembangunan yang sangat penting dan dilakukan setiap tahun secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien. Dalam forum Musrenbang kecamatan, para peserta membahas daftar usulan pembangunan di wilayah kecamatan untuk kemudian dibahas pada Musrenbang tingkat kabupaten yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya (*Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang*, 2009).

Perempuan seyogyanya ikut berpartisipasi dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan pembuatan keputusan (Hutchinson, 2003). Meskipun banyak penelitian tentang demokrasi tapi sedikit pakar yang meneliti pemberdayaan perempuan dan keterwakilannya dalam legislatif (Lindberg, 2004). Sangat sedikit dijumpai penelitian empiris yang mengungkapkan hubungan antara demokrasi dan kesetaraan jender (Sekhon, 2006). Padahal demokrasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (Gerrington, dkk. 2005), perdamaian dunia (Russett,

1993), hak-hak asasi manusia (Mitchell dan McCormick, 1988), dan pembangunan manusia (Przeworski, 2000). Sekhon (2006) menemukan di India misalnya, telah dilakukan upaya untuk mendorong partisipasi efektif perempuan dalam arena politik. Kesempatan luas diberikan kepada perempuan dengan menyediakan 33 persen kursi di pemerintahan desa. Namun demikian, itu dirasa tidak cukup, karena perempuan ternyata dibatasi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik, seperti adanya harapan tradisional pada peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, kasta dan ketidaksetaraan kelas, kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang hukum atau undang-undang.

Beberapa penelitian terhadap usulan pembangunan di Indonesia, mayoritas berasal dari laki-laki dan sangat sedikit berasal dari perempuan. Penelitian Agus Wiyono (2005) di Kecamatan Lawean, Surakarta menunjukkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang kelurahan masih rendah. Tingkat keterlibatan perempuan dalam kepanitiaan dan kehadiran relatif kecil. Penelitian di Desa Akelamo menunjukkan adanya keterlibatan perempuan. Dari 96 peserta Musrenbang 43 diantaranya 44,79

persen. Perempuan telah memperoleh kesempatan menyumbangkan pemikiran atau gagasan pembangunan, namun karena jumlahnya yang masih tidak sebanding dengan laki-laki, maka perencanaan pembangunan yang dihasilkan kurang responsif gender. Di Makasar para aktivis gender menuntut diadakannya Musrenbang khusus perempuan, karena keterwakilan perempuan dalam penentuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan alokasi anggaran masih dianggap kurang. Padahal kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mayoritas berasal dari perempuan (Pananrang, 2008). Di Aceh, data menunjukkan bahwa pada setiap tingkatan Musrenbang jumlah peserta perempuan rata-rata di bawah 27 persen, bahkan di tingkat desa rata-rata hanya 5 persen. Dan yang paling memprihatinkan beberapa peserta belum mengetahui apa dan mengapa Musrenbang itu dilaksanakan, dan apa peran, tugas, dan tanggung jawab perempuan di dalam Musrenbang (*Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah*, 2010). Rendahnya peserta perempuan ditemui pula pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Rongkop pada tanggal 26 Februari 2009. Dari 94 total peserta, 69 laki-laki dan hanya 26 perempuan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, penelitian ini berusaha mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mengapa peran perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang masih rendah? Selanjutnya, bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan peran perempuan pada pelaksanaan

Musrenbang? Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dan upaya pemberdayaan melalui forum Musrenbang.

Selama ini perumus atau pembuat kebijakan umumnya adalah kaum laki-laki, karena itu dampak kebijakan cenderung lebih menguntungkan pihak laki-laki. Proses tersebut terbentuk karena pola pikir patriarki. Menurut Patricia dan Hill, perempuan memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan, dan peluang untuk mengaktualisasikan diri lebih sedikit dibandingkan laki-laki (Ritzer, 2004).

Kesetaraan gender bukan berarti perempuan menjadi sama dengan laki-laki (Sadli, 2000). Gerring, dkk. (2005) menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah konsep yang kompleks dan berdimensi ganda dan sepertinya variabel yang berbeda mendorong pada dimensi yang berbeda pula. Menurut Seguino (2007), kesetaraan gender diukur melalui tiga hal, yaitu: kemampuan, kesempatan dan pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan adalah prasyarat untuk mencapai kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang memberi rasa aman (Sadli, 2000). Untuk itu perlu adanya transformasi sosial dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, kualitas dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan Nasional (*Inpres No: 9 Tahun 2000*).

Demokratisasi merupakan alternatif dari proses transformasi sosial. Demokratisasi merupakan cara dan proses yang memberi peluang dan wewenang kepada masyarakat untuk menentukan dan mengelola hidupnya sendiri melalui dialog, diskusi, aksi yang bertumpu di atas persamaan dan keadilan. Perempuan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi pada lembaga pemerintahan dan pembuatan keputusan (Hutchinson, 2003). Artinya, peran perempuan dalam pembangunan harus ada pada seluruh proses pembangunan sejak dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah langkah-langkah melakukan reinterpretasi obyektif tentang fenomena-fenomena yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti (Moleong, 2000).

Unit analisis adalah pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Rongkop pada tanggal 26 Februari 2009. Jumlah peserta Musrenbang 95 orang dan jumlah sampel sebanyak 20 orang terdiri dari unsur pejabat tingkat Kecamatan Rongkop 3 orang, pelaksana Musrenbang Kecamatan 3 orang, wakil peserta laki-laki 7 orang dan perempuan sebanyak 7 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induktif interpretatif yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap fakta atau data empiris yang telah terkumpul berdasarkan logika teoritis (Surachmad, 1982).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kecamatan Rongkop merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 8.385,7 Ha. Topografi wilayah merupakan kawasan perbukitan. Sebagian besar tanah berupa tegalan seluas 3.222,6 Ha dan pekarangan seluas 585.0370 Ha. Jumlah penduduk sebanyak 32.429 orang terdiri dari 16.076 laki-laki dan 16.353 perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 7.693 KK meliputi 6.820 KK laki-laki dan 873 KK perempuan. Sex ratio 97,8, artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk 388 jiwa/km². Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian. Tingkat pendidikan berdasarkan angka partisipasi sekolah penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas adalah 1.876 siswa, sedangkan laki-laki sebanyak 1.901 siswa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2008). Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih lebih rendah partisipasinya dalam menempuh pendidikan formal dibandingkan laki-laki.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka untuk mewujudkan perencanaan yang partisipatif, di Kecamatan Rongkop setiap tahun dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan kecamatan melalui forum Musrenbang. Koordinasi perencanaan pembangunan diselenggarakan melalui 3 tahapan. Tahap awal dilakukan penggalan gagasan masyarakat di 100 pedukuhan. Hasil musyawarah pembangunan di tingkat pedukuhan selanjutnya dituangkan dalam daftar hasil penggalan gagasan masyarakat. Hasil penggalan gagasan dilaporkan ke tingkat desa untuk direkap. Daftar rekapitulasi dijadikan bahan pembahasan pada Musrenbang di tingkat desa. Hasil Musrenbang desa dilaporkan ke kecamatan untuk selanjutnya direkap dan menjadi materi pembahasan pada forum Musrenbang di tingkat kecamatan.

Peran perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Rongkop Tahun 2009 dapat diketahui dari hasil analisis tahap persiapan, pelaksanaan, keluaran dan keterlibatan perempuan dalam Musrenbang. Kegiatan pra Musrenbang Kecamatan Rongkop dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2009 menyangkut persiapan teknis, administratif maupun substantif untuk kelancaran pelaksanaan Musrenbang. Dalam tahap persiapan ini ditunjuk 2 orang fasilitator yang berasal dari unsur aparat kecamatan dan wakil masyarakat. Penunjukan

berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah seluruh peserta pra Musrenbang dituturkan oleh Bapak Kardiyo, SIP:

"Sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terlebih dahulu dilakukan kegiatan persiapan yaitu pra Musrenbang Kecamatan. Pada pelaksanaan pra Musrenbang telah ditunjuk dua orang fasilitator yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dari Desa Karangwuni. Penunjukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah yang dilakukan saat pra Musrenbang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan Musrenbang".

Karena penunjukan dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penunjukan fasilitator tidak menghadapi masalah. Dalam tahap persiapan telah melibatkan perempuan. Hal ini dituturkan oleh ibu Purwatiningsih dari Desa Pucanganom:

"Saya senang sekali karena salah satu fasilitator yang ditunjuk adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Rongkop. Kebetulan beliau kan seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap persiapan Musrenbang kecamatan sudah nampak adanya keterwakilan perempuan. Saya sangat bersyukur perempuan diberikan ruang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk duduk dikepanitiaan."

Pada tahap persiapan kegiatan Musrenbang kecamatan menunjukkan adanya keadilan jender. Perempuan

diberi ruang untuk mengambil peran yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Makna-makna yang mendefinisikan perempuan sebagai makhluk feminim, lemah, serta tidak pantas untuk memimpin tidak lagi ditemui. Penunjukan kedua fasilitator perempuan dinilai sangat positif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Endang Sumpeni dari Desa Melikan:

"Penunjukan kedua fasilitator tersebut menurut saya sangat tepat, karena kedua-duanya merupakan orang yang punya peran yang sangat strategis di Kecamatan Rongkop dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi."

Kedua fasilitator mempunyai suatu keteladanan yang tinggi karena didukung dengan kecerdasan dan keberanian mereka. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Tuyono dari Desa Pucanganom sebagai berikut:

"Kedua fasilitator pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Rongkop mempunyai kecerdasan dan keberanian yang cukup tinggi, karena mampu memimpin dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang dengan baik, saya merasa salut melihat kecerdasannya dalam mensikapi permasalahan yang muncul dengan penuh keberanian menawarkan alternatif untuk pemecahannya."

Pernyataan serupa disampaikan oleh ibu Suwari dari Desa Petir sebagai berikut:

"Fasilitatornya sangat menguasai betul materi yang dibahas, sehingga ketika muncul permasalahan, dengan cerdas memberikan alternatif untuk pemecahan masalah."

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Rongkop pada tanggal 26 Pebruari 2009 berlangsung secara sistematis. Hal ini dituturkan oleh Bapak Muh Riyanto dari Desa Melikan:

"Musrenbang di Kecamatan Rongkop telah dilakukan secara runtut, dari presentasi prioritas masalah yang ada di Kecamatan Rongkop, prioritas kebutuhan dari masing-masing desa, sampai dengan penetapan wakil kecamatan yang akan mengawal programnya ke forum Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun pada forum Musrenbang Kabupaten. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun pada pelaksanaan diskusi kelompok belum semua peserta bisa ikut aktif dalam menyampaikan pendapatnya, terutama ibu-ibu."

Ibu Heri Supriyatun atau Atun dari Desa Semugih menambahkan bahwa:

"Menurut pendapat saya pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Rongkop tahun 2009 yang lalu betul-betul bisa dilakukan secara sistimatis, hanya sayangnya ibu-ibu masih kelihatan belum partisipatif, banyak ibu-ibu yang memilih untuk berdiam diri."

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang sudah sistimatis sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun, jika dicermati lebih lanjut, pelaksanaan diskusi kelompok yang membahas prioritas usulan masing-masing bidang belum melibatkan partisipasi aktif perempuan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Sukiyo dari Desa Melikan sebagai berikut:

"Peran serta perempuan dalam diskusi kelompok belum nampak lo bu, perempuan yang ada di kelompok saya, lebih banyak diam, sehingga kelihatan kurang demokratis dalam diskusi yang dilaksanakan."

Pernyataan tersebut dibenarkan juga oleh ibu Ngatini dari Desa Botodayaan.

"Memang benar, peserta Musrenbang perempuan pada pelaksanaan diskusi kelompok lebih banyak yang memilih diam, karena materi diskusinya yang tidak menarik sebagian besar bersifat usulan fisik dan belum sepenuhnya mencerminkan adanya usulan yang berpihak pada perempuan."

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa peran perempuan dalam diskusi kelompok masih rendah. Rendahnya peran perempuan disebabkan karena materi yang dibahas kurang menarik. Sebagian besar usulan berupa usulan fisik yang dianggap belum bersifat responsif gender. Dari 219 usulan yang diajukan dari Desa Botodayaan, Bohol, Pringombo. Melikan, Karangwuni, Semugih, Petir maupun dari Desa Pucanganom, ternyata hanya 20 usulan yang mengakomodir kebutuhan perempuan.

Faktor lain rendahnya peran perempuan adalah keterwakilan perempuan kurang representatif. Jumlah peserta perempuan yang hadir hanya 26 orang sedang laki-laki sebanyak 69 orang. Rendahnya tingkat kehadiran perempuan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri serta keberanian perempuan dalam menyampaikan aspirasi dan

pendapatnya pada forum musrenbang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. Sabarisman. M.si:

"Dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Rongkop, masih ditemui adanya sikap perempuan yang kurang partisipatif. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya keberanian serta kepercayaan diri dari peserta Musrenbang itu sendiri."

Ibu Asih Suprpti dari Desa Pringombo membenarkan pendapat tersebut:

"Biasanya ibu-ibu yang hadir dalam Musrenbang Desa lebih sedikit dibanding bapak-bapak dan kurang didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai, dari mereka yang hadir biasanya kurang mempunyai keberanian untuk menyampaikan aspirasinya, karena merasa kurang mendapatkan dukungan dari kaumnya, disamping itu juga sangat dipengaruhi adanya budaya setempat."

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kehadiran perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif gender.

Out put dari pelaksanaan Musrenbang adalah Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Rongkop yang dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURP) wilayah Kecamatan Rongkop tahun 2010. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tersebut merupakan suatu dokumen penting untuk memberi gambaran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gunung-

kidul terkait dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Rongkop pada tahun 2010. Paska pelaksanaan Musrenbang, masing-masing perwakilan desa wajib mensosialisasikan daftar usulan rencana pembangunan tersebut ke masing-masing desa.

Apabila mencermati Daftar Usulan Rencana Pembangunan tahun 2010 yang merupakan salah satu *out put* dari musrenbang Kecamatan Rongkop tahun 2009, nampak jelas bahwa Daftar Usulan Rencana Pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya bisa mengakomodir kebutuhan seluruh komponen masyarakat termasuk kebutuhan perempuan. Hal itu disebabkan karena dalam penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan di tingkat basis belum sepenuhnya melibatkan unsur perempuan. Dengan demikian usulan program dan kegiatan terkait dengan upaya penyelesaian masalah perempuan, baik menyangkut bidang ekonomi, sosial, agama, pendidikan, kesehatan pertanian, maupun infrastruktur, yang dampaknya bisa memberi manfaat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan perempuan di semua aspek pembangunan, belum bisa dimunculkan dalam pembahasan pada Musrenbang desa. Karena tidak muncul dalam hasil rekapitulasi Musrenbang tingkat desa, maka secara otomatis tidak muncul dan dibahas pada pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Pasal 3 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai sektor kehidupan dan pembangunan. Dengan pengarusutamaan gender diharapkan perempuan mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan.

Pada Musrenbang Kecamatan Rongkop, perempuan telah didudukkan setara dengan laki-laki dan diberi peluang berpartisipasi di forum. Perempuan sendiri mampu menunjukkan bahwa dirinya memiliki kecerdasan dan keberanian untuk menjadi pemimpin serta memanfaatkan peluang dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal itu dinyatakan oleh Bapak Sunarno dari Desa Pringombo sebagai berikut:

“Kenyataan membuktikan bahwa meskipun fasilitator tersebut berasal dari unsur perempuan, tetapi ternyata memiliki kemampuan, kecerdasan serta keberanian yang cukup tinggi. Hal tersebut nampak jelas dari bagaimana cara fasilitator menjawab serta memberikan penjelasan serta tanggapan yang disampaikan oleh peserta pra mu-

srenbang. Fasilitator tersebut selalu memberikan jawaban yang tegas dan ketika harus memberikan alasan, alasan yang disampaikanpun sangat mendasar sekali."

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa teori jender dan subordinasi yang memandang perempuan irasional atau emosional sehingga tidak mampu tampil sebagai pemimpin, tidak terjadi dalam tahap persiapan Musrenbang. Namun dalam proses pengambilan keputusan pada forum diskusi kelompok, kondisi yang terjadi sangat berbeda. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan ternyata masih rendah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sugiyarto, Spd dari Desa Semugih:

"Perempuan masih kurang keberaniannya bahkan kurang percaya diri apalagi untuk duduk setara dengan laki-laki, karena merasa kurang mendapatkan dukungan dari kaumnya. Aspirasi mereka kadang-kadang kurang didengar karena jumlah mereka yang sedikit, ditambah lagi dengan masih adanya kecenderungan dari peserta laki-laki yang masih menitik beratkan pada pembangunan yang bersifat fisik tanpa mempertimbangkan aspek jender didalamnya."

Bapak Mujiyakno dari Desa Botodayaan menambahkan sebagai berikut:

"Jumlah peserta Musrenbang yang hadir dari delapan desa hanya delapan orang itupun mewakili organisasi PKK Desa."

Ibu Rusiyem dari Desa Pucanganom menyatakan sebagai berikut :

"Dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Rongkop, masih ditemui adanya sikap perempuan yang kurang partisipatif. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya keberanian dan kepercayaan diri perempuan tersebut karena tidak didukung sepenuhnya oleh SDM yang memadai dan adanya faktor budaya yang kurang berpihak pada perempuan. Sehingga mereka memilih untuk diam dan tidak mau menyampaikan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan."

Kurangnya keberanian dalam menyampaikan aspirasi karena merasa kurang mendapat dukungan dari kaumnya telah membawa perempuan pada posisi yang sulit. Kepentingan perempuan tidak terakomodir dan partisipasi mereka dinilai rendah. Kondisi ini membenarkan teori tentang jender dan *stereotype* yang menimbulkan ketidakadilan jender.

Masyarakat bukanlah hanya sekadar konsumen pembangunan, tapi subyek dari pembangunan (Pranowo, 2009). Untuk menghapus *stereotype* jender, perempuan harus melakukan reposisi dari sasaran pembangunan menjadi perencanaan pembangunan. Perempuan harus mampu mendorong diri sendiri untuk memperoleh akses terhadap proses perencanaan pembangunan termasuk didalamnya pengambilan keputusan. Disamping itu perlu dilakukan revitalisasi aktivis perempuan agar sadar, paham dan tahu bagaimana memerankan diri dalam Musrenbang.

Berdasarkan analisis di atas, nampak jelas bahwa hasil penelitian masih

mendukung temuan Lindberg (2004), Gerring dkk. (2005), serta Hutckinson (2003). Bahkan peran perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Rongkop mendukung sebagian dari hasil penelitian Agus Wiyono (2005) yaitu peran perempuan dalam pengambilan keputusan pada forum Musrenbang masih rendah. Namun dalam kepanitiaan keterlibatan perempuan cukup tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Desa Akelamo, yang memiliki jumlah peserta Musrenbang perempuan jauh lebih kecil dibandingkan di Akelamo. Terdapat inkonsistensi hasil seperti yang dilakukan oleh Sekhon (2006).

Simpulan

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Rongkop tahun 2009 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/003 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2009. Dalam kepanitiaan peran perempuan sudah cukup tinggi. Dalam proses pengambilan keputusan peran perempuan masih rendah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti rendahnya tingkat keberanian, tingkat kepercayaan diri, dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki perempuan. Faktor eksternal berupa rendahnya tingkat kehadiran, belum representatifnya perempuan yang hadir dalam Musrenbang,

adanya regulasi dan budaya yang kurang berpihak pada kaum perempuan.

Upaya-upaya untuk peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang yaitu melalui peninjauan ulang kebijakan serta komitmen para pemangku kepentingan mengenai keterwakilan perempuan dalam musrenbang. Pentingnya revitalisasi aktivis perempuan dan peningkatan kemandirian perempuan, ketahanan mental dan spiritual, peningkatan kualitas perempuan, menghilangkan perasaan kurang percaya diri dan memacu keberanian perempuan untuk selalu memanfaatkan segala peluang guna peningkatan kedudukan perempuan itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul*. 2008. Kecamatan Dalam Angka.
- Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURP)*. 2010. Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul.
- Gerring, J., Bond, P., Barndt, WT., and Moreno, L. 2005. Democracy and Economic Growth: A Historical Perspective. *World Polit.* 27. 3: 323-364.
- Hutchinson, Janet. R. 2003. En-Gendering Democracy. *Administrative Theory & Praxis*. Vol. 24. No. 4: 721-738.
- Inpres No 9 Tahun 2000*, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

- Lindberg, Staffan. 2004. Women's Empowerment and Democratization: The Effects of Electoral Systems, Participation, and Experience in Africa. *Studies in Comparative International Development*. Spring. Vol. 39. No. 1:28-53.
- Mitchell, NJ., and McCormick, JM. 1988. Economic and Political Explanations of Human Rights Violations. *World Polit.* 40. 4: 475-498.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan XVIII. Bandung: PT. Remaja.
- Pananrang, Riandy Aqsa. 2008. [Aktivis Gender Juga Mau Musrenbang Perempuan](http://www.tribun-timur.com/view.php?id=65294&jenis=Makassar). Tribun. <http://www.tribun-timur.com/view.php?id=65294&jenis=Makassar>
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Kecamatan.
- Pranowo, Dian. 2009. Model Penguatan Peran Perempuan Di Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang) Dalam Rangka Pembangunan Desa Responsif Gender. Retrived 28 Agustus. Surakarta. <http://www.scribd.com/doc/19169482/Model-Penguatan-Peran-Perempuan>
- Przeworski, A. 2000. *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World. 1950-1990*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Russett, BM. 1993. *Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World*. Princeton: Princeton University Press.
- Sadli, Saparinah. 2000. *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif HAM: dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Seguino, S. 2007. Plus Ça Change? Evidence on Global Trends in Gender Norms and Stereotype. *Fem Econ.* 13. 2:1-28.
- Sekhon, Joti. 2006. Engendering Grassroots Democracy: Research, Training, and Networking for Women in Local Self-Governance in India. *NSWA Journal*. Vol. 18. No. 2. Summer: 101-123.
- Surachmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian, Metode dan Teknik*. Bandung: Transito.
- Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah. 2010. Saatnya Perempuan Terlibat Aktif dalam Pembangunan. 10 Mei. Interaksi Intimedia. <http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrikKesra&berita=130547&pagecomment=1>

Model Transfer Inovasi Usaha Kecil Konveksi di Tulungagung

Eddy Wahyudi

FISIP Universitas Jember

Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto 68121, Telp. 0331-335586

Email: edy_data75@yahoo.com

Abstract

This article is about a study on innovation transfer model of garment small-scale businesses in Tulungagung to improve their competitiveness. This research reveals the importance of the identification of garment small-scale businesses' unique characteristics and the importance of a network in the process of innovation transfer by certain parties, like universities and the local government. This research also suggests the establishment of innovation centers which produces effective technologies, mediation between garment small-scale businesses and big firms, and the importance of conducting pilot projects to improve the innovation of garment small-scale businesses in Tulungagung.

Keywords: *small-scale businesses, innovation transfer, garment*

Abstrak

Artikel ini terkait riset tentang model transfer inovasi usaha kecil konveksi di Tulungagung dalam upaya meningkatkan daya saingnya. Riset ini menemukan pentingnya identifikasi karakteristik usaha kecil konveksi yang khas, dan pentingnya network dalam proses transfer inovasi oleh beberapa pihak seperti universitas dan pemerintahan daerah. Riset ini juga menyarankan dibentuknya innovation center yang menghasilkan teknologi tepat guna, mediasi dengan perusahaan besar, dan pilot project bagi berkembangnya inovasi usaha kecil konveksi.

Kata-kata Kunci: **usaha kecil, transfer inovasi, konveksi**

Pendahuluan

Krisis yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 telah menimbulkan kesadaran bahwa dalam perekonomian nasional sektor usaha kecil memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dari jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 99,8% dari total pelaku ekonomi kita, sementara sisanya, yaitu hanya 0,2% merupakan pelaku usaha besar. Sektor ini juga menyerap 88,3% total

angkatan kerja Indonesia. Keseluruhan unit usaha kecil yang ada, 54% di antaranya bergerak di sektor pertanian, 23% di sektor perdagangan dan 10,6% adalah unit usaha industri olahan. Fakta ini menunjukkan pentingnya melakukan pemberdayaan usaha kecil di Indonesia (Karjantoro, 2002)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam UU No 20/tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedang, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria masing-masing usaha dapat dilihat dari aset serta omsetnya. Usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta dan omset maksimal sebanyak 300 juta. Usaha kecil memiliki aset lebih dari 50 juta hingga 500 juta dengan jumlah omset lebih dari 300 juta dan maksimal 2.5 milyar. Sedang usaha menengah memiliki aset lebih dari 500 juta hingga 10 milyar dan omsetnya adalah lebih dari 2.5 Milyar hingga maksimal 50 Milyar.

Base Line Economic Survey (BLES) yang dilakukan Bank Indonesia (2007) berhasil mengidentifikasi 10 komodi-

tas unggulan daerah. Hal ini menegaskan bahwa provinsi dapat memfokuskan pengembangan potensi lokal yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerahnya. Salah satu daerah yang dijadikan BLES Bank Indonesia adalah Tulungagung. Penelitian *Base Line Economic Survey* yang dilakukan Bank Indonesia (2007) terhadap komoditas unggulan menemukan bahwa Tulungagung memiliki 10 komoditas unggulan diantaranya beras, cengkeh, marmer, mamin khas, batik, konveksi dan bordir, kerajinan bambu, ikan hias dan TPI, tenun, dan industri rumah tangga. Sufianto dkk (1998) menemukan bahwa sektor perekonomian Tulungagung sebagian besar ditopang oleh usaha kecil yang tersebar di beberapa kecamatan.

Secara umum BLES menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil Menengah (UKM), antara lain: 1) masih terbatasnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan UMKM; 2) keakuratan data UKM tangguh dan mandiri masih rendah; 3) belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna; 4) belum adanya pembatasan masuknya produk impor, khususnya dari Cina; 5) belum adanya rencana induk (*master plan*) penataan dan pembinaan industri kecil/kerajinan rakyat/PKL yang bersifat utuh dan terpadu; 6) belum akuratnya *base data* industri kecil/kerajinan rakyat/PKL (terutama non formal); dan 7) kepercayaan lembaga keuangan (besar) masih rendah.

Permasalahan tersebut juga dialami oleh usaha kecil di Tulungagung, Jawa

Timur, seperti: 1) masih terbatasnya koordinasi pemerintah terhadap pemberdayaan usaha kecil; 2) belum optimalnya teknologi tepat guna; 3) belum adanya pembatasan masuknya produk impor; 4) belum adanya *master plan* penataan dan pembinaan usaha kecil; 5) belum akuratnya *data base* usaha kecil (terutama non formal); dan 6) kepercayaan lembaga keuangan (perbankan) yang masih rendah (Bank Indonesia, 2007).

Ancaman terbesar dengan dibukanya kerjasama Indonesia dengan China dalam ACFTA (*Asean-China Free Trade Agreement*), secara langsung memukul usaha konveksi, dimana pesaing terbesar selama ini adalah China dalam pasokan kain, produk pakaian jadi, bahkan batik China juga menyerbu Indonesia. Hal ini berdampak terhadap semakin kompetitifnya usaha konveksi di Tulungagung. Usaha kecil konveksi di Tulungagung yang selama ini mengirimkan produk ke daerah-daerah menjadi sulit karena harus dapat menekan harga, untuk mengatasi persaingan yang semakin kompetitif. Usaha kecil yang ingin bertahan tidak selamanya harus menekan harga, namun juga dapat secara inovatif mengembangkan desain, kreatif membuka akses pasar dan inovatif dalam pemasaran.

Inovasi menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan daya saing bisnis (Shapiro, 2002). Artinya, usaha kecil perlu melakukan inovasi agar dapat mendesain organisasinya lebih fleksibel yang memungkinkan beradaptasi terhadap perubahan orientasi pasar. Usaha kecil dapat dengan mudah beradaptasi

dengan merespon perubahan keinginan pelanggan, jalur distribusi, dan kemampuan berinovasi (Feigenbaum and Karnani, 1991).

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mentransfer inovasi secara tepat guna kepada usaha kecil karena seringkali mereka dihadapkan pada permasalahan biaya, antipati, pasrah, dan cepat berpuas diri yang berimbas pada terpuruknya usaha mereka. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena usaha kecil konveksi membutuhkan desain metodologis yang tepat untuk mentransfer inovasi agar secara kontinyu mereka dapat meningkatkan usaha kecilnya.

Penelitian ini berupaya menemukan model transfer inovasi yang tepat agar usaha kecil dapat lebih berdaya. Transfer inovasi pada usaha kecil sering menemui beberapa kendala, diantaranya: 1) pelaku usaha kecil hanya memiliki kapabilitas inovasi yang rendah, baik dalam inovasi produk maupun proses; 2) tingginya biaya membuat risiko tinggi yang berhubungan dengan aktivitas inovasi; 3) rasa takut atau malah antipati yang berimbas enggan untuk melakukan inovasi; dan 4) rendahnya informasi yang didapat dari pelaku usaha tentang manfaat inovasi bagi kelangsungan usaha mereka (Caputo *et al.*, 2002).

Peningkatan daya saing usaha kecil sering menemui kendala karena skala ekonomi dan sumberdaya mereka yang kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Kompensasi dari kelemahan tersebut, usaha kecil mampu me-

nerapkan fleksibilitas karena organisasi internal mereka yang sederhana, yang memungkinkan mereka merespon dan beradaptasi dengan perubahan (Sanchez and Marin, 2005).

Pengembangan teknologi dan inovasi menjadi elemen dasar dalam peningkatan daya saing (Hitt, *et al.* 2001). Sinergi antara teknologi dan inovasi akan menjadi yang mampu menghasilkan produk berkualitas yang berorientasi pasar dan dapat menekan harga (*low cost*).

Manajemen inovasi juga memungkinkan usaha kecil memodifikasi desain struktur organisasi mereka. Camison (1997) dalam penelitiannya mengatakan bahwa struktur organisasi yang tepat akan dapat membentuk tim kerja yang dapat mengeksplorasi inovasi, pengembangan produk, desain, *engineering*, produksi dan pemasaran

Keunggulan bersaing organisasi yang lain adalah kemampuan organisasi dalam melakukan kerjasama. Sedikit sekali perusahaan yang mampu memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan kerjasama, termasuk didalamnya adalah usaha kecil (Hoffman and Schlosser, 2001). Kemampuan melakukan kerjasama terbukti dapat meningkatkan daya saing usaha kecil, karena mereka mampu mengakses sumberdaya dalam jumlah besar tanpa harus melakukan merger. Usaha kecil hanya perlu menjaga fleksibilitas mereka, yang memungkinkan mereka beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (Glaiser and Buckley, 1996).

Istilah keunggulan kompetitif secara tradisional telah digambarkan sebagai faktor atau kombinasi dari faktor-faktor yang membuat suatu organisasi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi lainnya dalam suatu persaingan (Fahy and Chaharbangi, 1995). Sesuai dengan definisi ini, kinerja yang lebih baik oleh suatu organisasi disebabkan oleh adanya perbedaan dalam atribut atau faktor perusahaan yang memungkinkan perusahaan melayani pelanggan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan pesaing, sehingga menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik pula (Ma, 1999).

Hitt *et al.* (2001) mengatakan bahwa tidak ada keunggulan kompetitif yang berlangsung untuk selamanya. Seiring berjalannya waktu, pesaing juga akan mampu memiliki sumberdaya yang unik, kemampuan dan kompetensi dasarnya yang unik untuk membentuk gagasan yang unik yang mampu bersaing dengan perusahaan. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif hanya dapat dipertahankan dengan kompetensi dasar baru yang berfungsi sebagai keunggulan kompetitif dimasa yang akan datang. Keunggulan kompetitif dapat dibangun dengan beberapa komponen. Hill and Jones (1998) menegaskan bahwa keunggulan biaya dan diferensiasi yang berhasil dibangun dengan berlandaskan pada efisiensi, kualitas, inovasi dan *customer responsiveness*.

Salah satu upaya untuk mencapai efisiensi adalah penurunan skala ekonomis (*economic of scale*), yang dapat

didefinisikan sebagai penurunan biaya satuan yang berkaitan dengan skala output yang besar (Sunata, 2007).

Sarana bagi organisasi untuk mencapai superior kualitas adalah dengan mengimplementasikan manajemen kualitas total. Hal tersebut dapat diukur dari produk dan jasa berkualitas tinggi yang memiliki daya tahan dan daya saing perusahaan di pasar global yang sangat kompetitif (Green *et al.*, 2005).

Hal lain yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi adalah inovasi. Inovasi merupakan kemampuan perusahaan untuk memperkenalkan produk baru dan proses produksi untuk mengkapitalisasi peluang besar (Ozsomer *et al.* 1997). Inovasi memiliki beberapa peran antara lain memperbaharui dan memperbesar rentang produk dan jasa serta pasar yang terkait, penciptaan metode baru produksi, penawaran, dan distribusi (McAdam *et al.* 1998). Struktur organisasi yang fleksibel memfasilitasi pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru, dan perusahaan yang memiliki fleksibilitas cenderung lebih baik dalam melakukan inovasi dari pada perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang kaku.

Usaha kecil dapat meraih keunggulan kompetitif apabila dapat membentuk produk yang memiliki berbeda dibanding pesaing (diferensiasi), dengan harga yang murah (*low cost*), menjaga kontinuitas produksi dan distribusi, dan selalu melakukan inovasi yang berorientasi pasar

Humphreys *et al.* (2005) menegaskan bahwa inovasi membutuhkan beberapa elemen pendukung yang penting agar implementasi inovasi dapat meningkatkan kinerja usaha kecil. Beberapa elemen tersebut adalah: kepemimpinan, pemberdayaan, budaya kerja, teknologi, pembelajaran, struktur, dan manajemen.

Berdasar penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa inovasi menjadi strategi fundamental dalam meningkatkan keunggulan kompetitif usaha kecil. Berdasar kajian yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih fokus pada kendala internal usaha kecil dalam melakukan inovasi. Penelitian yang meneliti kendala inovasi dalam lingkup eksternal masih belum dilakukan secara mendalam. Hal tersebut terlihat dari penelitian yang dilakukan Caputo *et al.* (2002) yang lebih fokus menyoroti kendala internal. Pertimbangan peneliti, kendala eksternal memiliki peluang yang juga berpengaruh terhadap kendala transfer inovasi dan peningkatan kapabilitas inovasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Berdasar permasalahan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan lebih *indepth* dalam mengurai masalah. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan usaha kecil konveksi da-

lam melakukan inovasi, dan identifikasi terhadap pengaruh eksternal yang memungkinkan menghalangi transfer inovasi manajemen usaha kecil. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah para pengusaha kecil konveksi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasar hasil wawancara dengan bapak Soekono, SE selaku kepala Bidang UMKM Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Pasar di Tulungagung bahwa sebenarnya Tulungagung sudah memiliki Renstra Pengembangan UMKM, yang diantaranya adalah: membangun lembaga keuangan Mikro, revitalisasi KUR (Kredit Usaha Rakyat), pendidikan dan pelatihan, revitalisasi pasar tradisional, memantapkan kelembagaan koperasi, industri kreatif, dan *One village one product*.

Renstra tersebut sudah dalam proses implementasi, namun ada beberapa hal yang kurang optimal, seperti memantapkan kelembagaan koperasi, proses revitalisasi KUR, dan *one village one product*, belum semua desa atau kecamatan mampu mengelola potensi daerah dengan baik. Artinya potensi UMKM yang ada belum dapat meningkatkan daya saingnya. Misalnya, di Desa Pakel, meskipun sudah ada sentra kerajinan kulit, namun mati suri, belum mampu meningkatkan daya saing, karena kalah bersaing dengan Desa Tanggulangin (Si-

doarjo), Magetan dan beberapa daerah lain di luar Jawa Timur.

Permasalahan Internal yang dihadapi dalam pengembangan UMKM adalah: *pertama*, sumberdaya manusia (SDM); lemahnya SDM yang dimaksud bukan dari lemahnya jenis usaha kreatif masyarakat Tulungagung, namun lebih kepada bagaimana UMKM yang dikelola dapat bertahan, meningkatkan daya saing, dan dapat bersaing dalam pasar ekspor. Kendala santai, apa adanya, tidak mau bersinggungan dengan birokrasi (tidak mau ribet mengurus NPWP), membuat pelaku usaha lebih lambat dalam merespon perubahan peta persaingan. *Kedua*, keterbatasan modal, karena UMKM seringkali mengeluhkan bahwa usaha mereka akan dapat berkembang jika modal yang dimiliki besar. *Ketiga*, manajemen tata kelola yang tradisional, nyaris tidak mengenal teknologi modern dalam memproduksi, sehingga beberapa UMKM di Tulungagung yang mampu mengakuisisi teknologi mampu meningkatkan daya saingnya. Beberapa UMKM yang tidak mampu mengakuisisi teknologi bekerja dengan durasi kerja lebih lama, produktivitasnya rendah, dan harga yang tidak kompetitif. *Keempat*, kendala pemasaran yakni, rendahnya akses pasar, lemahnya sistem informasi pemasaran membuat UMKM kesulitan dalam mengembangkan pemasaran produknya. Seringkali pelaku usaha mengetahui bahwa produknya dibutuhkan di daerah tertentu, namun mereka kesulitan untuk masuk ke daerah tersebut karena sudah ada produk pesaing. Ke-

lima, penyediaan bahan baku, kesulitan atau hambatan yang sebenarnya terjadi bukan pada kesulitan mengakses bahan baku, namun bagaimana mendapatkan bahan baku yang murah/terjangkau dari sisi harga. Karena seringkali bahan baku produksi harus didatangkan dari luar Tulungagung, sehingga berat di ongkos produksi contohnya: meskipun campur darat/besole terkenal dengan marmer dan *Onyx*, namun sebagian besar batu *Onyx* masih didatangkan dari Bawean. Juga kulit untuk sabuk, dompet dan tas, masih mengambil dari Surabaya. Industri logam, sebagian masih bergantung kepada limbah industri dari Surabaya. Keenam, kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM); pelaku usaha merasa belum perlu menggunakan sistem informasi yang rapi atau modern berbasis teknologi, alasannya sederhana, dengan kondisi seperti yang ada saja sudah bisa jalan, buat apa beli alat kalau hasilnya sama saja.

Ditinjau dari pendekatan eksternal permasalahan pengembangan UMKM di Tulungagung adalah: *pertama*, persaingan, banyak sektor unggulan UMKM di Tulungagung juga dijumpai di daerah lain. Misalnya batu *Onyx*, dari Bawean. Juga untuk produk makanan, misal jajanan memiliki kemiripan dengan daerah lain seperti Madiun, Trenggalek, Blitar dan Ponorogo. Apalagi produk logam, kerajinan bambu, kulit dan sebagainya. Kedua, ACFTA, peran kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan pajak bagi produk impor dari China membuat UMKM banyak terpukul. Sebelum ada kebijakan tersebut saja, UMKM lokal

sudah merasa tersaingi, apalagi sekarang dengan kebijakan tersebut, produk China akan semakin membanjiri, karena murah. Beberapa sektor UMKM yang tersaingi secara langsung adalah industri konveksi, batik, dan logam. Meskipun dari sisi kualitas produk lokal masih mampu bersaing, bahkan lebih unggul. Namun kenyataannya, pembeli tidak begitu paham terhadap kualitas, tetapi lebih kepada harga yang murah. Ketiga, ancaman langsung produk China mulai dari mainan, makanan, alat alat rumah tangga menjadi hambatan sekaligus tantangan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya dengan nilai kekhasan yang mampu memberikan deferensiasi produk di mata konsumen.

Langkah alternatif adalah membuka akses pasar, dengan menggelar pameran atau mengikuti gelaran pameran yang diadakan provinsi. Untuk saat ini UMKM konveksi sudah memiliki tempat di gedung pameran di provinsi. Di Tulungagung ada 31.628 UMKM yang tersebar di 19 kecamatan, di 271 desa/kelurahan yang terdiri dari beragam UMKM meliputi *handicraft*, batik, marmer, logam pandai besi, kulit, makanan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Agus Sudirman dan Ibu Hj. Atik Ustadza selaku pimpinan konveksi UD Larasati, kunci usaha kecilnya dapat bertahan hidup adalah dengan inovasi. Inovasi itu dilakukan pada desain, kemasan, dan pemasaran. Kunci lain dari keberhasilan usahanya adalah dengan menanamkan kejujuran kepada pelanggan, dan karyawan.

Inovasi model desain konveksi dapat didapatkan melalui ide-ide spontan yang muncul. Menurut penuturan mereka, ide bisa didapatkan dimana-mana, mulai dari jalan-jalan, melihat fenomena alam, pohon pohon maupun daun-daun yang motif dan warnanya memberi inspirasi desain akan dapat menjadi model/motif baju yang akan dirancang. Beliau mengatakan bahwa inspirasi munculnya ide mengalir begitu saja, spontanitas.

Namun yang penting, usaha konveksi memang dituntut untuk menghasilkan desain/model baru yang memungkinkan diminati oleh konsumen. Tanpa model yang selalu baru, berimbas pada sepiunya pemesan ataupun ketika produk tersebut dipasarkan ke toko-toko, mereka akan menolaknya karena desain yang tidak baru.

Proses menghasilkan desain juga memperhatikan orientasi konsumen. Menurut penuturan ibu Atik, melihat desain yang tren saat ini sangat penting dilakukan, sehingga mereka juga mengamati pasar dan tren penjualan produk yang laku saat itu apa, sehingga mereka juga segera membuat desain yang sesuai selera konsumen.

Dapat disimpulkan bahwa disamping menghasilkan ide kreatif dengan membuat desain sendiri (*market created*), usaha konveksi juga dituntut untuk senantiasa menganalisis kondisi permintaan di pasar, artinya orientasi terhadap kebutuhan konsumen menjadi alternatif usaha konveksi dapat meningkatkan daya saingnya.

Akses mendapatkan informasi mengenai desain/model dari internet justru

jarang dilakukan. Hal ini berdasarkan pemaparan yang disampaikan narasumber, bahwa memonitor desain tergantung dari respon pasar, permintaan penjual, dan melihat tren model dari televisi maupun koran. Bahkan respon dari ibu-ibu arisan, kegiatan-kegiatan pengajian juga menjadi informasi yang akurat bagi pasar konveksi UD Larasati miliknya. Kebergantungan terhadap internet menjadi rendah karena tidak semua informasi yang tren di internet sesuai dengan kondisi di lapangan.

Persaingan usaha membuat seringkali tembak menembak desain antar pengusaha konveksi menjadi hal yang biasa. Menurutnya, hal ini biasa terjadi dalam bisnis konveksi. Apalagi memang paten produk tidak dibutuhkan dalam usaha ini. Hal ini didasari bahwa merek atau desain yang dipatenkan membutuhkan waktu lama dalam proses paten. Kedua, desain yang terus berkembang, dinamis dan inovatif membuat produk konveksi seperti sia-sia dalam mempatenkan produk mereka, karena sudah membuang biaya dan waktu untuk memburu proses paten, desain yang sudah dipatenkan malah ketinggalan jaman. Manfaat paten yang rendah membuat pengusaha konveksi di wilayah Tulungagung tidak mempatenkan desain/motif rancangannya.

Usaha ekspor sudah dilakukan oleh UD Larasati dengan mengekspor produknya ke luar negeri, diantaranya: produk rukuh, sarung bantal dan spreya sudah di ekspor ke Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.

Namun ekspor yang dilakukan tidak menyertakan merek, karena akan diberi merek oleh perusahaan tujuan, sehingga seringkali produk yang mereka kirim ke Arab Saudi kembali ke Indonesia dalam bentuk souvenir orang-orang yang pulang beribadah haji.

Model pembinaan tenaga kerja yang dilakukan adalah dengan sistem pengepul/kemitraan untuk mengejar target pesanan. Sistem ini berjalan dengan perusahaan memberikan bantuan berupa alat/mesin jahit, obras dan kebutuhan produksi lainnya. Disamping itu segala kebutuhan bahan baku mulai dari kain, benang hingga desain sudah disiapkan perusahaan, sehingga karyawan tinggal mengambil untuk dikerjakan di rumah. Sistem ini memberikan keleluasaan pada karyawan untuk bekerja di rumah dan tinggal mengirimkan hasil pekerjaan mereka ke perusahaan untuk kemudian di *packaging*. Sistem pembayaran model kemitraan ini juga lebih sederhana karena tinggal menghitung berapa tingkat produktivitas karyawan. Model kemitraan yang selama ini dilakukan sudah berjalan kurang lebih 15 tahun dan tidak pernah ada permasalahan.

Karyawan juga diberi kesempatan dalam memberikan ide dan berkreasi dalam mendesain, asalkan bagus dan sesuai dengan permintaan konsumen, tidak mustahil ide dari karyawan dipakai dan diproduksi dalam skala besar. Karyawan yang sering menyumbangkan idenya akan mendapat penghargaan berupa upah yang lebih besar ataupun bonus langsung. Hal ini juga memperlancar kon-

tinuitas usaha karena lancarnya ide dan kreativitas akan mendorong kelancaran pesanan, yang berarti juga memberikan kontinuitas kerja kepada karyawan.

Meskipun ide kreasi diberikan kebebasan pada karyawan untuk menciptakan, pelaku usaha/pemilik perusahaan tidak khawatir akan disaingi oleh karyawannya sendiri, artinya baik H. Agus maupun Hj. Atik sepakat bahwa mereka memberi kebebasan kepada karyawan untuk mandiri dan keluar dari perusahaan. Meskipun sebenarnya asalkan mereka bekerja produktif, mereka dapat meraih kesejahteraan yang cukup.

Ketika usaha konveksi ini berjalan, terjadi proses pembelajaran (*learning process*), sehingga kebersamaan antara pemilik dengan karyawan terbentuk sejak mereka mulai bekerja. Orientasi pembelajaran yang ditanamkan pelaku usaha kepada karyawannya membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja, termasuk apabila karyawan mampu menciptakan desain, akan dihargai oleh pemilik, sehingga memotivasi karyawan untuk berfikir *out of the box*.

Akses pasar menjadi kunci keberhasilan usaha konveksi. *Link*/jaringan usaha sangat mahal harganya. Itu menjadi rahasia kesuksesan bisnis konveksi. Disamping itu jalinan kemitraan dengan pedagang eceran di pasar-pasar lokal maupun antar kota menjadi jaminan kelancaran usaha mereka. Hal ini dipaparkan oleh Hj. Atik, bahwa dengan menemukan akses pasar, mereka akan berusaha menjaga kerahasiaan akses pasar tersebut, dan berupaya menjaga

kepercayaan dengan mitra usaha mereka. Kuncinya adalah saling menjaga kepercayaan, sehingga pernah suatu ketika, bukan H. Agus atau Hj. Atik yang mengirim barang ke luar kota, mereka menolak menerima barang tersebut, dan baru bersedia menerima ketika ditelpon salah satu dari mereka.

Transfer inovasi usaha kecil dapat dilakukan dengan menekankan pada aspek internal dan eksternal. Aspek internal antara lain adalah dengan cara: *pertama*, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya inovasi sebagai salah satu kunci meningkatkan daya saing bisnis. Usaha konveksi membutuhkan inovasi yang tinggi dalam berbagai aspek, diantaranya adalah inovasi dalam hal desain motif dari baju yang dihasilkan. Berdasar hasil riset, pelaku usaha yang memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan inovasi akan dapat bertahan dan meningkatkan daya saingnya. *Kedua*, memberikan aspek pembelajaran kepada karyawan agar ide kreatif yang menjadi basis inovasi tidak akan pernah habis. Saat ini pelaku usaha sering hanya mengandalkan aspek kreativitas untuk berinovasi dari dirinya sendiri, dengan tidak memperhatikan ide karyawan. Padahal tidak jarang karyawan mampu belajar terhadap perkembangan mode/desain sehingga dapat diakomodir menjadi *idea generation* yang menjadi kekuatan desain bagi usaha konveksi yang dikelola UMKM. *Ketiga*, usaha kecil berupaya melakukan penelitian/riset sendiri, meskipun dengan tingkatan yang sederhana. Hal ini dapat dilakukan dengan

melakukan survey ke pasar-pasar besar yang ada di Surabaya ataupun Jakarta, memantau perkembangan mode dari televisi atau majalah. Setidaknya dengan riset kecil yang dilakukan, pelaku usaha sadar bahwa produknya akan mampu bersaing dengan inovasi. Ada saling hubungan antara perusahaan besar, universitas dan Pemda (fasilitator). Perusahaan besar menjadi mitra UMKM dalam membantu kegiatan produksi. Keuntungan dari perusahaan besar adalah mereka dapat berhemat tempat produksi, tidak ribet dengan urusan tenaga kerja. Perusahaan besar hanya memberikan standar kerja dan mutu agar kerjasama tersebut berkelanjutan.

Pertimbangan dari aspek eksternal dalam model transfer inovasi konveksi dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: *pertama*, peran Universitas sebagai lembaga yang melakukan *feasibility studies* terhadap keberadaan UMKM penerima bantuan dan sebagai lembaga independen yang menentukan tipe bantuan yang tepat terhadap UMKM di pemerintahan daerah. Universitas juga potensial dalam melakukan riset terhadap efektivitas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pengabdian yang menjadi salah satu aspek Tri Dharma perguruan tinggi dapat diimplementasikan dengan melakukan uji teknologi tepat guna yang menjadi *pilot project*. Berdasarkan hasil penelitian, universitas lokal yang potensial adalah Universitas Tulungagung dan STAIN Tulungagung. Meskipun tidak menutup kemungkinan universitas negeri maupun swasta berperan dalam

fungsi itu, namun optimalisasi universitas lokal dirasa dapat lebih memberi makna sinergisitas kerjasama antara universitas dengan UMKM. Pendampingan dan hasil riset universitas dalam hal pemasaran ataupun pelatihan kepada pelaku usaha konveksi yang tersebar di Tulungagung akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Demikian pula pembinaan dalam hal manajemen persediaan keuangan akan berdampak terhadap pola manajerial usaha konveksi yang selama ini cenderung tradisional. *Kedua*, Pemda sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan perusahaan besar terhadap kebutuhan UMKM, karena bagaimana pun peran pemerintah sebagai pembuat regulasi dan kewajiban pemerintah memberikan kesempatan yang adil dan melindungi kepentingan UMKM menjadi penting untuk ada. *Ketiga*, peran Dinkop UKM yang lain adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Pengiriman pelatihan ter-*schedule* dengan koordinasi lintas SKPD. Peran Dinkop UKM lebih kepada manajemen usaha kecil maupun sistem informasi, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih kepada aspek teknis. Bantuan yang dilakukan Dinkop dalam manajemen UMKM adalah bantuan penyusunan laporan keuangan dan pengarahannya perijinan. Bantuan penyusunan laporan keuangan dimaksudkan sebagai upaya agar pelaku usaha tidak menjalankan usahanya berdasarkan intuisi semata, mereka akan dapat mengkalkulasi berapa pengeluaran dan penghasilan,

memprediksi berapa anggaran untuk pengembangan usaha, yang pada akhirnya mereka dapat memprediksi keuntungan dan kerugian dengan mengevaluasi dari catatan keuangan mereka.

Sedangkan bantuan perijinan ditujukan agar keberadaan UMKM tercatat berdasarkan kriteria jenis usaha, besaran usaha, modal usaha maupun aset usaha sehingga lebih mudah memonitor perkembangan kemajuan mereka. Disamping itu, memudahkan dalam memberikan pembinaan dan pelatihan karena dengan tercatat, Dinkop dan Disperindag mampu membuat *schedule* maupun prioritas pelatihan dan pengiriman tenaga ahli yang dapat meningkatkan *skill* pelaku usaha. Kemudahan akses pasar dan menumbuhkan kepercayaan konsumen bahwa perusahaan/usaha kecil yang dikelola sudah terdaftar, terpantau, dan terbina oleh pemerintah, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan. Akses pasar yang lebih luas, karena program-program pemerintah memprioritaskan UMKM yang legal sehingga lebih mudah diperkenalkan ke pasar ekspor. Pemahaman pelaku usaha yang menganggap tidak penting mengurus perijinan adalah justru menghambat perkembangan usaha mereka, karena secara tidak langsung akan membatasi akses pasar mereka sendiri.

Kendala program pemerintah dalam dukungan adalah karena ketika pelaku usaha mengikuti program pembinaan dari pemerintah, berarti mereka harus meninggalkan usaha mereka, yang otomatis mematikan pendapatan mereka saat itu.

Peran perbankan dalam memberikan pelatihan manajerial dan keuangan. Pola peran perbankan dapat bersinergi dengan universitas lokal dan Pemda dalam mengajak pelaku usaha konveksi untuk membenahi manajerialnya, diberikan pelatihan tentang manajemen usaha, dan menjadi lebih berani untuk mengambil risiko mengambil kredit bank dengan pola pembayaran yang fleksibel. Kesulitan usaha kecil konveksi di Tulungagung dalam hal permodalan hampir juga dirasakan seluruh UMKM pada umumnya, kesulitan akses permodalan lebih disebabkan lemahnya jaminan dan kebangkrutan karena pengelolaan yang amburadul. Dukungan perbankan di Tulungagung sangat baik, ada 7 bank swasta yang mendukung, yaitu Bank Mandiri, Bukopin, BRI, BNI, Bank Jatim, BCA, maupun Bank Muamalat.

Lembaga riset menjadi sangat dibutuhkan karena keunikan permasalahan lokal yang dimiliki UMKM. Lembaga riset yang dimaksud peneliti di sini dapat berupa *innovation center* atau sebagai pusat inovasi yang menghasilkan inovasi teknologi tepat guna, pelatihan dan pembinaan manajemen usaha kecil, membuka akses pasar ke luar negeri, mediasi permasalahan modal dengan perbankan dan mediasi produk UMKM dengan perusahaan besar potensial mitra. Berdasarkan hasil wawancara dengan Soekono, SE, klinik UMKM di Jatim akan dibangun di Tulungagung yang akan melayani konsultasi, pemasaran, advokasi, inovasi, pelatihan, akses permodalan, riset dan pengembangan.

Klinik UMKM diharapkan dapat sebagai embrio pusat inovasi sehingga UMKM secara makro di Tulungagung dapat meningkatkan daya saingnya.

Terbentuknya *innovation center* akan berpeluang meningkatkan daya saing usaha konveksi di Tulungagung. Peluang *innovation center* dalam menghasilkan riset desain yang diminati konsumen, pengembangan akses pasar akan dapat dioptimalkan. Berdasarkan hasil riset, selama ini berkembangnya usaha konveksi yang ada di Tulungagung disebabkan usaha mandiri dari masing-masing pelaku usaha. Peran pemerintah daerah dalam membuka akses pasar hanya insidental pada saat pameran, namun pengembangan akses pasar rata-rata pelaku usaha karena dilakukan berdasarkan usaha sendiri. Artinya, dengan terbentuknya *innovation center* yang lebih terbuka terhadap peluang pengembangan usaha konveksi diharapkan dapat ber*impact* terhadap akses pasar yang selama ini dirintis sendiri oleh pelaku usaha.

Simpulan

Model transfer inovasi usaha kecil konveksi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan internal adalah dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya inovasi, memberikan aspek pembelajaran kepada karyawan agar ide kreatif yang menjadi basis inovasi tidak akan pernah habis, dan usaha kecil berupaya melakukan penelitian/riset sendiri.

Pendekatan eksternal dapat dilakukan dengan optimalisasi peran universitas, pemerintahan daerah dalam memediasi usaha kecil dengan perusahaan besar, peran Dinkop UKM dalam melakukan pembinaan usaha, dan peran perbankan. Tidak kalah pentingnya adalah membentuk *innovation center* sebagai pusat inovasi yang menghasilkan inovasi teknologi tepat guna, pelatihan dan pembinaan manajemen usaha kecil, membuka akses pasar ke luar negeri, mediasi permasalahan modal dengan perbankan dan mediasi produk UMKM dengan perusahaan besar potensial mitra.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. 2007. Base Line Survey Komoditi Produk Jenis Unggulan. www.bi.go.id
- Camison, C. 1997. "Competitiveness SMEs in Spain: Strategy and Competencies Distictive." *Strategic Management Journal*. Vol 4: 78-88.
- Caputo, A.C., Cucchiella, F., Fratocchi, L., Pelagagge, P.M., and Scacchia, F. 2002. "Methodological Framework for Innovation Transfer to SMEs." *Industrial Management and Data Systems*. Vol 102, 5: 271-283.
- Fahy, J. and Chaharbangi, K. 1995. Strategy Development: Past, Present and Future. *Management Decision*, Vol. 33, No. 6: 11-21.
- Feigenbaum, A. and A. Karnani. 1991. Output Flexibility. A Competitive Advantage for Small Firms *Strategic Management Journal*. Vol 12: 101-114.
- Glaizer, K.W and P.J. Buckley. 1996. Strategic Motives for International Alliances Formation. *Journal of Management Studies*. Vol. 33: 301-332.
- Green K. W. Jr., Inman, R.A., Brown, G. and Willis, T.H. 2005. Market Orientation: relation to structure and performance. Emerald group publishing limited. *Journal of Business and Industrial Marketing*. Vol. 20, 6: 276-284.
- Hill, C.W. and Jones, G.L. 1998. *Strategic Management: an Integrated Approach*. New York: Houghton Miffhn Company.
- Hitt, M.A., Ireland. R.D. and Hoskisson, R.E. 2001. *Strategic Management: Competitiveness and Globalization 4th Edition; Concepts*. United States of America: Thompson Learning.
- Hoffman, W.H. and R. Schloser. 2001. Success Factors of Strategic Aliences in SMEs, An Empirical Study. *Long Range Planning*. Vol. 34: 357-381.
- Humphreys, P., McAdam, R., and Leckey, J. 2005. Longitudinal evaluation of innovation implementation in SMEs. *European Journal of Innovation Management*. Vol. 8, No. 3: 283-304.

- Karjantoro, H. 2002. *Usaha Kecil dan Problem Pemberdayaannya*. Jakarta, Usahawan, No.04. th XXXI.
- Ma, H. 1999. Creation and Pre Emption for Competitive Advantage. *Management Decision*. Vol. 37, No. 3: 259-266.
- McAdam, R., G. Armstrong, and B. Kelly. 1998. Investigation of the relationship between total quality and innovation: a research study involving small organizations. *European Journal of Innovation Management*, 1, 3: 139-147.
- Ozsomer, A., Calantone, R.J. and Di Benedetto, A. 1997. What Makes Firms More Innovative? A Look at Organizational and Environmental Factors. *Journal of Business & Industrial marketing*, 12, 6: 400-416.
- Porter, M. E. 1985. *Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Memper-tahankan Kinerja Unggul*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sanchez, A.M. and Marin, G.S. 2005. Strategic Orientation, Management Characteristics and Performance: A study of Spanish SMEs. *Journal of Small Business Management*. Vol. 43, No. 43: 287-308.
- Shapiro, S.M. 2002. *Innovation: A blue print for surviving and thriving in age of change*. New York: Donnelly and Sons Company.
- Sufianto, H., Hasyim, W., dan Surjono. 1998. Studi Perkembangan Sentra Industri Rakyat di Kota Ngunt Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Social Sciences)*, Vol. 10, No 1.
- Sunata, W. 2007. Pengaruh Sumberdaya Perusahaan terhadap Kapabilitas, keunggulan Kompetitif dan Kinerja Usaha perusahaan *Disertasi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Pengembangan Ekonomi Mikro Pola Baitul Maal Wattanwil di Perdesaan

Sri Utami

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD"

Jl. Timoho 317 Yogyakarta, 55225 Telp.0274 561971

Email: Sri_Utami5758@yahoo.co.id

Abstract

Understanding of people's economy, in reality there are a lot of parties that do not realize that in fact people's economy functions as the backbone of local or rural economy and also national economy. Thus, people's economy needs attention, support and full protection. Supporting and strengthening people's economy help improve people's productivity and purchasing power, open job opportunities for people, and develop the economic added value of the economic sector. This writing aims at giving better understanding to those involved in empowering people's economy through fund raising to develop productive efforts and investment to improve the economic quality of small-scale and micro-scale industries, in an effort to overcome poverty. The writing is based on literature study and empirical experience. In reality, the difficulties often faced by small-scale and micro-scale industries are the problems of funding, skills, and technology. The owners of small-scale and micro-scale industries find great difficulty in accessing banking financial institutions. The concept of syariah with an BMT approach is a right strategy which can be accepted by the society and promises to be financial institutions to facilitate people's economy for areas with natural resources and also communities whose economy needs be empowered in all aspects of life.

Key words: people's economy, empowering, the concept of syariah

Abstrak

Banyak pihak tidak menyadari bahwa ekonomi rakyat merupakan tulang punggung perekonomian lokal atau daerah bahkan nasional. Untuk itu, ekonomi rakyat memerlukan perhatian, pemihakan dan perlindungan penuh. Pemihakan ekonomi rakyat bertujuan meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti oleh rakyat. Tujuan penulisan ini memberi pemahaman kepada pihak-pihak yang ikhlas memberdayakan ekonomi rakyat melalui menghimpun dana, pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil dan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Metode dalam penulisan ini adalah studi literatur dan pengalaman empiris. Dalam kenyataan empiris, kesulitan yang sering terjadi pada usaha ekonomi mikro dan kecil adalah masalah permodalan, *skill* dan teknologi. Para pelaku usaha sangat sulit mengakses lembaga keuangan perbankan. Konsep syariah dengan pendekatan Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) merupakan konsep yang tepat dan dapat diterima masyarakat perdesaan. Lembaga keuangan ini mampu untuk memfasilitasi upaya peningkatan ekonomi rakyat bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan masyarakat yang ekonominya masih membutuhkan pemberdayaan dalam segala aspek kehidupan.

Kata-kata kunci: ekonomi rakyat, pemberdayaan, konsep syariah

Pendahuluan

Pembangunan menjadi tuntutan dan kewajiban setiap negara sedang berkembang di dunia termasuk Indonesia karena hanya dengan usaha pembangunan ketimpangan dan keterbelakangan serta kemiskinan dapat diatasi. Berbicara masalah pembangunan tidak terlepas dari persoalan terjadinya perubahan struktur ekonomi masyarakat dalam arti terjadinya peningkatan pendapatan nasional perkapita dan transformasi sosial ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi ada tiga masalah utama yaitu: pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Ketiga masalah tersebut saling berkaitan. Pelaku pembangunan yang tidak memiliki sumber daya dan tidak mempunyai akses dalam pembangunan akan menganggur. Karena mereka menganggur maka tidak berpendapatan yang kemudian menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi kesenjangan yang paling buruk.

Kemiskinan sebagai ukuran keterbelakangan yang harus ditanggulangi, mencakup permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Perbedaan struktur masyarakat yang ada antara mereka yang telah ikut serta dalam proses pembangunan dengan yang masih tertinggal menyebabkan keadaan kesenjangan atau kemiskinan struktural yang dapat mengganggu kelancaran dan kesinambungan pembangunan.

Kebijaksanaan pembangunan yang sistematis diperlukan untuk memperkecil kesenjangan. Berdasarkan pengalaman empiris, strategi pembangun-

an yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi terbukti tidak mampu memecahkan masalah dan acapkali justru mempertajam kesenjangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan. Selanjutnya, kebijaksanaan pembangunan yang sistematis ini berpedoman pada peningkatan peran, dan produktivitas rakyat serta efisiensi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai obyek sekaligus sumber pembangunan. Pemihakan dan pemberdayaan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat memenuhi kondisi yang dicita-citakan.

Fenomena pembangunan ekonomi yang perlu menjadi perhatian adalah: memfokuskan pada apa yang terjadi terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di berbagai bidang. Perhatian pada ketiga fenomena tersebut relevan dengan kondisi dan keadaan fenomena pembangunan ekonomi lokal atau di perdesaan saat ini.

Ketergantungan penduduk atau angkatan kerja pada sektor pertanian semakin terasa karena angkatan kerja yang semakin bertambah di satu pihak dan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian di pihak lain berkembang dengan cepat. Selain itu, teknologi semakin berkembang dan investasi modal yang besar tidak diikuti dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang baik. Akibatnya, kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian sangat rendah atau kurang menyerap tenaga kerja dan akhirnya tenaga kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran sehingga hal ini akan semakin meningkatkan kemiskinan.

Indikator konsep kemiskinan dapat dilihat dari pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksemaan kesempatan dalam memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan dalam struktur ekonomi masyarakat dan juga sangat berpengaruh terhadap struktur perekonomian lokal atau perdesaan maupun nasional

Pemberdayaan

Konsep *empowerment* muncul dengan dua premis mayor, kegagalan dan harapan. (John Friedman, 1992). Menurut Amartya Sen dalam Sumodiningrat (2007: 28), kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi secara memadai. Kegagalan dan harapan bukan merupakan alat ukur ilmu-ilmu sosial melainkan cerminan nilai-nilai normatif dan moral yang sangat nyata di tingkat individu dan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu.

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran tidak dapat dilepaskan dari paradigma pemban-

gunan yang berpusat pada masyarakat. Menurut pendekatan ini, setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, dan sekaligus memperluas pilihan dari setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan pelaku utama pembangunan. Pandangan tersebut muncul sebagai tanggapan atas keadaan kesenjangan yang muncul di dalam masyarakat.

Pemberdayaan senantiasa mempunyai dua pengertian yang saling terkait. Masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus "*diberdayakan*" dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang "*memberdayakan*". Kondisi ketidakberdayaan masyarakat telah banyak dibuktikan secara empirik dan diulas dari berbagai sudut pandang. Namun upaya pemberdayaan masyarakat yang diajukan mempunyai arah yang sama atau paling tidak mirip satu sama lain. Langkah tersebut pada intinya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap, konsisten, dan terus menerus.

Dalam kerangka pikiran di atas, upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap anggota masyarakat pasti memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Itu berarti bahwa tidak ada anggota masyarakat yang sama sekali tanpa daya. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi atau daya

yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang paling pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses ke sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi informasi, lapangan kerja, dan pasar. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, berarti upaya melindungi masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktur ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar dan dari ketergantungan kepada kemandirian.

Dengan memahami pembangunan sebagai perubahan struktur, upaya peningkatan kemampuan masyarakat, penguasaan teknologi dan pengumpulan modal yang benar merupakan kunci dari pengembangan ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang. Proses pengumpulan modal yang benar muncul dari dalam masyarakat sendiri dan untuk dinikmati masyarakat.

Kembali kepada hakikat pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam setiap upaya pemberdayaan baik yang dilaku-

kan pemertintah, dunia usaha maupun pihak yang peduli kepada masyarakat harus dipandang sebagai pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Menurut Sumodiningrat (1996), ada lima hal pokok untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat: *pertama*, bantuan dana sebagai modal usaha, *kedua*, pengembangan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat, *ketiga*, penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat, *keempat*, pelatihan bagi aparat dan masyarakat, dan *kelima*, penguatan kelembagaan sosial ekonomi rakyat

Perlu adanya perubahan yang mengubah setiap bantuan digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha. Kegiatan ekonomi yang tumbuh sebagai hasil dari pengelolaan bantuan harus menciptakan surplus yang dapat menggantikan bantuan tersebut. Surplus yang diciptakan dari kegiatan usaha merupakan awal dari pengumpulan modal rakyat. Dengan modal yang dipupuk dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan teknik produksi, dan meningkatkan produksi lain. Dengan demikian pembangunan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan hasilnya untuk rakyat dapat diwujudkan.

Ekonomi Kerakyatan dan atau Ekonomi Rakyat

Titik tolak yang paling mudah untuk memahami ekonomi kerakyatan dengan menguraikan makna kalimat

pertama yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.”

Secara substansial ekonomi kerakyatan sesungguhnya mencakup tiga hal sebagai berikut: *Pertama*, adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Dengan demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari hasil produksi nasional itu. Sebab itu, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 UUD 1945,

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kedua, adanya distribusi ke seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak ikut menikmati hasil produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Hal itu dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” *Ketiga*, pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berada di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakya-

tan, kedaulatan ekonomi harus berada di tangan rakyat dan bukan di tangan para pemilik modal sebagaimana dalam sistem ekonomi pasar neoliberal. Walaupun, kegiatan pembentukan produksi nasional dilakukan oleh para pemodal asing, kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pengawasan atau pengendalian masyarakat (Baswir, 2006).

Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu perlu digarispawahi. Sebab unsur tersebut yang mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam kepemilikan faktor-faktor produksi nasional, baik dalam bentuk modal material, modal intelektual, maupun modal institusional. Konsekuensi dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu adalah adanya kewajiban negara untuk secara sistematis mengupayakan agar kepemilikan ketiga jenis modal tersebut terdistribusi secara merata di tengah-tengah masyarakat.

Sehubungan dengan modal material, negara tidak hanya wajib menguasai cabang-cabang produksi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak (Pasal 33 ayat 2), atau menguasai bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3), tetapi negara juga wajib mengembangkan koperasi sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan Pancasila (Penjelasan Pasal 33 UUD 1945). Agar terpenuhinya modal intelektual, maka negara wajib menyelenggarakan pendidikan cuma-cuma bagi seluruh anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka

ekonomi kerakyatan, pendidikan bukanlah sebuah komoditas komersial untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sementara itu, sehubungan dengan modal institusional, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa negara wajib melindungi hak setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, hal itu tentu tidak hanya berlaku sehubungan dengan pembentukan serikat-serikat sosial dan politik, tetapi juga mencakup pembentukan serikat-serikat ekonomi. Bertolak dari uraian tersebut, secara keseluruhan tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui program pemberdayaan dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

Dalam kenyataannya, banyak pihak yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya ekonomi rakyat merupakan tulang punggung perekonomian lokal atau perdesaan bahkan nasional yang didalamnya tercakup usaha koperasi, informal, kecil, dan menengah. Ekonomi rakyat adalah riil. Terbukti, di dalamnya terdapat pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, pasar rakyat, tenaga kerja rakyat, industri rakyat, kerajinan rakyat, pertukangan rakyat, tambak rakyat dan berbagai jasa rakyat. Jelaslah bahwa sektor ekonomi rakyat tidak sepenuhnya identik dengan Usaha Kecil Menengah (UKM). Tidak seluruh kegiatan ekonomi rakyat, khususnya yang bersifat informal tradisional, tercakup dalam

UKM. Demikian pula tidak semua UKM, khususnya yang menengah, merupakan ekonomi rakyat. Sebagian dari UKM yang tercakup dalam sektor ekonomi rakyat adalah *grassroot-based* UKM. Menurut Yunanto (2005: 102), secara empirik ekonomi Indonesia sebenarnya berbasis ekonomi rakyat. Secara garis besar, ekonomi rakyat mencakup 99% dari total jumlah unit usaha (*business entity*), menyediakan sekitar 80 % kesempatan kerja, melakukan lebih dari 65% kegiatan distribusi, dan melakukan kegiatan produksi bagi sekitar 55% produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menghadapi tantangan “Global” yang menghadang masyarakat dan bangsa kita dan juga berbagai macam model kebijakan makro dari pemerintah dipandang perlu dan sangat mendesak bagi masyarakat untuk memahami ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi yang berisi kegiatan-kegiatan usaha ekonomi rakyat. Secara konsep Bayu Krisnamurti dalam Yunanto (2005: 98) memahami ekonomi rakyat dengan cara pandang demokrasi, yakni ekonomi rakyat adalah “demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. “Dari rakyat”, berarti kegiatan ekonomi berkaitan dengan penguasaan rakyat dan aksesibilitas rakyat terhadap sumberdaya ekonomi. Rakyat menguasai dan memiliki hak atas sumberdaya untuk mendukung kegiatan produktif dan konsumtifnya. Dalam hal ini, sumberdaya ekonomi yang dimaksud merupakan segala sumberdaya

yang dapat digunakan untuk menjalankan penghidupan, baik sumberdaya alam, modal, tenaga kerja, ketrampilan, pengetahuan, sumberdaya sosial, sumberdaya jaringan (*network*), dan informasi. “Oleh rakyat”, berarti proses produksi dan konsumsi dilakukan dan diputuskan oleh rakyat. Rakyat memiliki hak pengelolaan proses produktif dan konsumtif tersebut. Berkaitan dengan sumberdaya (produktif dan konsumtif), rakyat memiliki alternatif untuk memilih dan menentukan sistem pemanfaatan, seperti berapa banyak jumlah yang harus dimanfaatkan, siapa yang memanfaatkan, bagaimana proses pemanfaatannya, bagaimana menjaga kelestarian bagi proses pemanfaatan berikutnya, dan sebagainya. “Untuk rakyat”, berarti rakyat merupakan *bene-ficiaries* utama dari setiap kegiatan produksi dan konsumsi. Rakyat menerima manfaat, dan indikator kemanfaatan paling utama adalah kepentingan rakyat.

Sedangkan pandangan Mubyarto (2000: 19), ekonomi rakyat adalah landasan ekonomi nasional yang harus dilindungi dan dikembangkan menuju ketahanan ekonomi nasional yang handal dan tangguh. konsep ekonomi kerakyatan menurutnya adalah sistem atau seluk-beluk mengenai usaha-usaha ekonomi rakyat dan perannya dalam perekonomian nasional. Menurut Mubyarto (2000: 152-153), ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi (demokrasi) yang dioperasionalkan melalui pemihakan dan perlindungan penuh pada sektor ekonomi rakyat. Dari pemahaman konsep ekonomi rakyat di atas, maka jelaslah

bahwa inti pembangunan sesungguhnya adalah rakyat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, apabila ada pembangunan ekonomi yang memarjinalisasi rakyat, maka pembangunan semacam itu tentunya tidak sesuai konsep perekonomian negara Indonesia.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya keberpihakan masyarakat terhadap masyarakat lainya yang belum berkembang dan sangat membutuhkan untuk diberdayakan yang pada umumnya berada di daerah-daerah tertinggal atau kawasan-kawasan khusus. Pemihakan atau memberdayakan ekonomi rakyat tentunya meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor ekonomi yang digeluti oleh rakyat. Rakyat harus diberi kesempatan dan kemudahan untuk hidup melalui kegiatan-kegiatan ekonominya sebagai investasi dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, rakyat akan mampu memperjuangkan hak pemerataan (keadilan sosial) mereka sehingga dapat terjadi persamaan dengan tumbuhnya nilai tambah ekonomi atas usaha mereka sendiri.

Oleh karenanya, pemihakan kepada pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat menjadi keharusan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemihakan ini dilakukan dengan meningkatkan peran ekonomi masyarakat dalam per-

ekonomian lokal atau perdesaan maupun nasional. Sesuai dengan konsep Mubyarto dan Bayu Krisnamurti di atas maka bentuk kemungkinan alternatif langkah pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya lokal daerah adalah: *Pertama*, meningkatkan akses kesempatan terhadap hal-hal yang selama ini relatif kecil atau bahkan tertutup peluangnya untuk masyarakat ekonomi lemah, seperti akses terhadap aset produksi terutama tanah dan modal atau dana. Untuk meningkatkan akses terhadap permodalan diperlukan penyederhanaan prosedural untuk kredit jenis usaha rakyat. Berdasarkan keadaan empiris menunjukkan masih terdapat beberapa persyaratan masyarakat untuk memperoleh kredit yang terkesan rumit, sehingga menyebabkan sedikitnya interaksi masyarakat terhadap sumber permodalan tersebut. Kondisi demikian akan menyebabkan modal semakin terpuruk pada sektor modern, khususnya pada usaha besar. Selain dengan mempermudah persyaratan, pemerintah perlu meningkatkan peran swasta untuk mengembangkan berbagai pola perkreditan dan alokasi dana lainnya, seperti misalnya BPR, BPR-Syariah atau BMT dan lain sebagainya.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat posisi transaksi pada persaingan pasar dan kemitraan usaha antar pelaku ekonomi. Dalam kenyataannya, kekuatan rakyat sebagai produsen atau penjual dalam perekonomian masih sangat lemah. Contohnya, kegiatan usaha di sektor pertanian terutama dalam sistem agrobisnis dan agroindustri yang dikem-

bangkan belum sepenuhnya terpadu, terutama di tingkat produksi dan pemasaran. Antara pelaku usaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil berjalan sendiri-sendiri. Hal ini mengakibatkan petani kecil tidak banyak memperoleh manfaat dari hasil usahanya, karena harus berkompetisi dengan kelompok usaha besar dan menengah yang memiliki sumber daya dan kekuatan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka baik petani maupun rakyat kecil lainnya harus dibantu dalam memasarkan produk yang dihasilkan dalam usahanya. Pemerintah perlu untuk menyediakan informasi pasar mengenai kecenderungan permintaan pasar baik di dalam maupun internasional, harga sesuai dengan pangsa pasar, standar kualitas, dan standar mutu suatu produk. Bila hal ini dilakukan maka setiap kelompok usaha dapat bersaing untuk menyesuaikan dengan standar yang ada.

Beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan dengan mensinergikan potensi pelaku ekonomi yang kuat dan lemah. Sinergi ini dapat dilakukan dengan membentuk suatu jaringan usaha antara usaha besar dan usaha kecil. Jaringan usaha merupakan suatu sistem organisasi ekonomi yang mengatur koordinasi dan kerjasama antar unit, dan bukan suatu sistem pengintegrasian unit-unit usaha seperti dalam satu perusahaan –konglomerasi- yang cenderung memanfaatkan isyarat pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional. Pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh konglomerat saja, tetapi para pengusaha kecil

atau masyarakat ekonomi lemah lainnya. Dengan cara ini, pengusaha kecil dan masyarakat ekonomi lemah lainnya tidak hanya mendapat manfaat ekonomi, tetapi mereka mendapat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh pengusaha besar yang lebih memiliki peluang terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Ketiga, pemerintah perlu untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya dan penguasaan teknologi yang mengarah kepada wirausaha yang kompetitif termasuk dalam hal ini, dengan menumbuhkan semangat kerja dan jiwa entrepreneurship. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan inovasi yang memadukan potensi institusi publik melalui institusi pendidikan tinggi yang mempunyai basis ilmu dan teknologi. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan mengajak pengusaha menengah dan besar yang seharusnya memiliki kepedulian terhadap pengembangan pengusaha kecil. Dengan mengadakan kerjasama dan pembinaan untuk usah-usaha kecil baik di perdesaan maupun di perkotaan maka sumber daya manusia di tiap industri akan memiliki kemampuan yang seimbang. *Keempat*, pemerintah perlu menyusun peraturan perundangan yang melindungi, dan mendukung usaha kecil dan mikro. Menyusun dan mengimplementasikan undang-undang anti monopoli dan oligopoli. Beberapa peraturan dan undang-undang sudah disahkan namun sulit untuk melaksanakannya. Untuk itu perlu adanya tekad bersama untuk konsisten melaksanakan aturan tersebut.

Usaha ini dilakukan selain untuk memperkuat usaha rakyat dari segi hukum juga agar terjadi persaingan yang wajar, baik dalam arena pasar lokal maupun nasional bahkan internasional.

Pengembangan Ekonomi Mikro

Pengembangan ekonomi mikro yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah usaha kecil yang informal-tradisional dan usaha kecil menengah. Ekonomi mikro merupakan kegiatan usaha ekonomi rakyat sektor informal tradisional yang pada umumnya ada di perkotaan, sedangkan usaha kecil menengah ditafsirkan sebagai usaha ekonomi rakyat yang sebagian besar dimiliki oleh masyarakat petani yang ada di perdesaan. Kedua pemahaman ekonomi rakyat yang dimaksud merupakan bagian dari masyarakat yang belum berkembang ekonominya, serba memiliki keterbatasan faktor-faktor pendukung kegiatan usaha dan mereka inilah yang membutuhkan perhatian untuk diberdayakan. Dalam kehidupan perekonomian usaha kecil dan mikro merupakan jenis usaha ekonomi rakyat yang perlu memperoleh perhatian serius. Usaha kecil dan mikro terutama di tingkat masyarakat desa merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7% dan dalam sektor ekspor nonmigas 15%, namun usaha kecil menengah memberi kontribusi sekitar 99% dalam penyerapan tenaga kerja (*Kompas*, 14 Desember

2001. Pemberdayaan dan pengembangannya dapat dilakukan melalui strategi kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Namun, sebagian ada anggota masyarakat yang menaruh kepedulian sebagai pihak-pihak yang ikhlas memberdayakan ekonomi rakyat melalui penghimpunan dana BPR, BPR-Syariah.

Dalam pengembangan ekonomi mikro, konsep syariah dengan pendekatan/pola Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal Wattanwil (BMT) merupakan usaha kelompok swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil dan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Disamping itu, BLT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang keberadaannya menjadi sumber modal bagi para pengusaha mikro, dan menfokuskan diri melayani para pengusaha mikro. Dengan konsep ekonomi syariah, BLT tidak mendikotomikan antara sektor finansial dan sektor riil, sehingga setiap transaksi ekonomi pasti berimplikasi pada kegiatan produktif di sektor riil. Skema pembiayaan yang berbasis bagi hasil juga akan mengeliminasi adanya kerugian ekonomi pada salah satu pihak sehingga azas keadilan akan terjaga. Ekonomi syariah tidak mengenal aktivitas ekonomi berlandaskan transaksi derivatif yang mengandung unsur spekulasi (*Kedaulatan Rakyat*, 13 Juni 2009).

Konsep Syariah dengan pendekatan Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) sebagai lembaga keuangan mempunyai

peran yang strategis. Terbukti untuk saat ini keberadaannya diakui secara formal oleh pemerintah. Bahkan lembaga ini semakin diakui dengan adanya rancangan undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (RUU LKM). Rancangan undang-undang ini sedang disiapkan oleh Bank Indonesia bersama dengan kementerian keuangan.

Ruang lingkup kegiatan BMT (Baitul Maal Wattanwil) dapat dibedakan atas: *pertama*, kegiatan “bisnis” merupakan kegiatan utama, yang bertujuan membantu pengusaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan untuk dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Untuk mencapai tujuan dilakukan kegiatan-kegiatan: 1) menghimpun dana melalui simpanan pokok-khusus, simpanan wajib, simpanan suka rela dari para anggota; 2) memberikan pembiayaan usaha sesuai dengan penilaian kelayakan dan imbalan atas jasa berdasarkan “konsep bagi hasil” sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur; 3) mengelola usaha secara profesional; 4) mengembangkan usaha-usaha di sektor riil. *Kedua*, kegiatan sosial yang bertujuan menunjang kegiatan bisnis. Sehingga selain sebagai kegiatan bisnis BMT sebetulnya merupakan kegiatan sosial yang memiliki kepedulian untuk kelompok usaha kecil dan menengah.

Simpulan

Pemberdayaan ekonomi rakyat pada hakikatnya merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi

masyarakat yang belum berkembang atau belum maju sehingga masih harus diberdayakan. Pemberdayaan ekonomi menjadi tugas pemerintah dan semua warga masyarakat. Pemerintah perlu untuk meningkatkan pemberdayaan dalam upaya memacu kemandirian ekonomi masyarakat. Sedangkan sebagai warga masyarakat, diperlukan sikap keikhlasan dan kepeduliannya untuk memberdayakan masyarakat lainnya. Pemihakan kepada ekonomi rakyat merupakan tuntutan moral bangsa ini. Tanpa pemihakan kepada ekonomi rakyat, maka nasib rakyat dengan ekonomi tradisionalnya akan tetap terpinggirkan oleh ekonomi modern. Untuk itu, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan ekonomi yang mampu memberi dampak besar bahkan manfaat terhadap masyarakat yang ada di perdesaan. Masyarakat perdesaan merupakan potensi ekonomi yang besar karena memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya pembangunan lain yang melimpah.

Salah satu lembaga yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat adalah lembaga BMT. Konsep Syariah dengan pendekatan BMT sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang strategis. Terbukti untuk saat ini keberadaanya diakui secara formal oleh pemerintah. Bukti lainnya, lembaga ini dapat diterima masyarakat. Lembaga keuangan ini memiliki kemampuan untuk memfasilitasi upaya peningkatan ekonomi rakyat bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan memiliki masyarakat yang ekonominya

masih perlu diberdayakan dalam segala aspeknya.

Salah satu keunggulan BMT, sebagai lembaga bisnis namun lembaga ini juga merupakan lembaga sosial yang memiliki perhatian dan kepekaan yang tinggi pada lembaga keuangan mikro di perdesaan. Sebagai lembaga ekonomi yang memiliki konsep syariah tentunya sangat tepat untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya muslim. Sedangkan perhatiannya yang besar pada kelompok usaha kecil dan mikro akan besar manfaatnya bila diterapkan di perdesaan.

Daftar Pustaka

- Anonim. *Entaskan Kemiskinan Berdayakan UMKM*. Kedaulatan Rakyat, 30 Juni 2009.
- Baswir, Revrisond. 2006. *Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta, Makalah yang disampaikan dalam Sminar Bulanan Pustek (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan) UGM.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: MIT Press.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Edisi kedua. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sriyono, Jaka. Analisis Visi Ekonomi Syariah. *Kedaulatan Rakyat*, 13 Juni 2009.

Yunanto, Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.

Kemiskinan dan Konversi Minyak Tanah ke *Liquefield Petroleum Gas* (LPG)

Nelly Tiurmida

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Yogyakarta 55225 Telp. 0274-561971

Abstract

Poverty eradication has become the attention of many parties over the years. Ironically, poverty is still a problem in many developing countries, including Indonesia. The failure of the poverty eradication programs includes errors in determining strategies and public policies because the problem of poverty cannot be solved through short-term, partial, and sectoral policies. Strategy and public policy making requires adequate knowledge regarding the main causes of poverty. Besides, analysis needs to be done to evaluate the impacts of the implementation of public policies on the recognition, fulfillment, and protection of the fundamental rights of the poor. The high increase of world oil price and the large volume of oil consumed have resulted in fuel subsidy burden, which has forced the government to raise the subsidized fuel prices by 28,7% in May 2008 so that the fuel subsidies can be reduced. Associated with the reduction in fuel subsidies, the price of domestic fuel (kerosene) increases significantly and this had driven the government to convert kerosene to LPG. In this case, kerosene is the fuel most widely used by the poor and simultaneously reduces their spending burdens due to soaring crude oil prices.

Key words: poverty, conversion

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak selama ini. Ironisnya, kemiskinan masih menjadi masalah di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini di antaranya kekeliruan dalam penentuan strategi dan kebijakan publik, karena masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat sektoral, parsial, dan berjangka pendek. Pembuatan sebuah strategi dan kebijakan publik memerlukan pengetahuan yang memadai perihal penyebab utama kemiskinan, di samping itu analisis pun perlu dilakukan untuk menilai dampak pelaksanaan kebijakan publik terhadap penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat miskin. Perkembangan harga minyak dunia yang tinggi serta volume minyak yang besar telah menyebabkan beban subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mencukupi sehingga memaksa pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 28,7% pada Mei 2008 agar subsidi BBM dapat dikurangi. Terkait dengan pengurangan subsidi BBM, harga bahan bakar rumah tangga (minyak tanah) mengalami kenaikan yang cukup tinggi sehingga pemerintah memandang perlu mengambil kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Dalam hal ini, minyak tanah merupakan bahan bakar minyak yang paling banyak digunakan masyarakat miskin dan sekaligus dapat mengurangi beban belanjanya akibat melambungnya harga minyak bumi.

Kata-kata kunci: kemiskinan, konversi.

Pendahuluan

Isu kemiskinan akhir-akhir ini muncul kembali ke permukaan sebagai salah satu reaksi terhadap kenyataan bahwa perkembangan perekonomian dunia yang tidak berimbang telah menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi serta politik, baik antarnegara dan antardaerah maupun antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Persepsi masyarakat terhadap masalah kemiskinan lazimnya akan selalu mengarah pada upaya bagaimana dapat melepaskan diri dari kesulitan ekonomi yang kronis, walaupun terdapat pula warga masyarakat yang memandang kemiskinan sebagai suatu budaya kemiskinan dan pasrah sebagai suatu takdir yang menurun dari orang tua kepada anaknya.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah masalah kemiskinan dan langkah-langkah pemecahannya. Melalui sudut normatif, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan negara yang harus dipenuhi sehingga tujuan pembangunan nasional dapat pula dicapai. Dari sudut teknik, pengkajian terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan tidak dapat dipisahkan dengan paradigma pembangunan yang

menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, paradigma pembangunan pun menawarkan berbagai rumusan upaya penanggulangan kemiskinan yang paling sesuai atau paling mendekati kondisi kemiskinan yang sebenarnya.

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengahnya kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia (Suharto Edi, 2005: 131). SMERU menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri (Suharto *et al*, 2004: 7-8): 1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar; 2) ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi); 3) ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga); 4) kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal; 5) rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam; 6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat; 7) ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; 8) ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental; 9) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Terlebih sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang berkembang kemudian menjadi krisis multidimensi (krisis politik, sosial, dan ekonomi) yang memaksa Indonesia mencari tambahan pinjaman dari luar negeri. Dalam hubungan ini, makin meningkatnya jumlah utang tersebut, mengakibatkan beban rakyat kecil dan jumlah kelompok miskin semakin bertambah. Penanggulangan kemiskinan yang bersifat multidimensi tersebut memerlukan berbagai paradigma serta strategi perekonomian yang lebih prokaum miskin dan prokeadilan, menggunakan pola *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Bappenas (2005: 19) menyatakan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia masih didominasi kemiskinan di daerah perdesaan. Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 penduduk miskin di perdesaan diperkirakan 67% dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Jumlah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha diperkirakan sekitar 56,5%. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan, cenderung lebih tinggi daripada perkotaan. Masyarakat miskin perdesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja; belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan

hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga pokok yang dihasilkan. Di sisi lain, masalah kemiskinan di daerah perkotaan juga perlu mendapatkan perhatian. Krisis ekonomi tahun 1997 memperlihatkan masyarakat kota masih rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di perkotaan juga cenderung terus meningkat. Umumnya masyarakat miskin perkotaan menjalani pengalaman kemiskinan yang berbeda dengan penduduk miskin perdesaan. Mereka lebih sering mengalami keterisolasian dan perbedaan perlakuan dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan ruang berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta rasa aman dari tindak kekerasan. Umumnya masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal di pemukiman yang tidak sehat dan rentan terhadap penggusuran.

Kemiskinan memang merupakan persoalan yang kompleks sehingga berbagai faktor terlibat di dalamnya, seperti sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, kemiskinan, jika tidak ditanggulangi secara bersungguh-sungguh akan dapat menimbulkan kerawanan sosial politik, dan juga dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian negara.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pula diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan yang agak belakangan namun cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan lainnya, seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P4DT), dan seterusnya (Sulekale, Dalle. Daniel, 2003: 3). Digulirkannya program-program tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi sosial masyarakat, bahkan pascakrisis ekonomi yang terjadi pertengahan tahun 1997 pemerintah kembali menggulirkan program-program, seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), subsidi BBM dan Raskin (Suparjan, 2008: 2).

Selain itu, kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi. Problem kemiskinan merupakan bagian

dari masalah-masalah yang lebih besar yang harus diatasi secara bersungguh-sungguh, yakni ketimpangan antar sektor, antar wilayah, dan antar golongan. Dengan demikian, kemiskinan merupakan masalah nasional dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pembangunannya saja, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama segenap masyarakat secara keseluruhan. Walaupun kemiskinan bukanlah merupakan masalah baru karena lebih dari dua dasawarsa masalah ini telah dibahas secara nasional serta berbagai langkah dan kebijakan telah ditempuh untuk mengatasinya, namun akhir-akhir ini pembicaraan mengenai masalah kemiskinan muncul kembali sebagai topik diskusi di kalangan intelektual, praktisi maupun masyarakat seiring dengan laju krisis multidimensional yang melanda Indonesia.

Konsep dan Tolok Ukur Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang terdapat, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang. Apabila kemiskinan dimaksudkan sebagai situasi yang tidak memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok layak, sejarah kemiskinan mungkin seusia dengan sejarah umat manusia. Dalam hubungan ini, pengertian kebutuhan pokok dengan layak dimaksudkan perlu disesuaikan dengan sifat-sifat khusus etnis, masyarakat bahkan bangsa.

Sebagai misal, Amerika Serikat merupakan negara maju dengan tingkat

pendapatan nasional yang tinggi dan tergolong negara kaya namun masih terdapat kemiskinan pada sebagian penduduknya. Berkaitan dengan hal ini, Cahyono (2005: 36) mengatakan bahwa Presiden Lyndon B Johnson pernah menciptakan lembaga *Office of Economic Opportunity* dengan maksud untuk memerangi kemiskinan, yakni secara langsung mengkoordinasikan dan mengelola berbagai program untuk menghilangkan sebab-sebab kemiskinan. Terlepas dari berhasil atau kurang berhasilnya sesuatu program yang memerangi kemiskinan ini, pada hakikatnya kemiskinan merupakan masalah struktural; dan bukanlah hanya sekadar sebagai masalah penghasilan rendah atau tidak tercukupinya kebutuhan pokok pada sekelompok atau sebagian penduduk suatu negara, melainkan masalah yang berkaitan dengan proses dinamika masyarakat dalam upaya melepaskan diri dari belitan berbagai kesulitan ekonomi.

Oleh karena itu, masalah kemiskinan bukan hanya dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang yang sebagian besar penduduknya masih berpenghasilan rendah, tetapi juga dihadapi negara-negara yang sudah maju. Kesulitan dalam mengungkapkan fenomena kemiskinan sebagai realitas sosial dan upaya-upaya untuk mengentaskannya salah satunya disebabkan masih rancunya kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan tersebut secara konseptual. Kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar ma-

nusia yakni kebutuhan sandang, papan, pangan; kebutuhan untuk hidup yang sehat dan kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak. Secara operasional kriteria tersebut di atas dikaitkan dengan tolok ukur garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan kemiskinan, umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam empat dimensi yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

Sugiyanto (2008: 78-79) menyatakan keempat dimensi kemiskinan meliputi: *Pertama*, kemiskinan absolut, keadaan miskin yang disebabkan ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan atas batas kemiskinan dengan indikator tunggal atau komposit yang dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan dan pengeluaran). Dengan demikian, orang atau kelompok orang dikategorikan miskin jika kemampuan ekonominya di bawah garis kemiskinan. *Kedua*, kemiskinan relatif, keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Sebagai contoh, Pak Kardi memiliki pendapatan per bulan Rp. 1.000.000,00, tetapi pendapatan rata-rata masyarakat di wilayah Pak Kardi bertempat tinggal sebesar Rp. 1.250.000,00 dengan begitu Pak Kardi termasuk kategori miskin, meskipun Pak

Kardi dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan keluarga. *Ketiga*, kemiskinan kultural, bentuk kemiskinan kultural ditandai dengan sikap, gaya hidup, nilai, dan orientasi sosial budaya seseorang atau kelompok orang yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (modernitas). Indikator kemiskinan kultural antara lain sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi, berorientasi ke masa lalu dan tidak memiliki jiwa berwiraswasta, sulit diajak berpartisipasi, malas, dan boros. *Keempat*, kemiskinan struktural muncul akibat perbuatan manusia, seperti ketidakadilan struktur, baik struktur sosial, struktur politik, dan struktur ekonomi. Selain itu, bisa juga diakibatkan karena adanya distribusi aset ekonomi yang tidak adil, kolusi, korupsi dan tatanan ekonomi dunia cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Inti pembangunan ekonomi adalah menaikkan kesejahteraan hidup suatu masyarakat yang umumnya dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Keterkaitannya dengan pendapatan ini menjadikan kemiskinan sebagai masalah utama bagi negara, terutama negara berkembang. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengenalan teoritis tentang garis kemiskinan menjadi suatu titik awal yang terpenting. Siapakah penduduk miskin, di mana keberadaannya, pada kelompok-kelompok mana sajakah kemiskinan tersebut terlihat paling besar dapat dikenali secara cermat berdasarkan atas garis tersebut?

Penentuan terhadap siapa saja yang paling miskin di dalam suatu perekono-

mian diperlukan suatu garis kemiskinan. Seseorang maupun kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai golongan miskin, sedangkan yang berada di atas garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai tidak miskin. Garis kemiskinan ini dapat digambarkan dalam berbagai bentuk, seperti jumlah pendapatan dalam unit uang, atau jumlah konsumsi dalam unit uang, dan juga jumlah kalori per hari.

Batas garis kemiskinan yang dilihat dari jumlah kalori yang dikonsumsi seseorang adalah sebesar 2100 kalori per hari, sedangkan ukuran tingkat pendapatan angka-angkanya harus direvisi terus-menerus karena pengaruh inflasi.

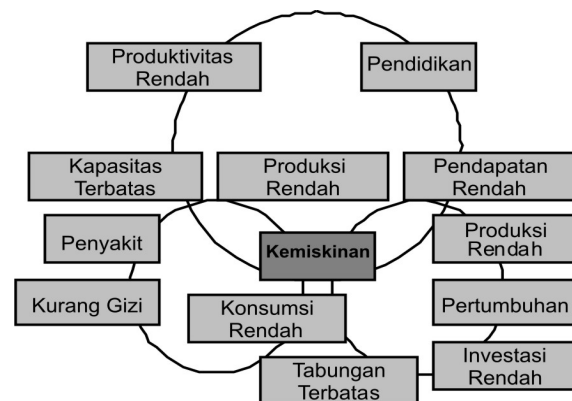
Di perkotaan tahun 1980 sebesar Rp 20.614,00 dan di perdesaan sebesar Rp 13.295,00; kemudian setelah direvisi BPS, tahun 1998 menjadi sebesar Rp 52.470,00 di perkotaan dan sebesar Rp 41.588,00 di perdesaan (Suparmoko, M, 2002: 198). Selanjutnya, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan (dihitung BPS berdasarkan atas garis kemiskinan) dari 16,7% (36,1 juta jiwa) pada 2004 menjadi 14,2% (32,5 juta jiwa) tahun 2009 (Nota Keuangan, 2010: 1-3).

Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan pemerintah untuk mengangkat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ke atas garis kemiskinan tersebut. Keberhasilan program pengentasan kemiskinan ini ditentukan pula oleh pemilihan yang tepat terhadap kelompok atau kategori yang harus didahulukan.

Kemiskinan dibedakan menjadi beberapa kategori (Ika Rahutami, 2002: 40), sebagai berikut: 1) Kemiskinan individu-kemiskinan kolektif. Kemiskinan individu adalah kemiskinan yang terjadi atau dialami oleh individu-individu secara pribadi, sedangkan kemiskinan kolektif adalah kemiskinan yang terjadi pada kelompok-kelompok orang dalam ikatan bersama; 2) Kemiskinan absolut-kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut menunjukkan indikator mengenai keadaan perekonomian suatu daerah yang sebagian penduduknya mendapatkan nafkah hanya dapat dipakai untuk memenuhi taraf kehidupan minimum, sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu kondisi walaupun pendapatan seseorang telah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya; 3) Kemiskinan kronis, kemiskinan sementara. Perbedaan kategori ini didasarkan pada kesempatan untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Orang-orang yang berpeluang tinggi untuk tetap miskin dalam jangka panjang dan mempunyai peluang kecil untuk lepas dari keadaan tersebut dikatakan sebagai "miskin kronis". Sementara itu orang-orang yang mempunyai cukup kesempatan untuk membebaskan diri dari kemiskinan, disebut sebagai "miskin sementara"; 4) Kemiskinan perdesaan-kemiskinan perkotaan. Kemiskinan ini dibedakan berdasarkan atas lokasi keberadaan penduduk miskin. Dalam kaitan ini, kemiskinan perkotaan kadangkala bersifat lebih kronis daripada kemiskinan pedesaan karena selain

masalah ekonomi terdapat pula masalah psikologis dan sosial, seperti ketidakstabilan dan ketidakamanan.

Memperhatikan beberapa pengertian kemiskinan tersebut di atas, pemecahan masalah kemiskinan perlu dikaji pada tempat kondisi kemiskinan itu berada agar berbagai penyebab kemiskinan ini dapat diketahui. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 tentang lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan Nuscheler (dalam Ika Rahutami, 2002: 41).



Gambar 1: Lingkaran setan kemiskinan

Lingkaran setan kemiskinan di atas merupakan lingkaran tidak berujung pangkal atau lingkaran setan kemiskinan ini mempunyai hubungan sebab-akibat antara satu dan lainnya berputar sehingga sulit diketahui ujungnya dan di mana pula pangkalnya. Unsur penyebab yang satu sebagai penyebab bagi yang lainnya, dan sulit diidentifikasi yang mana menjadi penyebab awal yang sesungguhnya itu. Misalnya, pendapatan rendah disebutkan tingkat produktivitas yang rendah sehingga tingkat tabungannya rendah.

Sedangkan tingkat investasi rendah disebabkan rendahnya tabungan, padahal rendahnya tingkat tabungan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya tingkat produktivitas. Demikian seterusnya, tidak terputus-putus sebagai lingkaran yang tak berujung pangkal.

Selanjutnya dapat pula dilihat keterkaitan hubungan antara kemiskinan dan konsumsi, kesehatan, pendidikan, produktivitas, produksi, investasi, dan tabungan yang rendah.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Isu kemiskinan sangat penting diperhatikan karena kemiskinan tidak hanya mengancam stabilitas politik dan sosial, tetapi juga mengancam kelangkaan sumberdaya alam. Oleh karena itu, upaya mengurangi kemiskinan selalu terus dirintis pemerintah. Pengamatan dan pengukuran gejala kemiskinan pun terus dilakukan dari waktu ke waktu dan berbagai program untuk menanggulangnya terus dirancang dan diimplementasikan. Agar program penanggulangan penduduk miskin tersebut dapat mencapai sasarannya, diperlukan penyebarluasan informasi tentang program tersebut, disediakan unit pengaduan masyarakat (UPM) yang berfungsi sebagai penanganan permasalahan dan melakukan penanganan pengaduan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program yang berasal dari komponen-komponen masyarakat yang terlibat secara independen.

Selanjutnya, program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, jika pelaksanaannya didasarkan atas lima prinsip: *pertama*, prinsip *transparency* yang mengharuskan program dapat diketahui oleh seluruh masyarakat secara mudah dan terbuka. *Kedua*, prinsip *accountability* yaitu setiap tahapan pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik teknis maupun administratif. *Ketiga*, prinsip *participation* yaitu masyarakat harus dapat berperan aktif pada seluruh tahapan kegiatan (mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestariannya). *Keempat*, prinsip *quick disbursement* yaitu penyaluran bantuan program harus cepat dan langsung kepada masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan. *Kelima*, prinsip *sustainable* yaitu kegiatan yang dihasilkan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat.

Upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan pada hakikatnya telah diselenggarakan melalui berbagai kebijakan dalam pembangunan yang memacu pertumbuhan ekonomi dan diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal tersebut dimaksudkan agar laju pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan tingkat kemiskinan secara bertahap, dengan berjalannya waktu masyarakat semakin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Dalam kaitan ini, diperlukan suatu strategi untuk memadukan berbagai ke-

bijaksanaan dan program yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah.

Dengan demikian, program-program pembangunan yang mengantisipasi kemungkinan semakin meluasnya kemiskinan harus selalu ditingkatkan, selain itu perlu dipahami pula bahwa program-program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, suatu lembaga atau badan atau sektor-sektor, namun menjadi tanggung jawab pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan tingkat desa. Selanjutnya, pelaksanaan program-program untuk mengatasi kemiskinan juga menjadi tanggung jawab masyarakat melalui partisipasi dan kegotongroyongannya untuk menyukseskan program-program tersebut.

Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut tertuang di dalam tiga arah kebijaksanaan: *pertama* kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, kebijaksanaan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan *ketiga*, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan (Ginanjari, 1996: 241-242).

Berhubungan dengan uraian di atas, nilai yang diciptakan oleh kebijakan diharapkan dapat mendorong pembentukan

inisiatif, mendorong kreativitas, menumbuhkan inspirasi, dan aspirasi masyarakat agar dapat tumbuh dengan kekuatan sendiri untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Dengan demikian, strategi yang perlu diperhatikan dalam melakukan kebijakan, *pertama*, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, mempermudah masyarakat miskin memperoleh akses dalam pendidikan, kesehatan, KB, air bersih, dan lain-lainnya. *Ketiga*, penyediaan fasilitas, misalnya fasilitas kredit untuk pembentukan modal di koperasi. Apabila kebijakan yang telah dibuat benar-benar diimplementasikan secara efektif dan efisien akan berdampak mengurangi tingkat kemiskinan.

Seiring dengan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa program penanggulangan kemiskinan, di antaranya Program IDT (Inpres Desa Tertinggal), Program JPS (Jaring Pengaman Sosial), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Sosial (Takesra-kukesra), Program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT).

Ika Rahutami (2002: 50) berpendapat bahwa program penanggulangan kemiskinan tersebut agar menjadi lebih efektif, perlu diperhatikan pula hal-hal sebagai berikut: 1) sektor publik memainkan perananan penting dalam pengurangan kemiskinan. Permasalahannya adalah kapasitas institusi lokal yang terlalu lemah dalam mengimplikasikan program-program intervensi un-

tuk mengurangi kemiskinan, meskipun komitmen pemerintah terhadap masalah ini sangat kuat. Dengan demikian, penguatan institusi lokal menjadi penting; 2) rendahnya akses informasi kepada penduduk miskin sehingga menyebabkan program dan kebijakan ekonomi lebih terfokus pada kelompok menengah yang memiliki akses yang lebih besar; 3) pemerintah harus melakukan diskursus dengan masyarakat miskin dalam posisi yang setara. Agar dapat mananggulangi kemiskinan, harus ada empati terhadap rakyat miskin, dan berbicara dengan kacamata rakyat miskin untuk melihat kemiskinan itu sendiri.

Konversi Minyak Tanah ke LPG

Energi yang berasal dari fosil, seperti minyak mentah, gas bumi, dan batu bara cenderung menipis dan makin lama semakin sulit memperolehnya sehingga harus dijaga ketersediaannya karena sumber energi ini tidak dapat diperbarui kembali. Energi fosil bagi sebuah negara sangat penting. Dapat dikatakan aktivitas semua negara, bahkan setiap orang dijamin akan berhenti jika tidak ada bensin, minyak tanah, avtur, terlebih bahan bakar pembangkitnya solar. Oleh karena itu, betapa pun tingginya harga minyak mentah, pasti akan diburu. Beberapa tahun terakhir ini, kesadaran terhadap keterbatasan energi fosil semakin meluas. Masyarakat Indonesia mulai paham jika bahan bakar minyak yang selama ini digunakan sesungguhnya sangat mahal. Keadaan ini menguat sejak program kon-

versi dari minyak tanah ke gas digulirkan. Ternyata, harga minyak tanah dapat murah karena subsidi (Infortal, 2009: 78). Keberadaan energi fosil sangat penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan industri, transportasi, penangkapan ikan, pembangkit tenaga listrik, dan rumah tangga sehingga perimbangan antara ekspor dan kebutuhan minyak dalam negeri selama ini tidak terhindar dari gejolak harga minyak dunia.

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah konsumen sehingga dapat mengurangi jatah ekspor minyak atau pengadaannya pun sebagian harus diimpor dan harus dibayar dengan harga pasar dan tingkat dunia yang selalu berfluktuasi. Kondisi pengadaan BBM nasional yang sangat memprihatinkan ini perlu disikapi secara bijaksana oleh semua pihak dan masyarakat sudah saatnya diberitahu secara jujur dan transparan tentang kondisi sesungguhnya yang dihadapi oleh sektor minyak dan gas bumi ini. BBM adalah komoditas strategis karena apa saja yang dikonsumsi atau dipakai adalah komoditas, seperti mobil, pangan, sandang, papan, dan prasarana jalan kesemuanya memerlukan energi untuk memproduksi serta mendistribusikannya ke berbagai tempat. Konsumsi BBM yang tinggi seiring dengan makin tingginya harga minyak menyebabkan beban subsidi juga membengkak.

Kenaikan harga minyak di pasaran internasional berdampak negatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belan-

ja Negara (APBN) karena beban subsidi BBM meningkat pula. Makin tinggi harga minyak dunia, semakin berat beban negara dalam memberikan subsidi berupa selisih harga minyak dunia dengan harga BBM yang diperdagangkan di dalam negeri. Inilah alasannya mengapa subsidi harus dikurangi (Usmansyah, 2006: 7). Akibat subsidi BBM membengkak, anggaran pembangunan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur fisik dan pertahanan harus dikorbankan, bahkan defisit yang terus membengkak akibat subsidi juga mengakibatkan pemerintah terus menambah utang. Saat harga minyak berkisar US 95 per barel, harga ekonomis minyak tanah sekitar Rp 5.000,00 per liter, tetapi Pertamina menjual minyak tanah ke pangkalan Rp 2000,00 per liter. Selisihnya itulah yang ditanggung pemerintah (Yuliawati, Sapto Pradityo, Venni Melyani, 2008: 97). Selanjutnya, pematokan harga minyak sebesar 95 dolar Amerika per barel dalam APBN 2008 beban subsidi BBM meningkat, yang semula Rp 45,8 triliun menjadi Rp 126,8 triliun (Baswir, 2009: 116).

Minyak dan gas mempunyai arti penting bagi pembangunan di samping sebagai sumber penerimaan ekspor juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam pembangunan itu sendiri. Indonesia sebagai negara pengekspor minyak, seharusnya ketika harga minyak melambung tinggi US \$120 per barel Indonesia dapat memperoleh keuntungan besar, namun bukannya keuntungan yang didapatkan Indonesia. Semua itu terjadi karena produksi minyak mentah

Indonesia terus mengalami penurunan, sebaliknya, konsumen bahan bakar minyak makin menanjak (Lambanraja, Anne L Handayani, dkk., 2008: 157). Produksi (*lifting*) minyak Indonesia juga terus menurun, sebaliknya impor minyak terus membumbung. Bahkan, Indonesia kini sudah masuk kategori pengimpor netto. Akibatnya, Indonesia tidak sepenuhnya dapat mengambil manfaat dari tingginya harga minyak dunia. Bahkan, Indonesia harus pontang-panting menyalasati membengkaknya subsidi (ES. Gunanto, Ghradi Grace S, dkk., 2008: 92).

Dengan demikian, posisi Indonesia menjadi *net oil importer* atau lebih banyak impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri daripada memproduksi minyak sendiri. Dalam urusan BBM, ekspor mencatat 154 ribu barel per hari dan impornya 330 ribu barel, artinya "tekor" 176 ribu barel (Kurniawan, 2005: 127).

Bobot minyak begitu besar dalam perekonomian memberikan pengaruh yang besar pula terhadap perekonomian nasional sehingga menghadapi kenaikan harga minyak dunia pemerintah berusaha mengambil beberapa langkah untuk mengurangi pengaruh kenaikan harga minyak dunia tersebut. Misalnya, menaikkan kembali produksi minyak, menaikkan harga jual minyak, membatasi pemakaian bensin dan solar serta minyak tanah. Menaikkan kembali produksi minyak dapat dilakukan dengan mencari ladang minyak baru, pembatasan pemakaian bensin dan solar bagi kendaraan yang akan menggunakan *smart card* (kartu pintar)

dan mengizinkan pemakaian minyak tanah dengan meneruskan program yang sudah berjalan melalui Kartu kendali, terbuka dengan sasaran warga miskin dan program konversi ke gas elpiji (Gunanto dan Muhammad Mufi, 2008: 106).

Di tengah melajunya proses pemiskinan, pemerintah menaikkan harga BBM, tidak dapat dihindari lagi kenaikan harga BBM ini akan mempercepat laju kemiskinan yang sudah berlangsung secara berkelanjutan. Terlebih, kenaikan harga minyak tanah yang sebagian besar konsumennya adalah kaum miskin, dan ini akan membuat kaum miskin semakin terhimpit oleh beratnya beban hidup yang harus dihadapinya. Oleh karena itu, minyak tanah merupakan bahan bakar yang paling banyak digunakan masyarakat, baik untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak dan penerangan maupun untuk usaha-usaha mikro lainnya, pasokan bahan bakar minyak tanah harus dibatasi, agar ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanah dapat dikurangi sekaligus dapat dilakukan penghematan subsidi BBM serta penghematan belanja setiap keluarga. Secara umum minyak tanah awalnya digunakan untuk memasak dan penerangan, kemudian berkembang untuk pemanas dan bahan bakar, atau semula hanya digunakan di sekitar rumah tangga kemudian dikembangkan ke sektor industri dan transportasi (Hasyim, 2005: 182). Pergeseran konsumsi minyak tanah ini membuat pengadaannya semakin meningkat pula sehingga perlu diambil langkah untuk menghemat penggunaan minyak tanah oleh masyarakat.

Langkah yang diambil pemerintah untuk menghemat penggunaan minyak tanah adalah mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas/elpiji pada bulan Mei 2007 dengan alasan untuk penghematan subsidi pemerintah sektor minyak tanah untuk rumah tangga yang diprediksikan membengkak sebagai akibat lonjakan harga minyak dunia yang terus melambung (Saragih, 2007). Konversi minyak tanah ke elpiji ini merupakan program kebijakan pemerintah untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak tanah ke gas (LPG) yang ditujukan kepada masyarakat miskin dengan cara membagikan secara cuma-cuma kompor gas, selang, regulator, dan tabung berisi gas seberat 3 kg. Program ini terbukti berhasil, sejak awal tahun 2008 pemerintah tidak mengimpor minyak tanah. Bahkan, sekarang berlebihan dan akan diekspor minyak mentah yang sebelumnya disuling menjadi minyak tanah, kini dikonversikan ke avtur. Dampaknya, avtur juga tidak pernah diimpor lagi sejak 2007. Program konversi ini jadi *role model* sebagai cara mengurangi subsidi BBM yang dapat dijalankan secara massal dan dampak positif lainnya yang langsung menyentuh masyarakat, yakni penghematan (Anonim, 2009: 87).

Selain bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM, terutama minyak tanah, melalui program konversi minyak tanah ke elpiji ternyata dapat pula mengurangi beban belanja masyarakat akibat melambungnya harga minyak dunia.

Simpulan

Memperhatikan uraian tersebut di atas, tampak bahwa kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh suatu negara, karena bersifat laten sekaligus aktual, contohnya negara Indonesia. Dalam menanggapi kemiskinan telah dilakukan upaya-upaya, sebagai misal, sejumlah dana dikeluarkan melalui berbagai kebijakan serta berbagai program juga telah diimplementasikan, namun demikian masih saja menjadi masalah yang harus dihadapi dalam pembangunan.

Oleh karena itu, komitmen pemerintah untuk mencapai tiga pilar pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan harus dilaksanakan secara komprehensif. Pilar promasyarakat miskin dilakukan dengan melaksanakan program untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satunya melalui program konversi penggunaan minyak tanah ke LPG. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat karena menggunakan LPG pengeluaran rumah tangga lebih dihemat daripada menggunakan minyak tanah.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2000. PDM – DKE. *Meretas Jalan Buat Si Miskin*. Info JPS. Jakarta: Pusat Informasi Nasional Jaringan Pengaman Sosial.
- . 2009. Program Konversi Jadi Acuan. *Tempo*, Edisi 9-15 November: 27.
- Baswir, Revrisond. 2009. *Kisruh Harga BBM. Dalam: Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyono, Yoyok. 2005. Suatu Tinjauan Masalah Kemiskinan dan Pembangunan dari Sudut Pandang Ilmu Ekonomi. *Lensa Jurnal Universitas Pramita Indonesia*. Jakarta: CIDES. Tahun 4. No.4: 35-41.
- Departemen Keuangan. 2010. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Gunanto, ES., Grace S Ghandi, dkk., 2008. Bila Target Terus di Awang-awang. *Tempo*. Edisi 24-30 Maret. Hlm. 92.
- , Muhammad Nafi. 2008. Maju Mundur Program Diet. *Tempo*. Edisi 25 Februari-2 Maret: 106.
- Hasyim, Ibrahim. 2005. *Soal Minyak Tanah. Dalam: BBM Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Inforial. 2009. Memperjuangkan Kedaulatan Energi di Indonesia. *Tempo*. Edisi 7-13 Desember: 78.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kurniawan, Stephanus S. 2005. Status yang Menghentikan Subsidi. *Tempo*. Edisi 6-12 Maret: 127.

- Lumbanraja, Sahala, Anne L Handayani. Munawaroh. 2008. Harga Naik Produksi Jeblok. *Tempo*. Edisi 28 April-4 Mei: 157.
- Rahutami, Ika. 2002. *Kemiskinan. Dalam: Mengurai Belitan Krisis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Saragih, Anita. 2007. Dampak Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas. *Saragih* 84@yahoo.com.
- Sekretariat Kelompok Pekerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)*. Bappenas: Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Sugiyanto. 2008. Kontribusi Lembaga dalam Mempersempit Kemiskinan di Perdesaan. *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif*. Volume IX. No.1: 77-45.
- Suharto, et al. 2004. *Menerapkan Pemandu. Dalam: Perlindungan Masyarakat Miskin Terpadu*. Bandung: SFKS Press
- Suharto, Edi. 2005. *Kemiskinan. Dalam: Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulekale, Dalle Daniel. 2003. Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Http://www.ekonomi rakyat. Org/edisi. 14/artikel-2htm*.
- Suparjan. 2008. Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan dalam Perspektif Pembangunan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif*. Volume IX. No. 1: 1-18.
- Suparmoko M. 2002. *Penghapusan Kemiskinan dan Ekonomi Kerakyatan dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Usmansyah. 2006. Subsidi dan PKPS. *Warta Pengawasan*. Volume XIII. No.1. Januari: 7.
- Yuliawati, Sapto Pradityo, Vennie Melyani. 2008. Injak Gas Konversi ke Gas. *Tempo*. Edisi 5-11: 97.

Potensi Kampung Prawirodirjan Gondomanan sebagai Kampung Wisata Eksotik

Oktarina Albizzia

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Yogyakarta, 55225 Telp. 0274-561971

Abstract

This study aimed at identifying the potentials of Kampung Prawirodirjan, Gondomanan District, Yogyakarta, which support the development of an exotic tourism village, to know how the forms of the community's participation in developing an exotic tourism village which has educational and cultural atmosphere and the society's awareness of the importance of maintaining cleanliness of the environment surrounding the watershed of Code River. The research method applied is a qualitative study using a descriptive analysis. The data collection techniques include observation, interviews and questionnaires. Kampung Prawirodirjan has the potentials to develop into a tourism village, i.e. the natural, educational, economic, geographical, and cultural potentials. The villagers still uphold the local culture like brotherhood values, collaboration (gotong royong) spirit, and the high spirit of education, as can be seen from the availability of simple libraries at the local guard posts and learning hours in the evening. The home industries in the kampung and the active participation of the community in preserving the environment and maintenance and enhancement of healthy living habits has helped preserve Kampung Prawirodirjan as a tourism village.

Key words: *tourism vilage, local culture, participation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki Kampung Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta yang mendukung terbentuknya kampung wisata eksotik. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan kampung wisata yang bernuansa pendidikan dan budaya serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar aliran Sungai Code. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan kuesioner. Kampung Prawirodirjan memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan menjadi kampung wisata diantaranya potensi alam, pendidikan, ekonomi, letak geografis, dan budaya. Aktivitas masyarakat perkampungan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong dan semangat pendidikan masyarakat yang tinggi dapat dilihat dari keberadaan perpustakaan komunitas dan pelaksanaan jam belajar di sore hari. Industri rumah tangga dan partisipasi masyarakatnya dalam menjaga lingkungan dan kebersihan akan menunjang pengembangan Kampung Prawiradirjan sebagai kampung wisata.

Kata-kata kunci: wisata kampung, kearifan lokal, partisipasi

Pendahuluan

Menurut data *World Tourism Organization* tahun 1994 pada abad ke-21 kepariwisataan akan menjadi salah satu kegiatan sosial ekonomi yang terpenting dan akan menjadi salah satu industri ekspor terbesar di dunia (Nugroho, 2001). Sayangnya kemajuan dunia pariwisata tidak dapat berdiri sendiri. Ada faktor-faktor lain yang turut berperan dalam mendukung kemajuan dunia pariwisata, diantaranya stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Di samping permasalahan itu semua industri pariwisata Yogyakarta pun mengalami hantaman hebat akibat guncangan gempa bumi dahsyat setahun lalu. Melihat permasalahan ini perlu kepedulian semua pihak untuk mengembalikan kemajuan dunia pariwisata khususnya di Yogyakarta.

Di tengah masih kuatnya arus pariwisata massal yang lebih bersifat artifisial dan cenderung menawarkan kepuasan ragawi, muncul kecenderungan pariwisata alternatif yang menawarkan ketenangan dan kesejukan jiwa (Nugroho, 2001). Jenis wisata alternatif dipandang lebih menyandarkan pada minat khusus dengan mengutamakan persinggungan penduduk dan budaya lokal. Dengan wisata alternatif misi persahabatan, perdamaian dan pemahaman *cross culture* dapat langsung tersampaikan. Wisata minat khusus pada dasarnya adalah suatu bentuk perjalanan wisata, yakni ketika wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat atau tujuan khusus mengenai sesuatu jenis objek atau kegiatan yang

dapat ditemui dan dilakukan di daerah tujuan wisata tersebut.

Melihat potensi wisata alternatif tersebut maka sangat tepat jika ini diterapkan di wilayah kota Yogyakarta yang *notabene* tidak memiliki daerah pantai atau pegunungan yang bisa menjadi obyek wisata unggulan, sebagaimana kabupaten-kabupaten lainnya di DIY. Pemerintah kota seharusnya lebih memikirkan pengembangan perkampungan-perkampungan yang ada di wilayahnya untuk dijadikan sebagai kampung wisata. Mengingat banyaknya perkampungan di Kota Yogyakarta yang memiliki sisi keunikan yang tak dapat ditemui di daerah lain, salah satunya adalah Kampung Prawirodirjan di Kecamatan Gondomanan.

Di sebelah timur Kampung Prawirodirjan terdapat aliran Sungai Code yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik seperti di Venesia, Italia, atau Sidney Australia. Namun, upaya menata Kali Code bukanlah perkara mudah. Upaya menjaga kebersihan lingkungan sungai haruslah bersifat menyeluruh dan partisipasi masyarakat menjadi jawaban kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih, karena saat ini kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sekitar Sungai Code masih relatif rendah, sehingga kawasan ini terkesan kumuh. Potensi lain yang dimiliki Kampung Prawirodirjan, adalah segala aktivitas perkampungan yang masih kental dengan suasana kekeluargaan dan gotong royong.

Suasana Kampung Prawirodirjan pun sangat kental dengan iklim yang mengedepankan pendidikan dan kebudayaan. Di beberapa gardu pos ronda terdapat perpustakaan mini yang menyediakan buku-buku bacaan untuk masyarakat. Bila di daerah lain seringkali keberadaan pos ronda dimanfaatkan sebagai tempat permainan judi maupun bentuk-bentuk permainan yang tidak mendidik, maka di Prawirodirjan yang terlihat justru aktivitas masyarakat yang sedang membaca buku. Jam belajar masyarakat pun tak sekadar berupa jargon namun, masyarakat benar-benar mempunyai komitmen yang tinggi untuk merealisasikan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Anak-anak belajar di bawah bimbingan kelompok belajar masyarakat yang difasilitasi oleh para pemuda kampung itu. Artinya, relasi antar generasi menjadi sangat fungsional, karena sistem sosial yang dibangun dalam masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik.

Meski demikian, potensi yang dimiliki Kampung Prawirodirjan ini masih memerlukan perhatian pemerintah setempat, agar aspirasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itulah, mengeksplorasi potensi yang dimiliki Kampung Prawirodirjan menjadi penting.

Untuk membangun kampung wisata, masyarakat dan pemerintah mempunyai peran yang sangat penting bahkan juga sebagai pemrakarsa karena pada hakikatnya, merekalah yang paling mengetahui kekuatan potensi lokal yang dimiliki lingkungan huniannya. Peran

pemerintah sebagai fasilitator untuk mensukseskan program-program yang dicanangkan oleh masyarakat setempat serta mengarahkan pembangunan yang diidamkannya secara lebih integral.

Pembangunan ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelompok masyarakat perkampungan dengan menggunakan modal sosial yang sudah menjadi ciri khas perkampungan Jawa, misalnya: kuatnya sistem gotong royong yang merupakan manifestasi dari solidaritas sosial yang tinggi.

Beberapa wilayah Yogyakarta yang telah menjadi objek kampung wisata, seperti Kota Gede, yang kental dengan nilai historis, kejayaan kerajaan Mataram dan merupakan pusat pengrajin perak di Yogyakarta. Di samping itu juga terdapat bangunan-bangunan bersejarah, Omah Dhuwur, Masjid Kota Gede dan makam para pembesar kerajaan Mataram, merupakan aset budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Sehingga wajar jika para wisatawan yang sedang berkunjung ke Kota Gede, seolah-olah mereka sedang menelusuri kota Yogyakarta tempo dulu dengan nuansa eksotik, keaslian struktur bangunan rumah dan otentisitas di perkampungan itu tidak banyak perubahan (Zamroni, 2007).

Lokasi yang bersebelahan dengan Malioboro dan Keraton sebagai pusat mangkalnya para turis lokal maupun mancanegara mampu mendatangkan sejumlah keuntungan tersendiri bagi warga sekitar, terlebih jika suatu perkampungan tersebut mempunyai daya tarik khas yang mampu menarik wisatawan untuk

berkunjung, secara teoritis akan terjadi *transfer of welfare* dari global ke lokal. Ini yang disebut sebagai *multiplayer effect*.

Gagasan untuk menciptakan suatu wilayah menjadi kampung wisata tentunya berdasarkan kelebihan yang spesifik dan khas di wilayah itu. Jenis wisata alternatif ini dipandang lebih menyandarkan pada minat khususnya dengan mengutamakan persinggungan penduduk dan budaya lokal. Di antara kelebihan-kelebihan tersebut yaitu: *Pertama*, pariwisata jenis ini merupakan tindakan berwisata yang lebih bertanggung jawab, karena yang dicari terutama bukan semata-mata kepuasan ragawi, seperti eksploitasi seksual, tetapi ketenangan, dan kesejukan jiwa menikmati nuansa eksotisme yang dimiliki oleh kampung tertentu. Kesadaran lingkungan dalam pengertian yang luas menjadi modal dasar untuk menarik minat wisatawan datang berkunjung, sehingga partisipasi masyarakat merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diganggu gugat. *Kedua*, kampung wisata mendorong warga untuk lebih mandiri. Dengan mendesain suatu perkampungan menjadi lokasi wisata tentunya akan mendongkrak perekonomian warga. Di samping itu, karena nilai jual yang dipertahankan adalah keunikan, karakter dan potensi lokal, maka kelestarian budaya lokal menjadi tanggung jawab seutuhnya pada penghuni demikian juga dalam mencegah terjadinya *deteriorasi ekologis*. Ekses negatif demoralisasi yang biasanya meresahkan masyarakat akibat industri

pariwisata mampu terproteksi dengan kekuatan dan kearifan budaya lokal sebagai sistem sosial yang melingkupi tatanan bermasyarakat. *Ketiga*, nuansa edukatifnya mendorong pemahaman *cross culture* yang disampaikan langsung pada masyarakat awam. Bertemunya warga dengan wisatawan merupakan bentuk interaksi sosial-budaya yang akan membuka cakrawala pengetahuan budaya orang lain secara lebih luas. Ini terwujud dalam gaya hidup dan kesadaran baru akan penghargaan yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai hubungan antar manusia.

Pendeknya, berawal dari gagasan menciptakan kampung wisata akan tercipta masyarakat mandiri secara sosial, ekonomi dan selalu menjaga kelestarian budaya lokal dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Masyarakat juga didorong untuk lebih kreatif dalam membaca peluang usaha yang mampu mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan warga secara keseluruhan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi berbagai industri wisata eksotis di wilayah Kampung Prawirodirjan yang berbasis pada modal sosial dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Di samping itu, berusaha untuk menganalisis nilai-nilai tempo dulu yang bisa dikembangkan sebagai alternatif wisata budaya dalam suasana kampung Jawa di wilayah Prawirodirjan. Selanjutnya mendeskripsikan peran warga dalam mengembangkan wisata kampung di Prawirodirjan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari satuan-satuan yang ada dalam komunitas yang terlibat. Kerangka kerja yang dibangun adalah logika induktif dengan alasan gejala yang diteliti lebih merupakan gejala sosial yang dinamis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis yang berusaha memahami makna peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu (Muhajir, 1998:13).

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi atau pengamatan dan wawancara. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui aktivitas sosial sehari-hari, kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi, pengembangan pendidikan dan budaya masyarakat. Pengamatan dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai aktivitas maupun komunikasi intensif atau perbincangan-perbincangan tertentu yang dilakukan masyarakat Kampung Prawirodirjan.

Berdasarkan pengamatan tersebut kemudian penggalan data akan diperdalam dengan serangkaian wawancara secara terstruktur dengan menggunakan *interview guide*. Narasumber dipilih secara purposif sesuai dengan tujuan penelitian. Pada waktu melakukan wawancara tidak terkesan kaku, tetapi dibiarkan mengalir sesuai dengan situasi dan kondisi infor-

man yang sedang diwawancarai yang kemudian diperkuat dengan penyebaran kuesioner untuk *cross check* data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka beberapa potensi yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: potensi alam, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Bila dilihat dari potensi alam, Kampung Prawirodirjan memiliki potensi alam yang cukup bisa dikembangkan menjadi obyek pariwisata. Sebelah timur kampung adalah Sungai Code yang merupakan terusan dari Sungai Boyong yang berhulu dari gunung Merapi. Sungai Code yang ada di Prawirodirjan memiliki grojokan dengan pemandangan dan suara yang indah memikat. Inilah yang menjadi keunikan tersendiri dibanding aliran Sungai Code di daerah lainnya. Sungai di Prawirodirjan ini layak dikembangkan menjadi "kali wisata".

Selain itu, pengembangan sungai di Prawirodirjan ini sangat bermanfaat demi menciptakan lingkungan kota dengan standar ekologi berimbang, mengingat lahan kota yang luasnya 32,25 kilometer persegi dengan lebih dari 90% lahan non persawahan, dengan perhitungan demikian, idealnya untuk menciptakan keseimbangan lingkungan dan memenuhi standar hidro-orologi (fungsi tata air), udara yang sehat, resapan air, nilai flora dan fauna, dan penyangga terhadap ancaman erosi, pencemaran udara, tanah dan air minimal terdapat

30% penutupan lahan dengan vegetasi pohon pada satu daerah aliran sungai (Moh. Jauhar Al-Hakimi, rubrik Forum Kompas edisi 21 November 2007).

Dilihat dari potensi ekonomi, masyarakat di perkampungan Prawirodirjan sebagian besar mengandalkan hidup mereka dengan berwiraswata, baik sebagai pedagang kecil atau produsen *home industry*. Jenis *home industry* yang ada di kampung Prawirodirjan sendiri cukup beragam, diantaranya: *home industry* bidang kuliner/makanan dan minuman dan kerajinan tangan. *Home industry* dari jenis ini yang cukup stabil adalah sirup "TBH" mulai memproduksi semenjak tahun 1949 dengan pangsa pasar nasional, namun pasar terbesar adalah wilayah Yogyakarta sendiri. Belakangan produsen *home industry* ini dengan dibantu anggota keluarga, mereka memekarkan usahanya dengan beragam produksi semisal kecap "Ahli Masak", saus tomat, bakmi dan sebagainya. Produsen madu "Serangga Emas" yang telah berdiri sejak tahun 1980. Selain sirup TBH ada juga *home industry* yang berkonsentrasi pada usaha pengumpulan madu lebah "Serangga Emas" yang telah berdiri sejak tahun 1980. Terdapat juga beberapa produsen makanan kecil seperti Bakpia yang konon rasanya lebih enak daripada yang diproduksi di daerah Pathok. *Home industry* lainnya yang bergerak di bidang ini masih bersifat fluktuatif, ada yang muncul dan lainnya tenggelam.

Kerajinan tangan dan souvenir. *Home industry* di bidang ini antara lain: "Pensil Terbang" dengan fokus utaman-

ya pada kreasi lilin hias. Usaha ini telah berjalan selama 10 tahun dan memiliki 8 cabang yang berpusat di kampung Prawirodirjan. Selain itu ada juga "Kate Mas" yang memproduksi berbagai kerajinan tangan dengan bahan dasar tempurung kelapa, akar wangi, rotan dan sebagainya. Usaha "Kate Mas" ini pun telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, sebelum tahun 1997 usaha keluarga ini sudah berdiri namun masih terfokus pada bahan dasar kulit.

Beberapa usaha lain, produk kuningan dengan label produk "Niki". Dengan bahan dasar kuningan ini bisa dibuat beragam macam barang misalnya engsel pintu. Usaha pembuatan pigura dengan bendera "B. Gilang". Usaha kerajinan lainnya yaitu kerajinan dari sayur gambas, namun usaha ini masih belum stabil, hanya memproduksi jika ada pemesanan. Di samping itu, juga terdapat beberapa *home industry* penyamakan kulit, namun seiring dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekarang hanya tinggal satu pabrik saja, yaitu CV. Sapta Tunggal.

Bila dilihat dari potensi pendidikan, kesadaran masyarakat Prawirodirjan akan pentingnya pendidikan sudah cukup baik. Ini bisa dilihat dari partisipasi masyarakat mewujudkan wajib belajar 9 tahun. Meski belum banyak masyarakat yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke Perguruan Tinggi, namun mayoritas masyarakat Kampung Prawirodirjan minimal mampu lulus SLTA. Berdasarkan laporan monografi kelurahan tahun 2006, sebanyak 69,2%

warga lulus SLTA, 14% lulus SLTP, 4,88% lulus Diploma dan 4,68% lulus Sarjana. Ini berarti hanya 7,1% warga yang lulus dibawah jenjang SLTP. Selain sekolah formal di kampung Prawirodirjan ada juga Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM), program PKBM.

Untuk potensi kesenian dan budaya masyarakat Kampung Prawirodirjan sebenarnya cukup banyak. Di kelurahan Prawirodirjan sendiri terdapat dua kelompok paduan suara, satu kelompok orkes melayu, enam kelompok kesenian daerah, dua kelompok band remaja, empat kelompok seni keroncong, dan dua kelompok seni kasidah. Namun, kelompok-kelompok kesenian tradisional tersebut yang masih eksis hingga kini hanyalah kesenian kasidah saja. Kelompok kesenian tradisional lainnya terancam punah.

Selain bermanfaat untuk keseimbangan lingkungan, pengembangan kali wisata ini dapat berdampak positif untuk kehidupan masyarakat. Beberapa fungsi tersebut diantaranya: *Pertama*, fungsi dan manfaat sungai lebih bisa dioptimalkan untuk kepentingan ekonomis dan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, industri rumah tangga yang ada di Prawirodirjan dapat lebih berkembang. *Ketiga*, kegiatan ini akan mendorong masyarakat proaktif untuk menjaga kebersihan lingkungan sehingga dengan demikian kesehatan masyarakat setempat lebih terjamin.

Adapun problem yang dihadapi untuk mengembangkan "kali wisata" ini adalah kondisi Sungai Code di Prawirodirjan sendiri saat ini masih terkesan kotor dan kumuh, sama seperti aliran Sungai Code

di daerah lainnya. Namun kondisi ini sudah lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Mayoritas masyarakat telah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai mereka demi kenyamanan mereka sendiri. Ini terbukti dari presentase angket yang menyebutkan 90,91 persen masyarakat Prawirodirjan setiap hari membuang sampah di tempat pembuangan sampah, dan hanya 6,82 persen yang menyebutkan masih membuang sampah di sungai. Masyarakat Prawirodirjan telah dibiasakan membuang sampah di tempat sampah yang ada di rumah masing-masing untuk kemudian diambil oleh petugas kebersihan ke tempat pembuangan sampah akhir.

Di samping itu juga terjadi pendangkalan arus sungai sehingga terlihat seperti ada pulau-pulau kecil pada aliran sungai. Sebenarnya pendangkalan seperti ini bisa diatasi dengan upaya pengerukan dengan alat-alat berat. Akan tetapi pengerukan yang dilakukan hanya sebatas penambangan pasir yang dilakukan oleh warga untuk kepentingan ekonomi, bukan kepentingan memperindah dan melestarikan alam. Sayangnya karena aktivitas penambangan pasir ini justru mengakibatkan sungai terlihat semakin kotor karena pasir-pasir yang dikeruk sebelum dijual dimasukkan dalam karung yang diletakkan begitu saja di sungai.

Berangkat dari permasalahan ini maka upaya untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan agar lokasi ini layak dikembangkan menjadi lokasi wisata menjadi suatu keha-

rusan. Kesadaran ini tidak hanya untuk masyarakat Prawirodirjan yang berada di sebelah barat sungai dan masyarakat Wirogunan yang berada di sebelah timur sungai, namun juga masyarakat sepanjang Sungai Code lainnya. Membentuk kesadaran masyarakat memang tidaklah mudah namun bukan berarti itu menjadi suatu yang mustahil.

Pada sektor *home industry* masalah yang melilit para pemilik industri untuk mengembangkan usahanya adalah faktor permodalan. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang kami sebar, mereka berpendapat bahwa modal sangat penting untuk memulai, mengembangkan dan juga mempertahankan usaha. Seperti yang dialami produsen souvenir "Kate Mas". Produsen usaha ini tidak mampu meminjam modal bank dengan alasan tidak memiliki jaminan, selain itu mereka juga keberatan dengan bunga bank yang tinggi. Sedangkan bantuan dari koperasi pun tidak pernah mereka peroleh. Tuntutan koperasi selama ini tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yang mengharuskan adanya jaminan dan bunga yang masih dirasa cukup memberatkan. Sebenarnya usaha mereka tidak pernah mengalami kesulitan pemasaran. Permasalahannya adalah pesanan atau order yang masuk, baik partai kecil atau besar, dari dalam negeri atau luar negeri, hanya membayar uang muka sebesar 30 persen. Para perajin kerepotan mencari tambahan modal untuk memenuhi pesanan tersebut. Akibatnya usaha mereka tidak berani lebih *go public* lagi karena meski

mendapat order kelas kakap pun mereka tetap kesulitan menghadapi persoalan permodalan. Kesulitan ini sedikit terbantu dengan bekerja sama dengan pihak *buyer agent*. Biasanya pihak *buyer agent*-lah yang memberi order sekaligus membantu *nalangi* modal. Bantuan-bantuan pemerintah untuk usaha kecil pun seringkali salah sasaran dan tidak merata. Sedangkan koperasi seperti ini belum menunjukkan peran yang nyata dalam membantu pengembangan ekonomi rakyat. agaknya kurang berperan dalam membantu industri kecil.

Dari hasil penelitian tentang pendidikan informal yang mempunyai daya tarik tersendiri, bisa dianalisis sebagai berikut: program Kejar paket A, B dan C, koran dinding sebagai fasilitas penunjang pendidikan, bimbingan belajar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan perpustakaan komunitas.

Awalnya, pelaksanaan Program Kejar Paket A, B dan C di Prawirodirjan masih berjalan baik. Namun, untuk saat ini karena masyarakat yang buta huruf hampir tidak ada maka informasi tentang kejar paket menjadi kurang diminati masyarakat. Sebelum ada peraturan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun, memang masih banyak masyarakat yang hanya lulus Sekolah Dasar. Untuk masyarakat yang putus sekolah disediakan Program Kejar Paket A sampai Paket C. Pada umumnya, peserta kejar paket A dan B adalah para orang tua. Banyak pula para orang tua yang mulanya mengikuti program kejar paket, namun tidak melanjutkan hingga

tuntas. Alasan yang mereka kemukakan adalah karena jenuh dan lebih memeningkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Keberadaan koran dinding sebagai fasilitas penunjang pendidikan yang ada di kampung cukup bermanfaat. Masyarakat kampung ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, minat mereka untuk mengikuti informasi terkini pun cukup tinggi. Ini bisa dilihat dari obrolan mereka sehari-hari. Informasi yang mereka dapatkan dapat diakses dari televisi yang dimiliki hampir semua masyarakat, koran dinding yang disediakan di setiap RW. Fasilitas koran dinding yang ada di setiap RW cukup membantu warga mendapatkan informasi dan wawasan.

Keberadaan bimbingan belajar di kampung ini berjalan baik. Walaupun masih belum memenuhi harapan yakni diadakannya bimbingan belajar setiap malam hari di setiap RW. Program ini dapat membantu anak-anak usia sekolah untuk menunjang prestasi sekolah formal mereka. Namun kenyataannya tidak semua RW dapat menjalankan program ini. Faktor penyebabnya antara lain karena kurangnya tenaga yang memiliki komitmen serta kompeten dalam bidang pendidikan. Untuk saat ini, para pemuda sudah proaktif untuk merealisasikan program yang sudah dicanangkan tersebut. Sehingga dari kerjasama yang baik tersebut nantinya program yang sudah dicanangkan di setiap RW itu akan terealisasi. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diadakan di setiap RW di Prawirodirjan. Kebutuhan menyangkut penyelengga-

raan program ini sepenuhnya ditanggung pihak penyelenggara yang diperoleh dari dana bantuan pemerintah dan swadaya masyarakat. Peserta PAUD tidak dibebankan biaya apa pun. Kegiatan ini sangat bermanfaat, di samping untuk menanamkan pendidikan anak sejak dini juga sebagai ajang para anak dan orang tua bersosialisasi. Para orang tua pun bisa bertukar informasi mengenai pendidikan anak. Pendidikan memang sangat penting, terutama pendidikan agama, karena proses internalisasi nilai-nilai agama lebih mudah ditransformasikan pada usia anak sehingga mampu membentuk kata hati sebagai landasan hidup pada usia selanjutnya. Nilai-nilai agama akan mampu membentengi diri dan membentuk moralitas yang elegan.

Perpustakaan komunitas di Prawirodirjan ada satu yaitu perpustakaan yang berada di RW 16. Tempat perpustakaan komunitas ini memanfaatkan pos ronda RW 16. Pos ronda yang sekaligus sebagai perpustakaan ini menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat RW 16. Di tempat ini masyarakat menyalurkan hobi membaca, penyelenggaraan bimbingan belajar malam hari, selain itu juga sebagai tempat *workshop* atau pelatihan dan lomba-lomba. Perpustakaan ini berdiri sejak tahun 2005, dengan koleksi buku yang dimiliki baru mencapai 300 buku. Namun, dalam waktu dekat ini koleksi perpustakaan akan bertambah dengan adanya bantuan dari pemerintah kota. Meski saat ini koleksi buku masih terbatas namun minat masyarakat terutama anak-anak usia SD dan SMP untuk me-

manfaatkan koleksi buku yang ada cukup tinggi. Pelatihan, lomba atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan pihak penyelenggara perpustakaan ini cukup beragam. Dengan pilihan program kegiatan berdasarkan usia dan kebutuhan masyarakat. Ada yang diperuntukan untuk para ibu, bapak-bapak, remaja, anak-anak usia sekolah hingga balita.

Keberadaan perpustakaan komunitas dan segala kegiatannya ini layak menjadi contoh bagi RW lainnya untuk mengembangkan kegiatan serupa. Harapan para pegiat perpustakaan komunitas, tempat ini tidak hanya sekadar ingin menyediakan ruang baca, namun juga menumbuhkan dan mengembangkan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat, mereka pun berharap dapat menciptakan dan mengembangkan iklim kebiasaan yang positif bagi masyarakat. Di sinilah nilai-nilai positif ditularkan.

Kebiasaan positif diharapkan dapat menggantikan kebiasaan buruk di masyarakat, semisal kegiatan di pos ronda yang umumnya dihabiskan dengan minum-minuman keras, main kartu/berjudi dan sebagainya. Pengembangan perpustakaan komunitas ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pusat belajar masyarakat, sehingga impian membangun masyarakat yang berpendidikan dan berbudaya dapat menjadi kenyataan. Upaya untuk mengembangkan masyarakat yang berpendidikan dan berbudaya akan meredam efek-efek negatif Kampung Prawirodirjan menjadi kampung wisata. Sehingga bila dikaitkan dengan keinginan menjadikan kam-

pung ini sebagai kampung wisata maka diharapkan nantinya akan mewujudkan lingkungan wisata yang berbudaya.

Kampung Prawirodirjan saat ini sedang mengalami kemunduran kesenian dan budaya. Beberapa faktor yang mengakibatkan semakin terpinggirnnya kesenian dan budaya, adalah: a) minimnya dana bantuan dari pemerintah atau pun pihak swasta untuk pengembangan dan pemberdayaan kelompok kesenian ini. Mereka yang berhasil bertahan lebih disebabkan karena kegiatan berkesenian yang mereka lakukan hanya untuk penyaluran hobi saja dan sebagai "profesi sampingan". Kelompok seni yang tidak mampu bertahan mengalami kesulitan dana untuk membiayai biaya latihan mereka, pengadaan dan perawatan alat-alat seni mereka. b) Minimnya kesempatan mereka untuk bereskreasi dan menunjukkan diri. Tentu mereka tidak dapat bertahan, jika mereka hanya latihan dan kesempatan untuk pentas atau menunjukkan diri tidak pernah mereka dapatkan.

Potensi-potensi yang dimiliki Kampung Prawirodirjan bila dilihat dari teori tentang wisata alternatif, maka Kampung Prawirodirjan ini memiliki potensi yang sangat mungkin dikembangkan. Sesuai dengan konsep Nugroho (2002) pengembangan wisata alternatif dengan konsep kampung wisata sangat tepat untuk pariwisata di wilayah Yogyakarta. Pemerintah daerah dapat memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan serta menghidupkan kampung wisata ini.

Simpulan

Beberapa obyek wisata dapat dikembangkan di Kampung Prawirodirjan untuk menjadi kampung wisata. Salah satunya dengan pengembangan obyek sungai di sepanjang Code. Jika wisata kali di Kampung Prawirodirjan dapat diwujudkan, maka selain dapat menjaga keseimbangan lingkungan kota, juga dapat membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga. Di samping itu, industri rumah tangga juga perlu didorong agar lebih maju lagi oleh pemerintah. Pemerintah perlu mendukung koperasi sehingga dapat membantu industri kecil pada permodalan.

Selain itu, pemerintah dan masyarakat setempat dapat bersama-sama mengembangkan kesenian dan budaya tradisional. Pemerintah dapat menarik penanam modal untuk berpartisipasi dalam mengelola obyek wisata. Pihak pengelola tempat hiburan atau restoran menyediakan tempat bagi warga menunjukkan kemampuannya dalam berkesenian. Pada akhirnya Kota Yogyakarta sebagai kota wisata yang berbudaya diharapkan mampu terwujud di Kampung Prawirodirjan ini dengan kegiatan-kegiatan pendidikan misalnya, yang dikembangkan RW 16

dengan perpustakaan komunitas yang menjadi pusat informasi dan belajar masyarakat, sebagai *filter* efek negatif budaya manca yang datang. Sehingga meskipun menjadi kampung wisata namun tetap mampu melestarikan kearifan budaya lokal.

Daftar Pustaka

- Khairuddin, H. 1995. *Filsafat Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Jauhar Al-Hakimi. 21 November 2007. *Kompas*: Forum Kompas
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nugroho Heru. 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, (ed), 2002. *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta*. Jakarta: Center for Critical Social Studies dan Forum Bulaksumur School of Thought.
- Zamroni, M. Imam. 5 November 2007. *Menggagas Kampung Wisata. Harian Kedaulatan Rakyat*: 8.

Kebijakan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Gambut di Kalimantan Tengah

Kisno Hadi

Kampus Tunjung Nyaho Jl. Damang Salilah I Gedung F, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Universitas Palangkaraya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Email: kisnohadi69@yahoo.co.id

Abstract

There are two kinds of disasters in Kalimantan: floods in the rainy season and peat moss forest fires in the dry season. Both of the disasters, which happen every year, are caused by human and inappropriate policy in exploiting natural resources. Concerning peat moss forest fires in Central Kalimantan, the global climate change issue has driven the local government to cope with the problems seriously in recent years. This study aims to find out what the correlation between peat moss forest fires and global climate change is and how the local government's policies overcome peat moss forest fires. There are two goals to achieve, namely 1) to find out the correlation between peat moss forest fires and global climate change; 2) to find out local government policies on disaster mitigation of peat moss forest fires and how private people's and Dayak society's support to the policies is. The method applied is descriptive qualitative by using observation data, documents, and interviews. The analysis uses an institutional approach, a model of policy studies. The research discovers that 1) there is a significant correlation between peat moss forest fires and climate change, i.e. peat moss forest fires happen because of human errors and lack of protection from the government; 2) local government has made the necessary policies on disaster mitigation of peat moss forest fires in cooperation with private people and Dayak society.

Keywords: *peat moss forest fires, climate change, disaster mitigation, community roles.*

Abstrak

Terdapat dua macam bencana yang terjadi di Kalimantan, yaitu banjir di musim hujan serta kebakaran hutan gambut di musim kemarau. Bencana yang terjadi setiap tahun itu akibat ulah manusia serta kesalahan kebijakan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Untuk bencana kebakaran hutan gambut di Kalimantan Tengah, menyebarnya isu perubahan iklim global telah membuat pemerintah daerah tergerak menanggulangnya dalam beberapa tahun terakhir. Apa korelasi kebakaran hutan gambut dengan perubahan iklim global dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah menanggulangnya, merupakan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Ada dua tujuan yang hendak dicapai, 1) mengetahui kerelasi kebakaran hutan gambut dengan perubahan iklim global; 2) mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana kebakaran hutan gambut serta bagaimana dukungan swasta dan masyarakat Dayak terhadap kebijakan itu. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data observasi, dokumen, dan interview. Analisisnya menggunakan pendekatan kelembagaan yang merupakan salah satu model dalam studi kebijakan. Hasil penelitian menemukan, 1) ada korelasi signifikan antara kebakaran hutan gambut dengan perubahan iklim, di mana kebakaran hutan

gambut terjadi akibat ulah manusia dan minimnya proteksi dari pemerintah daerah; 2) pemerintah daerah telah membuat kebijakan mitigasi bencana kebakaran hutan gambut dengan melakukan kerjasama dengan swasta dan masyarakat lokal Dayak.

Kata-Kata Kunci: kebakaran hutan gambut, perubahan iklim, mitigasi bencana, peran masyarakat.

Pendahuluan

Tulisan Walter North (Koran Tempo, 28 November 2009, A8) tentang "Pemanasan Global: dari Komitmen ke Tindakan" menarik untuk didiskusikan lebih mendalam berkaitan dengan pidato. Presiden SBY pada pertemuan G-20 di Pittsburgh 29 September 2009. North menulis "Indonesia bertekad mengurangi emisi yang menyebabkan perubahan iklim global sebesar 26% tanpa bantuan internasional tahun 2020 dan menurunkan lagi 41% dengan bantuan internasional." North diantaranya bertanya "apa yang perlu diwujudkan untuk memenuhi janji penurunan emisi 26% dan 41% itu"? Fokus kita menurut North "(diantaranya) mesti tertuju pada penyumbang emisi terbesar yaitu kebakaran hutan dan lahan gambut."

Menarik mengaitkan pandangan North dengan posisi pulau Kalimantan yang dilanda oleh dua jenis bencana yaitu kebakaran hutan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Kehadiran bencana kebakaran hutan dan banjir adalah akibat kebijakan salah urus dalam mengelola sumber daya alam di masa lalu. Fase kebakaran gambut pada 15 tahun terakhir mencapai titik paling parah. Tahun 1997 terjadi kebakaran hutan gambut yang luar biasa besar dan menyebabkan

kabut asap menyelimuti seluruh wilayah Kalimantan selama satu bulan lebih. Jarak pandang 1 meter tidak kelihatan sepanjang hari, aktivitas publik lumpuh, gerakan ekonomi mikro terhambat, asap bahkan "diekspor" ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, serta penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mewabah. Kejadian serupa terulang pada musim kemarau tahun 2006, yang menjadi tahun "tergelap" Provinsi Kalteng sepanjang dekade 2000 an karena terselimuti kabut asap. Setiap tahun sejak dekade 1990an sebenarnya terjadi kebakaran hutan gambut yang memunculkan kabut asap, bahkan terjadi pada tahun 2009, tetapi tidak sebesar dan separah tahun 1997 dan 2006.

Diakui bahwa kebakaran hutan gambut sangat merugikan masyarakat lokal Dayak, yang ternyata masyarakat Dayak pun turut membakar kebun karet dan rotan yang menjadi mata pencaharian utama. Dalam penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana kebijakan pihak otoritas di daerah setempat dalam menanggulangi kebakaran hutan gambut itu? Adakah peran aktif pemerintah daerah, swasta dan masyarakat lokal untuk menanggulangnya? Tujuan tulisan ini diketengahkan adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah da-

lam mitigasi bencana kebakaran hutan, dan mengetahui peranserta masyarakat swasta (investor) dan masyarakat lokal Dayak dalam mitigasi bencana kebakaran hutan. Fokus penelitian ini untuk mendeskripsi kebijakan mitigasi kebakaran hutan gambut oleh lembaga Pemerintah Provinsi Kalteng yang materi kebijakannya diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Dayak untuk diimplementasi swasta sejalan dengan kegiatan investasinya serta oleh masyarakat Kalteng sehari-hari. Kebijakan mitigasi ini diharapkan dapat menyumbang bagi mitigasi bencana perubahan iklim global.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moeloeng, 2005: 6). Penelitian kualitatif berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial, teori yang dihasilkan mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas, bersifat kontekstual dan historis (Somantri, 2005: 64).

Data dan informasi berasal dari hasil penelitian sejak tahun 2005. Data diperoleh dengan wawancara dengan informan kunci, data sekunder yaitu berasal dari dokumentasi, dan observasi terhadap kejadian yang sedang berlangsung. Pendekatan analisisnya menggunakan

studi kelembagaan (*institutional studies*), yaitu menitikberatkan analisis pada institusi atau lembaga (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) yang menjadi obyek serta proses formal yang dikerjakan oleh institusi tersebut. Studi kelembagaan merupakan salah satu model dalam studi kebijakan yang memandang kebijakan sebagai kegiatan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Tiga ciri pokok model ini adalah: 1) pemerintah memberi legitimasi terhadap kebijakan publik; 2) kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah bersifat universal; 3) pemerintah memiliki hak memonopoli penggunaan paksaan untuk mengimplementasikannya (Purwanto, 2009).

Fokus utama studi kelembagaan adalah peraturan legal formal, peta perencanaan institusi, pengawasan, keseimbangan peran dan fungsi para aktor yang terlibat (Kaho dan Lay, 2009). Peranan institusi dalam realitas sosial adalah sebagai hal yang membatasi perilaku individu dalam berinteraksi, seperti norma sosial, keyakinan, aturan formal, dan sistem nilai yang disepakati masyarakat dan institusi bersangkutan. Dalam konteks mitigasi kebakaran hutan gambut, peran institusi baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat adalah sebagai aktor yang membuat kebijakan, saling bekerjasama dan melaksanakan kebijakan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jadi jelas, peran lembaga pemerintah daerah, swasta dan masyarakat lokal Dayak sama-sama penting dalam mitigasi bencana kebakaran hutan gambut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanah gambut adalah tanah yang strukturnya mengandung elemen-elemen campuran tumbuhan seperti kayu, dedaunan serta ranting yang sudah lapuk dan kering, yang terkubur selama puluhan bahkan ratusan tahun di atas permukaan tanah hingga mencapai kedalaman tertentu. Tanah gambut rentan terbakar. Berdasarkan penelitian dari Universitas Palangkaraya, tanah gambut berupa hutan maupun bukan yang memiliki kedalaman mencapai 1 meter terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Jika terjadi kebakaran tanah gambut sulit ditanggulangi. Penyiraman air untuk memadamkan api tidak efektif karena air hanya menyentuh permukaan tanah sementara api menyala dalam kedalaman tertentu.

BOS Foundation (2008) mencatat sejak tahun 1860 suhu udara rata-rata di seluruh permukaan bumi meningkat $0,7^{\circ}\text{C}$ per tahun. Sementara di Indonesia sejak tahun itu suhu udara meningkat rata-rata $0,3^{\circ}\text{C}$. Hal ini disebabkan karena luasan hutan gambut sebagai penyerap dan penyimpan terbaik CO_2 semakin menyempit. Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di dunia yang disebut sebagai paru-paru dunia, memiliki hutan gambut paling luas di Indonesia. Untuk wilayah Kalteng saja, menurut *BOS-F* (2008), terdapat hutan gambut seluas 3.000.010 Ha, setiap hektarnya diperkirakan mampu menyerap dan menyimpan CO_2 sebesar 5.800 ton, sehingga hutan gambut seluruh wilayah Kalteng bisa menyerap dan menyimpan

pan 17 miliar ton CO_2 . Sementara untuk seluruh Kalimantan, luasan hutan secara keseluruhan (meliputi juga hutan gambut) diperkirakan 53.583.400 Ha; yang masih alami 11.094.915 Ha; sudah terdegradasi 20.537.897 Ha; dan sudah gundul mencapai 4.270.221 Ha. Berpatokan pada luasan hutan alami seluas 11 juta Ha, berarti hutan gambut (bercampur dengan hutan biasa) di Kalimantan hanya murni bisa menyerap dan menyimpan CO_2 sebesar 64 miliar ton. Setiap tahun seiring meluasnya degradasi dan penggundulan hutan akibat kebakaran, luasannya terus menyempit.

Hingga kini ada tiga permasalahan yang penting perannya dalam menyumbang kebakaran hutan gambut di Kalteng, yakni: *pertama*, minimnya dukungan dana lembaga donor internasional kepada lembaga lokal untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Sumbangan donor internasional justru dialirkan ke LSM asing yang justru asing bagi masyarakat lokal dan tidak memahami kondisi sosial budaya masyarakat. Untuk pengelolaan hutan gambut di DAS Kapuas dan Barito, misalnya, pemerintah setempat mengeluh karena yang menerima dana donor internasional untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan hutan gambut adalah lembaga asing dan tenaga asing, bukannya lembaga lokal dan masyarakat lokal (wawancara dengan pejabat Dinas Kehutanan di Kuala Kapuas, 3 Maret 2009). Padahal lembaga lokal seperti lembaga adat dan tenaga dari masyarakat lokal jauh lebih mengerti

pengelolaan hutan gambut berdasarkan kearifan yang mereka miliki.

Kedua, paradoks kebijakan yang tidak berkeadilan, yakni pelarangan eksploitasi hutan yang ketat bagi masyarakat adat sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Mereka dicap pelaku *illegal logging*. Padahal mereka mengambil kayu dari hutan adat sendiri secara tidak berlebihan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk ramuan membangun rumah. Tetapi eksploitasi kayu oleh perusahaan HPH (hak penguasaan hutan) justru dianggap legal. Kebijakan semacam ini disebut sebagai kebijakan yang pragmatis, hanya menekankan pada mekanisme pasar atau melalui intervensi negara tanpa melihat dampaknya bagi masyarakat lokal (Marijan, 2007: 103).

Ketiga, di kawasan hutan rentan terjadi konflik masyarakat adat dengan perusahaan HPH dan perusahaan lain yang mengeksploitasi hutan untuk membuka industri baru. Hal ini disebabkan oleh ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar lembaga pemerintahan serta pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan dalam memberi konsensi pembukaan hutan. Tanpa melihat kondisi riil di lapangan, pemerintah “menjual” begitu saja kawasan hutan kepada investor perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara, sehingga berbuah resistensi masyarakat yang memiliki hak atas hutan dan tanah atas dasar adat istiadat. Kebakaran hutan sering terjadi disengaja oleh masyarakat yang “murka” terhadap ke-

hadiran investor, maupun oleh investor dalam membuka lahan-lahan investasi.

Dari hasil wawancara secara mendalam diketahui bahwa di Kalteng, baru pemerintah provinsi yang berkomitmen terhadap mitigasi bencana kebakaran hutan gambut. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota belum memiliki niat. Padahal dalam konteks otonomi daerah, kabupaten/kota mestinya memiliki inisiatif dan lebih aktif dalam merespons bencana kebakaran hutan gambut yang menyumbang bagi perubahan iklim global. Alih-alih memiliki inisiatif, pemerintah kabupaten/kota justru hanya melaksanakan kebijakan pemerintah provinsi.

Terdapat sedikitnya empat kebijakan mitigasi kebakaran hutan gambut oleh Pemprov Kalteng, yaitu: kampanye, program pembinaan peladang menetap, program pemanfaatan lahan untuk kemakmuran rakyat, dan tataran teknis perijinan pembukaan dan pembersihan lahan. Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dimulai sejak tahun 2004 dan pada tahun 2007 ditingkatkan dengan cara penyebaran brosur dan penyuluhan.

Penyuluhan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng berkaitan dengan penyebab kebakaran, daerah rawan kebakaran, dampak kebakaran dan himbauan pengendalian kebakaran. Kebakaran akibat ulah manusia, seperti peternak membakar ilalang untuk peremajaan rumput yang kemudian apinya membesar dan menyebar tidak terkendali, penyiapan lahan untuk berladang atau bertani, membuat api unggun pada

saat berburu dan mencari ikan di hutan atau di sungai kemudian apinya tidak dipadamkan ketika pergi, membuang puntung rokok sembarangan di sekitar ilalang kering, dan iseng memainkan api untuk membakar ilalang, dan lain-lain.

Daerah/wilayah rawan kebakaran yaitu hutan yang sudah dibuka dan banyak sisa-sisa bekas tebangan, ilalang kering dan semak belukar, hutan dan lahan gambut yang kering. Dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan, yaitu kualitas udara menurun akibat asap, sakit mata akibat asap, serangan wabah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gangguan pada paru-paru, terganggu atau hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur iklim, kesuburan tanah, penyaring udara, tata air dan keragaman hayati, udara semakin panas, banjir pada saat musim hujan, kekeringan pada saat musim kemarau, penyebaran asap mengganggu hingga ke negeri tetangga.

Himbauan dan ajakan untuk melakukan pembakaran secara terkontrol dengan cara musyawarah desa sebelum melakukan pembakaran lahan untuk dijadikan tempat berladang, membuat sekat bakar sebagai pembatas, melakukan pencegahan secara bersama-sama dengan warga desa saat melakukan pembakaran, menghindari penggunaan jenis api dalam bentuk apapun di areal yang rawan terjadi kebakaran seperti merokok, menyalakan korek api, memainkan api, dan lain-lain.

Upaya tersebut di atas belum maksimal ditaati sebab belum diiringi dengan

kebijakan mengikat untuk mencegah melakukan pembakaran. Selain itu, ajakan terhadap masyarakat masih bersifat berceramah *top-down*. Tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mempresentasikan alasan kenapa mereka membuka lahan dengan cara dibakar. Ini yang membuat masyarakat seolah “buta tuli” terhadap kampanye itu, sebab pemerintah tidak memahami kenapa mereka membakar, dan dukungan dana untuk membina masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar masih sangat minim.

Program Pembinaan Peladang Menetap Melalui Budidaya Karet di Lahan Terlantar. Program ini merupakan tanggung jawab sosial setiap perusahaan swasta di wilayah Provinsi Kalteng melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau *Community Development* (CD). Setiap perusahaan swasta wajib melaksanakan program CSR/CD di wilayah operasinya masing-masing berdasarkan Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan dalam Dokumen AMDAL. Setiap perusahaan juga wajib memiliki desa binaan di sekitar areal produksinya. Gubernur Kalteng melalui Surat Gubernur, antara lain: a) No. 660/253/BPPLHD/2006 tanggal 20 Maret 2006; b) No. 660/160/II/BLH/2008 tanggal 31 Januari 2008; c) No. 660/-633/II/BLH/2008 tanggal 31 Juli 2008 meminta dukungan perusahaan terhadap pembinaan peladang menetap melalui *Program Community Development*. Selain itu, Gubernur Kalteng juga mencanangkan Gerakan Bersama Meman-

faatkan Lahan Terlantar (GRBER-MLT) tanggal 23 Mei 2009. Tujuan program ini adalah untuk mendukung program memanfaatkan lahan terlantar sehingga dapat dikurangi daerah rawan kebakaran, terbangunnya usaha petani menetap melalui kebun karet, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani karet.

Program Memanfaatkan Lahan Untuk Kemakmuran Rakyat terselenggara berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Tengah No. 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Program ini merupakan buah kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Samudera Rejeki Perkasa. Ada pun dasar hukum untuk menaungi program tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) maupun Pergub di tingkat Provinsi yang dibuat berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan/Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Perda tersebut ialah Perda Provinsi No. 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; serta Pergub No. 52 tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Di tingkat Kabupaten/Kota, hanya ada 1 Kabupaten dan 1 Kota yang membuat Perda serupa yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur (Perda No. 7 tahun 2003) dan Kota Palangka Raya (Perda No. 7 tahun 2003) yang mengatur ten-

tang Perijinan, Tatacara Pembakaran, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan. Tujuan dilaksanakannya program ini ialah memberikan solusi/arah-an umum bagi petani/peladang Dayak dalam melakukan aktivitas pembukaan lahan dan pekarangan, memberikan pedoman umum bagi Kabupaten/Kota.

Yang diatur dalam program ini, ialah: a) membuka lahan dan pekarangan adat sesuai dengan hukum yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang; b) membuka lahan dan pekarangan pada lahan yang pernah digarap sebelumnya yang dibuktikan surat penguasaan tanah; c) pembukaan lahan dan pekarangan diutamakan cara pembukaan lahan tanpa bakar; d) pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara bakar, harus terbatas dan terkendali dan mendapat izin; e) setiap orang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan pada lahan gambut ditetapkan sebagai berikut: gambut pantai dengan lapisan gambut tipis yaitu pembukaan awal dilakukan pembakaran terbatas dan terkendali tetapi tidak dilakukan pada musim kemarau, gambut pedalaman yaitu terutama lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 50cm, tidak diperkenankan pembakaran; f) pembersihan lahan dan pekarangan tetapi bukan untuk sawah, ladang atau kebun, tetap menerapkan cara pembakaran terbatas dan terkendali, tidak dilakukan pada musim kemarau.

Dalam hal perizinan pembukaan lahan dan pekarangan dengan pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang

yaitu Bupati/Walikota. Kewenangan pemberian izin dengan luas lahan di bawah 2,5 Ha dilimpahkan kepada Camat (0,5 - 2,5 Ha), Lurah/Kepala Desa (0,1 - 0,5 Ha), Ketua RT (0,1 Ha). Izin pembakaran secara kumulatif pada wilayah dan hari yang sama dapat dilakukan melalui Kecamatan (maks 100 Ha) atau Kelurahan/Desa (10 Ha). Pemberian ijin memperhatikan data indeks resiko kebakaran dan atau *hotspot* (titik panas), indeks peringkat numerik cuaca kebakaran atau *Fire Weather Index* (FWI), atau peringkat numerik potensi kekeringan dan asap atau *Drought Code* (DC), dan jarak pandang. Semua perijinan pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan tidak berlaku apabila Gubernur mengumumkan status “berbahaya.”

Tata cara pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran, wajib melaksanakan tata cara dan teknik pembakaran terbatas dan terkendali. Tata cara dan teknik pembakaran ialah: daun/ranting tidak menumpuk di bagian tepi, membuat sekat bakar, menyediakan bahan dan peralatan pemadam api, memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan, dilakukan secara bergiliran untuk lokasi yang berkelompok dan berdekatan, dilakukan secara bergotong-royong mulai jam 15.00-18.00 WIB, dimulai dari tepi lahan yang berlawanan arah angin dan setelah api bergerak jauh ke arah dalam pembakaran dilakukan dari bagian tepi lahan searah angin, dijaga secara bersamaan dan teliti agar tidak ada api yang teram-

bat keluar lahan, tidak diperkenankan meninggalkan lahan dan pekarangan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam, menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional/budaya/kearifan leluhur masyarakat adat setempat.

Hak dan kewajiban pembuka lahan. Hak yang dimiliki oleh pembuka lahan adalah memperoleh bantuan dan pembinaan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan dunia usaha terkait pembukaan lahan tanpa bakar dan mekanisasi pertanian. Mendapat informasi indeks resiko kebakaran, titik api, teknik dan tata cara pembakaran secara terbatas dan terkendali, pembukaan lahan tanpa bakar dengan mekanisasi pertanian. Memperoleh bantuan pemadam kebakaran pada instalasi terkait dan satuan pengendali kebakaran, apabila terjadi kebakaran lahan dan pekarangan tidak terkendali. Sementara kewajibannya adalah melaporkan kejadian kebakaran tidak terkendali, melakukan penanggulangan awal terhadap kebakaran lahan dan pekarangan yang tidak terkendali, memelihara dan membersihkan lahan dan pekarangannya pada musim penghujan dan menjaga dari ancaman kebakaran pada musim kemarau.

Berkaitan dengan tanggungjawab mencakup, antara lain: Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa atau ketua RT bertanggung jawab terhadap penyampaian informasi indeks risiko kebakaran dan indeks terkait lainnya, pengendalian pembukaan lahan/pekarangan bagi masyarakat dengan cara membakar se-

cara terbatas dan terkendali di wilayahnya. Setiap orang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran lahan/pekarangan yang dimiliki/digarapnya.

Pada tataran teknis perijinan pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara pembakaran dapat dilaksanakan berdasarkan Pergub No. 52 tahun 2008. Formulir terdiri dari 2 jenis, yaitu Formulir Permohonan Izin Pembukaan Lahan dan Pekarangan sebagai formulir permohonan yang diisi dan ditandatangani oleh petani/peladang Dayak, dan Surat Izin Pembukaan Lahan dan Pekarangan Dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagai formulir pemberian izin yang diisi dan ditandatangani pejabat berwenang (Bupati/Walikota/Camat/Kepala Desa/Lurah/Ketua RT). Hanya para pejabat tersebutlah yang memiliki wewenang memberi izin pembukaan lahan dengan cara dibakar. Hasil dari empat program kebijakan tersebut pada tahun 2010 tidak lagi terjadi kebakaran hutan di musim kemarau.

Masyarakat Dayak memiliki tradisi dalam setiap pembersihan lahan ladang, baik membuka hutan perawan atau pun lahan bukan hutan dengan cara dibakar. Demikian sentralnya ladang bagi kehidupan orang Dayak, tidak berlebihan jika ada yang menyebut kebudayaan mereka sebagai kebudayaan huma atau kebudayaan ladang (Salim, 2005: 31; Rini, 2005: 25). Ketika bencana kebakaran hutan terjadi yang mengakibatkan kabut asap melanda pulau Kalimantan yang membuat terganggunya ruang sosial masyarakat luas, petani Dayak men-

jadi tertuduh penyebabnya. Pada tahun 2009 tercatat oleh Bagian Deteksi Dini Manggala Agni Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BDDMA-BKSDA) Provinsi Kalteng, ada 2.222 *hot spot* di seluruh wilayah Kalteng (Kalteng Pos, 2 Oktober 2009). Di Jakarta telah disahkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang melarang aktivitas pembakaran hutan dan lahan oleh siapa pun, termasuk petani Dayak di Kalimantan. Di Kalteng, pemerintah provinsi menginstruksikan aparat kepolisian untuk menangkap dan mempidanakan siapa saja yang melakukan aktivitas pembakaran hutan dan lahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan (Kalteng Pos, 9 September 2009), sejak tahun 2006 sudah membuat “fatwa haram” terhadap aktivitas pembakaran hutan dan lahan.

Dalam konteks lokal, baik produk hukum formal maupun fatwa tersebut secara langsung mengena kepada petani Dayak. Hanya saja ketika pelarangan itu terjadi, lebih-lebih bila sudah terlegitimasi dalam bentuk UU atau peraturan lainnya, maka bagaimana aktivitas kebudayaan berladang masyarakat Dayak? Yang perlu dicermati bahwa tidak hanya aktivitas pembakaran lahan ladang oleh petani Dayak saja yang mengakibatkan bencana kebakaran hutan, aktivitas pembakaran lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar dinilai banyak kalangan sebagai penyumbang terbesar penyebab kebakaran (Hadi, 2007: 9; wawancara dengan Petani Dayak di Katingan, 30 Juli 2007).

Aktivitas yang dilakukan petani Dayak sebenarnya tidak membuat kebakaran hutan dan kabut asap separah seperti selama ini. Aktivitas pembakaran bisa menciptakan kebakaran hutan yang luas dan menimbulkan kabut asap bila dilakukan secara tidak terkendali dengan membakar hutan atau lahan dalam jumlah besar dan luas yang dilakukan secara sengaja oleh segelintir orang di lahan dan hutan yang bukan dijadikan tempat berladang. Petani Dayak memiliki kearifan dalam aktivitas pembakaran lahan, dan hanya dilakukan untuk membuka lahan ladang, tidak boleh yang lain. Sehingga kecil kemungkinan menimbulkan kabut asap dan kebakaran hutan yang maha luas.

Kenyataannya, kearifan aktivitas pembakaran lahan dalam siklus berladang masyarakat Dayak di desa-desa banyak diadopsi Pemprov Kalteng untuk dimuat dalam materi peraturan formal baik Perda maupun Pergub. Peraturan formal tersebut kemudian menjadi panduan atau pedoman umum bagi aktivitas pembukaan dan pembakaran lahan di Kalteng. Sebab itu dalam konteks ini penulis hendak menegaskan bahwa peranserta masyarakat Dayak dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan perubahan iklim sudah berlangsung jauh sebelum isu besar perubahan iklim global muncul. Upaya mitigasi mereka praktikkan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut di sekitar mereka dalam setiap aktivitas perladangan.

Dari aktivitas perladangan dapat dilihat bagaimana sumbangan dan per-

anserta masyarakat Dayak dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan yang luas. Aktivitas tersebut adalah aktivitas adat yang sudah terlegitimasi sejak lama secara turun temurun, jauh sebelum isu besar perubahan iklim muncul. Jadi dalam konteks kelembagaan masyarakat Dayak, hukum informal berupa hukum adat Dayak yang mengatur aktivitas pembakaran dalam perladangan menjadi penting perannya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ada sanksi adat yang akan diberlakukan bagi setiap individu atau keluarga peladang yang lalai menjaga api di saat aktivitas pembakaran dilakukan, atau juga lalai melaksanakan tahap demi tahap dalam persiapan pembakaran lahan. Tentu saja sanksi tersebut tetap dalam konteks adat yang berlaku. Aturan adat dalam aktivitas pembakaran lahan itu, adalah kebijakan mitigasi terhadap kebakaran.

Simpulan

Kebijakan mitigasi oleh Pemprov Kalteng terhadap bencana kebakaran hutan gambut di Kalteng adalah kebijakan yang materinya diadopsi dari aturan adat masyarakat Dayak yang dalam aktivitas berladangnya melaksanakan kegiatan pembakaran. Pembakaran lahan ladang oleh petani Dayak sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas berladang dan merupakan satu siklus dari kegiatan berladang secara keseluruhan. Secara langsung atau tidak petani Dayak di Kalteng berperan serta dalam mitigasi kebakaran hutan gambut dan perubahan iklim global. Di saat bersamaan, peran swasta

yang hadir di Kalteng dapat dimanfaatkan pemerintah daerah melalui program CSR/CD untuk mendorong serta mendukung kebijakan mitigasi bencana kebakaran hutan gambut sejalan dengan kegiatan investasi. Walaupun masih terdapat kekurangan, kebijakan mitigasi ini sudah dapat berjalan dan memperoleh dukungan berkat adanya kerjasama (*partnership*) yang baik antara pemda, swasta dan masyarakat Dayak.

Kebijakan lokal adalah kebijakan otonomi daerah telah memberi ruang bagi pemerintah di tingkat lokal (terutama provinsi) dalam membuat kebijakan strategis yang diperlukan daerah. Tidak terkecuali kebijakan yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat di mana materi kebijakan yang dibuat berasal (diadopsi) dari nilai-nilai yang sudah berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, tidak sulit bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasinya sebab masyarakat memang sudah melaksanakan kebijakan itu sesuai perintah hukum informal (hukum adat) jauh sebelum dibuatkan kebijakan hukum formal oleh pemerintah daerah. Kehadiran swasta (investor), yang kebanyakan lalai dimanfaatkan oleh kebanyakan pemerintah daerah di tempat lain, ternyata di Kalteng dapat maksimal menjalankan misi sosial melalui program CSR/CD membantu masyarakat lokal dan pemerintah daerah sejalan dengan kegiatan investasinya.

Daftar Pustaka

- Hadad, Ismid. 2010. Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan. *Majalah Prisma*. Vol. 29, April: 6-8.
- Hadi, Kisno. 2007. Kearifan Berladang. *Majalah Kalimantan Review*. Edisi No. 147, Tahun XVI, November: 9.
- Kaho, Josef Riwu dan Cornelis Lay. 2009. *Modul Kuliah Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Program S2 PLOD UGM. Tidak Dipublikasi.
- Marijan, Kacung. 2007. Industrial Policy, Industrialisation and Cluster Industries in Indonesia: An Overview. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXX, No. 64: 103.
- Moleong. Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ROSDA.
- North, Walter. 2009. Pemanasan Global: dari Komitmen ke Tindakan. *Koran Tempo*, 28 November.
- Patus, Sikur. 1986. *Hukum Adat dan Kebudayaan Dayak Dusun*. Naskah tidak diterbitkan.
- Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan/Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekerjaan Bagi Masyarakat di Kalimantan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7 tahun 2003 tentang Perijinan, Tatacara Pembakaran, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 7 tahun 2003 tentang Perijinan, Tatacara Pembakaran, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Purwanto, Erwan Agus.
2009. Bahan Kuliah Kebijakan Publik. Program S2 Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD". Tidak Dipublikasi.
- Rini, Kartika. 2005. *Tempun Petak Nana Sare: Kisah Dayak Kadori, Komunitas Peladang di Pinggiran*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Salim HS, Hairus. 2004. Masyarakat Dayak Meratus, Agama Resmi, dan Emansipasi. *Jurnal Kebudayaan Kandil*. Edisi 7, Tahun II Nopember 2004-Januari 2005, 31.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Sosial Humaniora Makara*, Volume IX, 2, Desember: 57-65.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Terimakasih kepada mitra bestari:

Prof. Dr. FX. Mukarto	(Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)
Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi	(Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Prof. Dr. Wuradji	(Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Siti Amanah	(Institut Pertanian Bogor)
Dr. Puji Lestari	(Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta)
Dr. Turnomo Raharjo	(Universitas Diponegoro Semarang)
Destha Titi Raharjana S. Sos., M. Si.	(Pusat Studi Pariwisata UGM Yogyakarta)
Sugiyanto S. Sos., M. M.	(STPMD “APMD” Yogyakarta)

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN DESA

Penulis diharapkan memenuhi pedoman penulisan jurnal ini. Semua naskah yang dikirim akan ditelaah oleh satu editor dan paling sedikit dua reviewer. Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa memegang prinsip anonymous (tanpa nama) ketika dilakukan review terhadap naskah dimana identitas baik penulis maupun reviewer akan dijaga kerahasiaannya.

- a. Artikel harus orisinal dan belum pernah dimuat di media penerbitan lain.
- b. Judul:
 - Menggambarkan isi artikel dengan jumlah maksimal 14 kata.
 - Penulisan judul, huruf besar hanya untuk awal kata, kata sambung menggunakan huruf kecil.
Contoh: Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat
- c. Abstrak terdiri dari 150 sampai 200 kata yang ditulis dalam satu paragraf. Abstrak memuat masalah pokok, tujuan, metode atau pendekatan, hasil dan simpulan. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- d. Kata kunci (keywords) memuat kata-kata yang menjadi intisari abstrak
- e. Isi artikel:
 - Mempunyai relevansi dengan bidang ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora yang fokus pada pembangunan masyarakat dan desa.
 - Sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasai penulis.
 - Mengembangkan teori dan praksis dalam bidang keilmuan penulis.
 - Memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan dan masalah.
- f. Teknik Penulisan:
 - Di dalam penulisan artikel, hindari penggunaan dot points, pengabjadan, atau penomoran seperti ini:
1.
2.
Tetapi ditulis sebagai berikut: 1).....; 2).....
 - Artikel ditulis dalam bentuk esai, sehingga tidak ada format numerik (atau abjad) yang memisahkan antar bab/bagian, atau pun untuk menandai bab/bagian baru.
- g. Urutan artikel sebagai berikut:
 - Judul
 - Nama lengkap penulis tanpa gelar (Nama jangan disingkat)
 - Alamat lengkap Institusi
 - Nama, telp, fax dan email penulis untuk korespondensi
 - Abstrak
 - Kata kunci (keywords).Untuk tipe naskah hasil penelitian (research article).
 - Pendahuluan
 - Metode Penelitian
 - Hasil dan Pembahasan

- a. Bila ada tabel/grafik, harus diacu dalam pembahasan
 - b. Tabel dan gambar / grafik, dibuat sesederhana mungkin. Tabel terdiri dari nomor tabel, judul tabel (di atas), “ catatan/keterangan “ bila diperlukan (di bagian bawah tabel untuk menjelaskan singkatan-singkatan dalam tabel). Tabel hanya menggunakan garis-garis horizontal, tidak menggunakan garis vertikal.
 - c. Gunakan running note bukan footnote atau endnote, misalnya:
..... (Huntington, 1996:10; Ritzer, 2002: 145-149).
- Simpulan
Simpulan tidak dirinci dalam poin-poin, tetapi berupa paragraf.

Artikel hasil pemikiran/setara hasil penelitian

- Judul
- Pendahuluan
- Sub-sub Judul
- Simpulan

Daftar Pustaka, dengan mempertimbangkan:

- a. Derajat kemutakhiran bahan yang diacu dengan melihat proporsi terbitan 10 tahun terakhir.
- b. Pustaka yang digunakan mencakup teks book, jurnal, dan sumber lain. Acuan dari jurnal minimal 50%.
- c. Keseringan pengarang mengacu pada diri sendiri (Self citation) dapat mengurangi kualitas artikel.
- d. Contoh cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut:
 - o Buku
Darwin, Muhadjir. 2005. Memanusiakan Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan. Yogyakarta: Benang Merah.
 - o Buku (edited)
Crandell, K.A. (ed.). 1999. The Evolution of HIV. Baltimore: John Hopkins Press.
 - o Bab dalam buku
Coffin, J.M. 1999. Molecular Biology of HIV. Dalam: K.A. Crandell (ed.) The Evolution of HIV. Baltimore: John Hopkins Press.
 - o Artikel dalam jurnal
Ernawan, Yusuf. 2008. Slang Sebagai Simbol Replica Kelas di Yogyakarta. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Tahun XXI. No. 3: 245-249.
 - o Tesis and disertasi
Gill, M.R. 1997. The Relationship Between The Physical Properties of Human Articular Cartilage and Tissue Biochemistry and Ultrastructure. Disertasi, University of Leeds.
- h. Ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu.
- i. Naskah sebanyak 15 sampai 20 halaman (termasuk tabel dan gambar). Diketik dengan huruf Times New Roman. Font 12. Spasi 2. Ukuran kertas A4. Margin 2,5cm (atas, bawah, kanan dan kiri).